

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/356841517>

PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Chapter · December 2021

CITATIONS

119

READS

12,740

14 authors, including:



Puspo Nugroho
IAIN KUDUS

15 PUBLICATIONS 271 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)



Dasep Bayu Ahyar

STAI Al Badar Cipulus Purwakarta

7 PUBLICATIONS 166 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)

Editor : Dr. Rusnawati, M.A.



PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Miswar Saputra, M.Pd.
Nazaruddin, M.Ag.
Zaedun Na'im, M.Pd.I.
Syahidin, SE., M.Si., C.SLHF, C.LMA., C.BPA.
Puspo Nugroho, M.Pd.I.
Ismatul Maula, M.Pd.
Yanry Budianingsih, M.Pd.
Lila Pangestu Hadiningrum, M.Pd.
Dasep Bayu Ahyar, M.Pd.
Khaidir, M.Ag.
Makmur, S.Pd.I., M.Pd.I.
Dahniar, M.A.





PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM



Salah satu komponen yang sering dijadikan faktor penyebab menurunnya mutu pendidikan adalah kurikulum. Kritikan cukup tajam terhadap kurikulum antara lain; kurikulum terlalu padat, tidak sesuai dengan kebutuhan anak, terlalu memberatkan anak, merepotkan guru dan sebagainya. Oleh karena itu akan banyak dilakukan inovasi dalam pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI), salah satunya melalui penerapan kurikulum berbasis kompetensi. Pengembangan kurikulum merupakan komponen yang sangat esensial dalam keseluruhan kegiatan pendidikan.

Di dalam buku ini yang berhubungan dengan perkembangan kurikulum, maka peran guru di dalam pengembangannya sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran yang akan dilaksanakan secara kurikulum yang bersifat sentral maupun desentral, keduanya memerlukan penerapan dan perkembangan dari peran guru tersebut. Begitu juga dengan perkembangan kurikulum PAI, maka dari itu buku ini akan membahas tentang peran guru terhadap perkembangan kurikulum yang akan membuka wawasan kita dalam hal peranan guru dalam pengembangan kurikulum PAI.



ISBN 978-623-97860-0-7



9 786239 786007

PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Miswar Saputra, M.Pd
Nazaruddin, MA
Zaedun Na'im, M.Pd.I
Syahidin, SE., M.Si., C.S.HF., C.LMA., C.BPA
Puspo Nugroho, M.Pd.I
Ismatul Maula, M.Pd
Yanry Budianingsih, M.Pd
Lila Pangestu Hadiningrum, M.Pd
Dasep Bayu Ahyar, M.Pd
Khaidir, M.Ag
Makmur, S.Pd.I., M.Pd.I
Dahnir, MA

Editor:
Dr. Rusnawati, MA



PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Penulis:

Miswar Saputra, M.Pd; Nazaruddin, MA; Zaedun Na'im, M.Pd.I; Syahidin, SE., M.Si., C.S.HF., C.LMA., C.BPA; Puspo Nugroho, M.Pd.I; Ismatul Maula, M.Pd; Yanry Budianingsih, M.Pd; Lila Pangestu Hadiningrum, M.Pd; Dasep Bayu Ahyar, M.Pd; Khaidir, M.Ag; Makmur, S.Pd.I., M.Pd.I; Dahniar, MA.

ISBN: 978-623-97860-0-7

Editor:

Dr. Rusnawati, MA

Penyunting:

Nanda Saputra, M.Pd.

Tata Letak

Ulfa,

Desain Sampul

Zulkarizki,

14,5 x 20,5 cm, viii + 227 hlm.

Cetakan I, Agustus 2021

Penerbit:

Yayasan Penerbit Muhammad Zaini

Redaksi:

Jalan Kompleks Pelajar Tijue

Desa Baroh Kec. Pidie

Kab. Pidie Provinsi Aceh

No. Hp: 085277711539

Email: nandasaputra680@gmail.com

Website: <http://penerbitzaini.com>

Hak Cipta 2021 @ Yayasan Penerbit Muhammad Zaini

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit atau Penulis.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan buku Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam ini. Buku referensi ini merupakan buku kolaborasi yang dituliskan oleh beberapa dosen yang bergabung dalam Asosiasi Dosen Kolaborasi Lintas Perguruan Tinggi.

Adapun *bookchapter* ini tidak akan selesai tanpa bantuan, diskusi dan dorongan serta motivasi dari beberapa pihak, walaupun tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya.

Ahirnya, penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Dengan demikian, penulis mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan serta perkembangan lebih lanjut pada *bookchapter* ini.

Wassalamu'alaikumsalam, Wr.Wb.

Sigli, 27 Juli 2021

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I	
HAKIKAT KURIKULUM	1
A. Pengertian Kurikulum.....	1
B. Fungsi Kurikulum	4
C. Dasar Kurikulum Pendidikan Islam	10
D. Prinsip-Prinsip Kurikulum Dalam Islam.....	11
BAB II	
PERAN GURU DALAM PENGEMBANGAN KURIKULUM PAI	15
A. Pengembangan Kurikulum PAI.....	15
B. Peran Guru Dalam Pengembangan Kurikulum PAI....	19
C. Peran Guru Dalam Pengembangan Kurikulum Perspektif Pengelolaan	26
BAB III	
PERAN KEPALA SEKOLAH/MADRASAH DALAM PENGEMBANGAN KURIKULUM PAI.....	31
A. Syarat Kepala Sekolah/Madrasah	31
B. Kinerja Kepala Sekolah/Madrasah	35
C. Tugas Dan Peran Kepala Sekolah/Madrasah Dalam Pengembangan Kurikulum	37

BAB IV

LANDASAN PENGEMBANGAN KURIKULUM PAI.....	41
A. Landasan Filosofis	44
B. Landasan Psikologi.....	46
C. Landasan Sosiologis	48
D. Landasan Organisatoris.....	51

BAB V

PERKEMBANGAN KURIKULUM MADRASAH DI INDONESIA.....	55
A. Kurikulum Pendidikan Agama Sebelum Kemerdekaan	55
1. Pengajian Al Qur'an.....	58
2. Pengajian Kitab/Pesantren.	60
B. Kurikulum Pendidikan Agama Pasca Kemerdekaan..	65
C. Madrasah Era SKB 3 Menteri.....	80
D. Bentuk Struktur Kurikulum Madrasah	83
1. Madrasah Ibtidaiyah/MI	84
2. Kurikulum Madrasah Tsanawiyah/MTs.....	85
3. Kurikulum Madrasah Aliyah/MA	86

BAB VI

MODEL MODEL PENGEMBANGAN KURIKULUM	93
A. Model Pengembangan Menurut Ralph Tyler.....	95
B. Model Pengembangan Kurikulum Menurut Hilda Taba.....	98
C. Model Pengembangan Kurikulum Menurut DK Wheeler	105
D. Model Pengembangan Kurikulum Menurut Beauchamp	108

BAB VII

MACAM-MACAM KONSEP KURIKULUM	111
A. Kurikulum Akademik	112
B. Kurikulum Humanistik	114
C. Kurikulum Rekonstruksi Sosial.....	116
D. Kurikulum Teknologi.....	119

BAB VIII

DESAIN PENGEMBANGAN KURIKULUM.....	123
A. Prinsip Dasar Pengembangan Kurikulum.....	124
B. Kurikulum yang Berpusat Pada Bahan Ajar	129
C. Kurikulum yang Mengutamakan Peranan Siswa	135
D. Kurikulum yang Berpusat Pada Problematika yang Dihadapi Masyarakat.....	137

BAB IX

RAGAM KONSEP KURIKULUM	139
A. Kurikulum Pesantren	139
B. Kurikulum Madrasah	145
C. Kurikulum Sekolah	151

BAB X

MODEL DESAIN KURIKULUM	155
A. Desain Kurikulum Subject Academic	156
B. Desain Kurikulum Kompetensi atau Teknologi	156
C. Desain Kurikulum Humanistik.....	157
D. Desain Kurikulum Rekontruksi Sosial.....	158
E. Model Pengembangan Kurikulum	160

BAB XI

PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN

KARAKTER.....	167
A. Hakekat, Tujuan dan Fungsi Pendidikan Karakter.....	167
1. Hakekat Pendidikan Karakter.....	167
2. Tujuan dan Fungsi Pendidikan Karakter	169
B. Nilai-Nilai Pembentukan dan Proses Pendidikan Karakter	169
C. Strategi Pelaksanaan Pendidikan Karakter	170
D. Pengembangan Kurikulum Pendidikan Karakter di Tingkat Satuan Pendidikan	176
1. Kurikulum Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar (SD).....	178
2. Kurikulum Pendidikan Karakter di SMP/MTs.....	184
3. Kurikulum Pendidikan Karakter di SMA.....	187
E. Pelaksanaan Pendidikan Karakter di Sekolah/ Madrasah	188

BAB XII

EVALUASI KURIKULUM.....	195
A. Pengertian Evaluasi Kurikulum	195
B. Peranan Evaluasi Kurikulum.....	197
C. Aspek Kurikulum yang Dinilai.....	199
D. Model-Model Evaluasi Kurikulum	203
1. Evaluasi Model Penelitian.....	203
2. Evaluasi Model Objektif	205
3. Model Campuran Multivariasi.....	207
DAFTAR PUSTAKA	210
BIOGRAFI PENULIS	217

BAB I

HAKIKAT KURIKULUM

A. Pengertian Kurikulum

Secara etimologi, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu *curir* yang artinya pelari dan *curere* yang berarti jarak yang ditempuh oleh pelari. Istilah ini pada mulanya digunakan dalam dunia olahraga yang berarti "*a little race course*" yang artinya suatu jarak yang harus ditempuh dalam pertandingan olahraga.

Berdasarkan pengertian ini, dalam konteks dengan dunia pendidikan, memberinya pengertian sebagai "*circle of instruction*" yaitu suatu lingkaran pengajaran di mana guru dan mood (suasana hati) terlibat di dalamnya. Sementara pendapat yang lain dikemukakan bahwa kurikulum adalah arena pertandingan, tempat pelajaran bertanding untuk menguasai pelajaran guna mencapai garis finis berupa ijazah, diploma atau gelar kesarjanaan (Samsul Nizar, 2002:55-56).

Dalam bahasa Arab, kata kurikulum biasa diungkapkan dengan *manhaj* yang berarti jalan yang terang yang dilalui oleh manusia pada berbagai bidang kehidupan. Sedangkan kurikulum pendidikan (*manhaj al-dirasah*) dalam Kamus Tarbiyah adalah seperangkat perencanaan dan media yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan-tujuan pendidikan (Hasan Langgulung, 1986:176)

Adapun secara terminologi, para ahli telah banyak mendefinisikan kurikulum diantaranya (Ramayulis, 2008:150-151):

1. Ramayulis mengutip dari Crow dan Crow mendefinisikan bahwa kurikulum adalah rancangan pengajaran atau sejumlah mata pelajaran yang disusun secara sistematis untuk menyelesaikan suatu program untuk memperoleh ijazah.
2. Ramayulis mengutip dari M. Arifin memandang kurikulum sebagai seluruh bahan pelajaran yang harus disajikan dalam proses kependidikan dalam suatu sistem institusional pendidikan.
3. Ramayulis mengutip dari Zakiah Daradjat, memandang kurikulum sebagai suatu program yang direncanakan dalam bidang pendidikan dan dilaksanakan untuk mencapai sejumlah tujuan-tujuan pendidikan tertentu.
4. Ramayulis mengutip dari Addamardasyi Sarhan dan Munir Kamil memandang bahwa kurikulum adalah sejumlah pengalaman pendidikan, kebudayaan, sosial, olahraga dan kesenian yang disediakan oleh sekolah bagi peserta didiknya di dalam dan di luar sekolah dengan maksud menolong untuk berkembang menyeluruh dalam segala segi dan merubah tingkah laku mereka sesuai dengan tujuan-tujuan pendidikan.

Dengan demikian pengertian kurikulum dalam pandangan modern merupakan program pendidikan yang disediakan oleh sekolah, yang tidak hanya sebatas bidang studi dan kegiatan belajarnya saja, akan tetapi meliputi segala sesuatu yang dapat mempengaruhi perkembangan dan pembentukan pribadi peserta didik sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan sehingga dapat meningkatkan mutu kehidupannya, yang pelaksanaannya bukan saja di sekolah tetapi juga di luar sekolah.

Jika diaplikasikan dalam kurikulum pendidikan Islam, maka kurikulum berfungsi sebagai pedoman yang digunakan oleh pendidik untuk membimbing peserta didiknya kearah tujuan tertinggi pendidikan Islam, melalui akumulasi sejumlah pengetahuan, keterampilan dan sikap.

Dalam hal ini proses pendidikan Islam bukanlah suatu proses yang dapat dilakukan secara sembarangan, tetapi hendaknya mengacu kepada konseptualisasi manusia sempurna (insan kamil) yang strateginya telah tersusun secara sistematis dalam kurikulum pendidikan Islam (Ramayulis, 2008:152)

Dalam perkembangan selanjutnya, pengertian kurikulum tidak hanya terbatas pada program pendidikan namun juga dapat diartikan menurut fungsinya.

1. Kurikulum sebagai program studi. Pengertiannya adalah seperangkat mata pelajaran yang mampu dipelajari oleh peserta didik di sekolah atau di instansi pendidikan lainnya.
2. Kurikulum sebagai konten. Pengertiannya adalah data atau informasi yang tertera dalam buku-buku kelas tanpa dilengkapi dengan data atau informasi lainnya yang memungkinkan timbulnya belajar.
3. Kurikulum sebagai kegiatan berencana. Pengertiannya adalah kegiatan yang direncanakan tentang hal-hal yang akan diajarkan dan dengan cara bagaimana hal itu dapat diajarkan dengan hasil yang baik.
4. Kurikulum sebagai hasil belajar. Pengertiannya adalah seperangkat tujuan yang utuh untuk memperoleh suatu hasil tertentu tanpa menspesifikasikan cara-cara yang

dituju untuk memperoleh hasil-hasil itu, atau seperangkat hasil belajar yang direncanakan dan diiinginkan.

5. Kurikulum sebagai reproduksi kultural. Pengertiannya adalah transfer dan refleksi butir-butir kebudayaan masyarakat, agar dimiliki dan dipahami anak-anak generasi muda masyarakat tersebut.
6. Kurikulum sebagai pengalaman belajar. Pengertiannya adalah keseluruhan pengalaman belajar yang direncanakan di bawah pimpinan sekolah.
7. Kurikulum sebagai produksi. Pengertiannya adalah seperangkat tugas yang harus dilakukan untuk mencapai hasil yang ditetapkan terlebih dahulu (Muhaimin dan Abdul Mujid, 1993:33).

B. Fungsi Kurikulum

Pada dasarnya kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman atau acuan. Bagi guru, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Bagi kepala sekolah dan pengawas, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan supervisi atau pengawasan. Bagi orang tua, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman dalam membimbing anaknya belajar di rumah. Bagi masyarakat, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman untuk memberikan bantuan bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah.

Berkaitan dengan fungsi kurikulum bagi siswa sebagai subjek didik, terdapat enam fungsi kurikulum, yaitu (Rudi Susilana, 2006:9-10):

1. Fungsi Penyesuaian (*the adjustive or adaptive function*)
Fungsi Penyesuaian mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mengarahkan siswa agar memiliki sifat *well adjusted* yaitu mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Lingkungan itu sendiri senantiasa mengalami perubahan dan bersifat dinamis. Karena itu, siswa pun harus memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungannya.
2. Fungsi Integrasi (*the integrating function*)
Fungsi Integrasi mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh. Siswa pada dasarnya merupakan anggota dan bagian integral dari masyarakat. Oleh karena itu, siswa harus memiliki kepribadian yang dibutuhkan untuk dapat hidup dan berintegrasi dengan masyarakatnya.
3. Fungsi Diferensiasi (*the differentiating function*)
Fungsi Diferensiasi mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu siswa. Setiap siswa memiliki perbedaan, baik dari aspek fisik maupun psikis, yang harus dihargai dan dilayani dengan baik.
4. Fungsi Persiapan (*the propaedeutic function*)
Fungsi Persiapan mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mempersiapkan siswa untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan berikutnya. Selain itu, kurikulum juga diharapkan

dapat mempersiapkan siswa untuk dapat hidup dalam masyarakat seandainya karena sesuatu hal, tidak dapat melanjutkan pendidikannya.

5. Fungsi Pemilihan (*the selective function*)

Fungsi Pemilihan mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih program program belajar yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Fungsi pemilihan ini sangat erat hubungannya dengan fungsi diferensiasi, karena pengakuan atas adanya perbedaan individual siswa berarti pula diberinya kesempatan bagi siswa tersebut untuk memilih apa yang sesuai dengan minat dan kemampuannya. Untuk mewujudkan kedua fungsi tersebut, kurikulum perlu disusun secara lebih luas dan bersifat fleksibel.

6. Fungsi Diagnostik (*the diagnostic function*)

Fungsi Diagnostik mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu membantu dan mengarahkan siswa untuk dapat memahami dan menerima kekuatan (potensi) dan kelemahan yang dimilikinya. Jika siswa sudah mampu memahami kekuatan kekuatan dan kelemahan kelemahan yang ada pada dirinya, maka diharapkan siswa dapat mengembangkan sendiri potensi kekuatan yang dimilikinya atau memperbaiki kelemahan-kelemahannya.

Muhammad Ansyar menguraikan beberapa fungsi kurikulum sebagai berikut (Ansyar, 1989:20):

1. Kurikulum sebagai pedoman studi. pengertiannya adalah seperangkat mata pelajaran yang mampu dipelajari oleh

peserta didik di sekolah atau di institusi pendidikan lainnya.

2. Kurikulum sebagai konten. pengertiannya adalah data atau informasi yang tertera dalam buku-buku kelas tanpa dilengkapi dengan data atau informasi lain yang memungkinkan timbulnya belajar.
3. Kurikulum sebagai kegiatan terencana. pengertiannya adalah kegiatan yang direncanakan tentang hal-hal yang akan diajarkan dengan berhasil.
4. Kurikulum sebagai hasil belajar. pengertiannya adalah seperangkat tujuan yang utuh untuk memperoleh suatu hasil tertentu tanpa menspesifikasi cara-cara yang dituju untuk memperoleh hasil itu, atau seperangkat hasil belajar yang direncanakan dan diinginkan.
5. Kurikulum sebagai reproduksi kultural. pengertiannya adalah transfer dan refleksi butir-butir kebudayaan masyarakat, agar dimiliki dan difahami anak-anak generasi muda masyarakat tersebut.
6. Kurikulum sebagai pengalaman belajar. pngertiannya adalah keseluruhan pengalaman belajar yang direncanakan di bawah pimpinan sekolah.
7. Kurikulum sebagai produksi. pengertiannya adalah tugas yang harus dilakukan untuk mencapai hasil yang ditetapkan terlebih dahulu.

Selain dari fungsi-fungsi di atas, Dakin mengemukakan fungsi kurikulum dengan pihak-pihak yang secara langsung terkait dengan kurikulum sekolah, yaitu guru, kepala sekolah, para penulid buku ajar, dan masyarakat (Dakin, 2004:13-18).

1. Fungsi kurikulum bagi para penulis

Para penulis buku ajar mestinya mempelajari terlebih dahulu kurikulum yang berlaku pada waktu itu. Untuk membuat berbagai pokok bahasan maupun subpokok bahasan, hendaknya penulis buku ajar membuat analisis instruksional terlebih dahulu. Kemudian menyusun Garis-Garis Besar Program Pelajaran (GBPP) untuk mata pelajaran tertentu, baru berbagai bahan yang relevan. Sum ber bahan tersebut dapat berupa bahan cetak (buku, makalah, majalah, jurnal, koran, hasil penelitian dan sebagainya), yang diambil dari narasumber, pengalaman penulis sendiri atau dari lingkungan. perlu diingat bahwa tidak semua bahan tersebut ditulis sebagai bahan pelajaran. yang perlu mendapat pertimbangan ialah kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. Bahan hendaknya bersifat pedagogis, artinya bahan hendaknya berisikan hal-hal yang normatif.
- b. Bahan hendaknya bersifat psikologis, artinya bahan yang ditulis memperhatikan kejiwaan peserta didik yang mempergunakannya.
- c. Bahan disesuaikan dengan perhatian, minat, kebutuhan, dan perkembangan jiwa anak.
- d. Bahan hendaknya disusun secara didatis, artinya bahan yang tertulis tersebut dapat diorganisir sedemikian rupa sehingga mudah untuk diajarkan.
- e. Bahan hendaknya bersifat sosiologis, artinya bahan jangan sampai kontroversal dengan keadaan masyarakat sekitar.

- f. Bahan hendaknya bersifat yuridis, artinya bahan yang disusun jangan sampai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, GBHN, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah No. 27m 28,29, dan 30. Begitu juga bahan tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang lain.
2. Fungsi kurikulum bagi guru

Bagi guru baru, sebelum mengajar pertama-tama yang perlu dipertanyakan adalah kurikulumnya. setelah kurikulum didapat, pertanyaan berikutnya adalah Garis-Garis Besar Program Pengajaran. Setelah Garis-Garis Besar Program pengajaran ditemukan, barulah guru mencari berbagai sumber bahan yang relevan atau yang telah ditentukan oleh Depdiknas. Sesuai dengan fungsinya bahwa kurikulum adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan, maka guru semestinya mencermati tujuan pendidikan yang dicapai oleh lembaga pendidikan dimana ia bekerja.
3. Fungsi kurikulum bagi kepala sekolah

Bagi kepala sekolah yang baru, yang dipelajari pertama kali adalah tujuan lembaga yang akan dipimpinya. Kemudian mencari kurikulum yang berlaku sekarang untuk dipelajari, terutama pada buku petunjuk pelaksanaan. Selanjutnya tugas kepala sekolah melakukan supervisi kurikulum.
4. Fungsi kurikulum bagi masyarakat

Kurikulum harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat sekitar.

C. Dasar Kurikulum Pendidikan Islam

Dasar-dasar kurikulum merupakan kekuatan utama yang mempengaruhi dan membentuk materi kurikulum, susunan dan organisasi kurikulum. Herman H. Home memberikan dasar bagi penyusunan kurikulum dengan tiga macam, yakni:

1. Dasar psikologis, yang digunakan untuk memenuhi dan mengetahui kemampuan yang diperoleh dari peserta didik dan kebutuhan peserta didik (*the ability and needs of children*).
2. Dasar sosiologis, yang digunakan untuk mengetahui tuntutan yang sah dari masyarakat (*the legitimate demands of society*).
3. Dasar filosofis, yang digunakan untuk mengetahui keadaan semesta/ tempat kita hidup (*the kind of universe in which we live*) (Muhaimin dan Abdul Mujid, 1993:85).

Sedangkan yang menjadi dasar dalam penyusunan kurikulum pendidikan Islam adalah:

4. Dasar Agama, dalam arti segala sistem yang ada dalam masyarakat termasuk pendidikan, harus meletakkan dasar falsafah, tujuan dan kurikulumnya pada dasar agama Islam (al-Qur'an, Hadits dan sumber-sumber yang bersifat furu' lainnya) dengan segala aspeknya.
5. Dasar Falsafah, yang memberikan pedoman bagi tujuan pendidikan Islam secara filosofis sehingga tujuan, isi dan organisasi kurikulum mengandung suatu kebenaran dan pandangan hidup dalam bentuk nilai-nilai yang diyakini sebagai suatu kebenaran, baik ditinjau dari segi ontologi, epistemologi maupun aksiologi.

6. Dasar Psikologi, memberikan landasan dalam perumusan kurikulum yang sejalan dengan ciri-ciri perkembangan psikis peserta didik, sesuai dengan tahap kematangan dan bakatnya, memperhatikan kecakapan pemikiran dan perbedaan perseorangan antara satu peserta didik dengan lainnya.
7. Dasar Sosial, memberikan gambaran bagi kurikulum pendidikan Islam yang tercermin pada dasar social yang mengandung ciri-ciri masyarakat Islam dan kebudayaannya. Sebab tidak ada suatu masyarakat yang tidak berbudaya dan tidak ada suatu kebudayaan yang tidak berada pada masyarakat. Kaitannya dengan kurikulum pendidikan Islam sudah tentu kurikulum ini harus mengakar terhadap masyarakat dan perubahan dan perkembangan.
8. Dasar Organisatoris, memberikan landasan dalam penyusunan bahan pembelajaran beserta penyajiannya dalam proses pembelajaran beserta penyajiannya dalam proses pembelajaran (Iskandar dan Usman, 1988:49).

D. Prinsip-Prinsip Kurikulum Dalam Islam

Prinsip-prinsip tersebut berbeda-beda menurut analisis para pakar kemudian ditambah dan disesuaikan dengan esensi kurikulum pendidikan Islam (Iskandar dan Usman, 1988:520-522). Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1. Prinsip berasaskan Islam termasuk ajaran dan nilai-nilainya. Maka setiap yang berkaitan dengan kurikulum, termasuk falsafah, tujuan-tujuan, kandungankandungan, metode mengajar, cara-cara perlakuan dan hubungan-hubungan yang berlaku dalam lembaga-lembaga

pendidikan harus berdasarkan pada agama dan akhlak Islam.

2. Prinsip mengarah kepada tujuan adalah seluruh aktifitas dalam kurikulum diarahkan untuk mencapai tujuan yang dirumuskan sebelumnya.
3. Prinsip (integritas) antara mata pelajaran, pengalaman-pengalaman dan aktifitas yang terkandung di dalam kurikulum, begitu pula dengan pertautan antara kandungan kurikulum dengan kebutuhan peserta didik juga kebutuhan masyarakat.
4. Prinsip relevansi adalah adanya kesesuaian pendidikan dengan lingkungan hidup peserta didik, relevansi dengan kehidupan masa sekarang dan akan datang, relevansi dengan tuntutan pekerjaan.
5. Prinsip fleksibilitas adalah terdapat ruang gerak yang memberikan sedikit kebebasan dalam bertindak, baik yang berorientasi pada fleksibilitas pemilihan program pendidikan maupun dalam mengembangkan program pengajaran.
6. Prinsip integritas adalah kurikulum tersebut dapat menghasilkan manusia seutuhnya, manusia yang mampu mengintegrasikan antara fakultas dzikir dan fakultas pikir, serta manusia yang dapat menyelaraskan struktur kehidupan dunia dan struktur kehidupan akhirat.
7. Prinsip efisiensi adalah agar kurikulum dapat mendayagunakan waktu, tenaga, dana, dan sumber lain secara cermat, tepat, memadai dan dapat memenuhi harapan.

8. Prinsip kontinuitas dan kemitraan adalah bagaimana susunan kurikulum yang terdiri dari bagian yang berkelanjutan dengan kaitan-kaitan kurikulum lainnya, baik secara vertikal (penjenjangan, tahapan) maupun secara horizontal.
9. Prinsip individualitas adalah bagaimana kurikulum memperhatikan perbedaan pembawaan dan lingkungan anak pada umumnya yang meliputi seluruh aspek pribadi peserta didik, seperti perbedaan jasmani, watak, intelegensi, bakat serta kelebihan dan kekurangannya.
10. Prinsip kesamaan memperoleh kesempatan, dan demokratis adalah bagaimana kurikulum dapat memberdayakan semua peserta didik dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap sangat diutamakan. Seluruh peserta didik dari berbagai kelompok seperti kelompok yang kurang beruntung secara ekonomi dan sosial yang memerlukan bantuan khusus, berbakat dan unggul berhak menerima pendidikan yang tepat sesuai dengan kemampuan dan kecepataannya.
11. Prinsip kedinamisan adalah agar kurikulum itu tidak statis, tetapi dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan sosial.
12. Prinsip keseimbangan adalah bagaimana kurikulum dapat mengembangkan sikap potensi peserta didik secara harmonis. m. Prinsip efektifitas adalah agar kurikulum dapat menunjang efektifitas pendidik yang mengajar dan peserta didik yang belajar.

BAB II

PERAN GURU DALAM PENGEMBANGAN KURIKULUM PAI

A. Pengembangan Kurikulum PAI

Secara substantif, kurikulum adalah semua kegiatan dan pengalaman yang dikembangkan dan disusun untuk mencapai tujuan pendidikan (Arifin, 2011:88). Isi kurikulum bukan hanya terdiri atas sekumpulan pengetahuan atau kumpulan informasi, tetapi harus merupakan kesatuan pengetahuan terpilih dan dibutuhkan bagi pengetahuan, baik bagi pengetahuan itu sendiri, siswa maupun lingkungannya (Sukmadinata, 1997:127).

Terdapat dua hal yang harus diperhatikan ketika mengkaji isi kurikulum. Pertama adalah isi kurikulum yang didefinisikan sebagai bahan atau materi pembelajaran. Bahan itu tidak hanya berisikan informasi faktual, tetapi juga mencakup pengetahuan, keterampilan, konsep-konsep, sikap dan nilai. Kedua, dalam proses pembelajaran, dua elemen kurikulum, yaitu isi dan metode, berinteraksi secara konstan. Isi memberikan signifikansi jika ditransmisikan kepada siswa dalam beberapa hal dan cara. Itulah yang disebut metode atau pengalaman belajar mengajar.

Hubungan antara isi dan metode sangat dekat, tetapi keduanya dipisahkan menjadi elemen-elemen kurikulum, masing-masing dapat dinilai dengan kriteria berbeda. Baik isi maupun metode harus signifikan sehingga hasil dari belajar

efektif bisa diraih dengan baik (Abdullah, 2011:211-212).
Persoalan isi atau bahan meliputi berbagai hal, seperti:

1. Pentingnya mata pelajaran, secara rasional, isi telah diseleksi dalam bentuk mata pelajaran.
2. Pentingnya proses, saat diseleksi, isi mampu mempertimbangkan pentingnya mata pelajaran dan bisa mencapai keseimbangan diantara keduanya, bahkan berbagai mata pelajaran membentuk tidak hanya isi yang unik, tetapi juga cara-cara berpikir.
3. Bahan mengajar, pengembang kurikulum memiliki sumber-sumber untuk bahan yang akan diseleksi dan telah mengalami beberapa peningkatan yang cepat.
4. Kebutuhan penyeleksian secara rasional, mengaplikasikan kriteria yang rasional dalam menentukan isi pengajaran kedalam suatu kurikulum merupakan sebuah kebutuhan.
5. Keberadaan pengetahuan siswa, saat menyeleksi isi pengajaran, isi bagi siswa telah diketahui sebagai pertumbuhan yang utama (Abdullah, 2011:212-213).

Dalam hal ini, setiap kriteria diaplikasikan kedalam semua isi yang diajarkan. Tidak terdapat kriteria yang dapat berdiri sendiri dan kriteria-kriteria itu dimaksudkan sebagai petunjuk untuk menyeleksi isi atau bahan kurikulum. Kriteria tersebut adalah:

1. Validitas, yaitu isi yang autentik, mutakhir dan memuaskan dimasukkan, sedangkan yang tidak sesuai kriteria, dihilangkan
2. Signifikansi, yaitu fundamen mata pelajaran dan mencakup berbagai ragam tujuan

3. Minat, berarti prinsip belajar dan motivasi menganjurkan bahwa isi harus disesuaikan dengan minat siswa sehingga proses belajarpun menjadi lebih produktif, jika tanpa minat, maka disana tidak akan terjadi proses belajar, maka guru harus mampu memilih isi yang bisa mengakomodasi minat siswa
4. Kemampuan belajar, maka isi yang dipelajari harus dapat diadaptasi untuk dicocokkan dengan kemampuan siswa
5. Konsistensi dengan realitas sosial dan bisa memberikan orientasi yang paling berguna dunia di sekeliling siswa, relevan dengan kenyataan sosial agar siswa lebih mampu memahami fenomena dunia atau perubahan yang terjadi
6. Manfaat, berarti isi yang paling berguna bagi siswa dalam menyelesaikan kondisi mereka sekarang dan dimasa yang akan datang, harus diseleksi melalui mata pejaran disekolah, bermanfaat bagi siswa, masyarakat ataupun dunia kerja
7. Keseimbangan antara keluasan dan kedalaman
8. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai
9. Sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Muhaimin, 2005:217-222).

Secara umum, isi kurikulum itu dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu:

1. Logika, yaitu pengetahuan tentang benar-salah dan berdasarkan prosedur keilmuan
2. Etika, yaitu pengetahuan tentang baik-buruk, nilai dan moral
3. Estetika, yaitu pengetahuan tentang indah-jelek, yang ada nilai seni (Arifin, 2011:88).

Berdasarkan pengelompokan isi kurikulum tersebut, maka pengembangan isi kurikulum harus disusun berdasarkan kandungan bahan kajian atau topik yang dapat dipelajari siswa dalam proses pembelajaran dan berorientasi kepada standar kompetensi lulusan, standar kompetensi mata pelajaran dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan (Arifin, 2011:89).

Disamping prinsip-prinsip itu, pengembang kurikulum hendaknya memperhatikan aspek-aspek yang ada dalam isi kurikulum, yaitu:

1. Teori, yaitu seperangkat konstruk atau konsep, definisi atau preposisi yang saling berhubungan
2. Konsep, yaitu suatu abstrak yang dibentuk oleh organisasi definisi singkat dari sekelompok fakta atau gejala yang perlu diamati
3. Generalisasi, yaitu kesimpulan umum berdasarkan hal-hal yang khusus, bersumber dari hasil analisis, pendapat atau pembuktian dalam penelitian
4. Prinsip, yaitu ide utama, pola skema yang ada dalam materi yang mengembangkan hubungan antara beberapa konsep
5. Prosedur, yaitu serangkaian langkah yang berurutan yang ada dalam materi pelajaran dan harus dilakukan oleh siswa
6. Fakta, yaitu sejumlah informasi khusus dalam materi yang dipandang mempunyai kedudukan penting
7. Istilah, yaitu kata-kata perbendaharaan yang baru dan khusus, yang diperkenalkan dalam materi
8. Contoh, yaitu ilustrasi, sesuatu hal atau tindakan atau proses yang bertujuan untuk memperjelas, sehingga

- uraian atau pendapat dapat lebih mudah dimengerti oleh pihak lain
9. Definisi, yaitu penjelasan tentang makna atau pengertian tentang suatu hal
 10. Preposisi, yaitu suatu pernyataan atau pendapat yang tidak perlu diberi argumentasi.

B. Peran Guru Dalam Pengembangan Kurikulum PAI

Dengan mengacu kepada uraian Murray Print, sebagaimana dikutip Wina Sanjaya, dalam konteks hubungan guru dan kurikulum, pengembangan kurikulum menjadi tugas penting yang harus dilaksanakan oleh semua pengembang kurikulum, termasuk guru, di setiap tingkat pendidikan.

Setidaknya terdapat empat peran yang harus dilaksanakan oleh guru PAI dalam mengembangkan kurikulum, yaitu sebagai *implementer* (pelaksana), sebagai *developer* (pengembang), sebagai *adapter* (penyelaras) dan sebagai *researcher* (peneliti) (Sanjaya, 2009:27).

Sebagai *implementer* kurikulum, guru diharapkan berperan untuk melaksanakan kurikulum yang telah disusun, yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP yang telah dirancang secara terpusat dalam bentuk Garis-Garis Besar Program Pengajaran atau GBPP. Kurikulum ini harus diaplikasikan oleh guru dalam setiap proses pembelajaran di sekolah, khususnya di kelas.

Dengan demikian, ruang peran guru sebagai *implementer* kurikulum tidak sampai kepada penentuan isi dan target kurikulum, tetapi hanya terbatas pada penentuan kegiatan-kegiatan pembelajaran, mulai dari perencanaannya sampai kepada pelaksanaannya. Dalam peran ini, kedudukan guru

adalah sebagai tenaga teknis yang hanya bertanggung jawab dalam mengimplementasikan berbagai ketentuan yang ada (Sanjaya, 2009:28).

Peran guru dalam posisi ini adalah melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran, menerapkan model pembelajaran yang sesuai dengan materi pelajaran dan lingkungan sekolah, memanfaatkan media pembelajaran yang sesuai dengan materi dan kondisi sekolah, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, mengembangkan interaksi pembelajaran (strategi, metode dan teknik yang tepat), mengelola kelas dengan baik dan sesuai dengan alokasi waktu yang tersedia, merefleksikan pelaksanaan proses pembelajaran yang dilakukan, berkonsultasi dengan kepala madrasah atau pengawas untuk mengatasi kendala yang dihadapi dan membantu kesulitan siswa dalam proses belajar.

Proses implementasi kurikulum untuk semua mata pelajaran, khususnya PAI, selalu menggambarkan keterkaitan proses dengan tujuan dan isi, kejelasan teori belajar, keterkaitan dengan sosial, budaya, teknologi, ketersediaan fasilitas, alokasi waktu, fleksibilitas, peran guru dan siswa, peran evaluasi dan perlunya feedback.

Sebagai *developer* kurikulum, guru diberi kewenangan untuk mendesain kurikulum madrasah. Peran pengembangan kurikulum ini terkait erat dengan karakteristik, visi dan misi sekolah atau madrasah serta pengalaman belajar yang dibutuhkan siswa. Pelaksanaan peran ini dapat dilihat dalam pembuatan dokumen kurikulum, pengembangan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dan muatan lokal atau mulok sebagai bagian dari struktur KTSP.

Penyusunan dan pengembangan kurikulum mulok sepenuhnya diserahkan kepada tiap-tiap satuan pendidikan. Kurikulum ini dikembangkan sesuai dengan kebutuhan tiap-tiap sekolah sesuai dengan character distingtif-nya. Mengingat setiap sekolah memiliki kurikulum mulok tersendiri, maka ada kemungkinan terjadi perbedaan kurikulum mulok antar sekolah atau madrasah.

Dalam kaitan posisi guru sebagai developer kurikulum, maka guru dituntut aktif, kreatif dan komitmen tinggi dalam penyusunan dokumen kurikulum PAI, seperti mengikuti *in house training* tentang konsep dasar dan pengembangan kurikulum, berperan aktif dalam tim perekayasa dan pengembang kurikulum sesuai dengan kelompok mata pelajaran, berperan aktif dalam penyusunan standar isi dan standar kompetensi lulusan atau SKL, berperan aktif dalam menyusun Standar Kompetensi atau SK dan kompetensi dasar atau KD serta pemetaannya, mengembangkan silabus pembelajarandan menyusun semua perangkat operasional yang mendukung RPP, seperti Lembar Kerja Siswa atau dan bahan ajar, seperti modul pembelajaran.

Sebagai *adapter* kurikulum, guru memiliki kewenangan untuk menyesuaikan kurikulum dengan karakteristik sekolah dan kebutuhan lokal, terutama kebutuhan siswa dan daerah. Dalam fase ini, tugas pertama seorang guru adalah memahami dengan baik karakteristik sekolahnya, lalu mengakomodir kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan daerahnya, baru membuat desain kurikulum sekolah sesuai kebutuhan sekolah dan masyarakat lokal.

Untuk memahami karakteristik dan kebutuhan masyarakat di sekitar madrasah atau sekolah, dimulai dari mengidentifikasi

keadaan dan kebutuhan masyarakat terhadap madrasah atau sekolah, kegiatan ini dilakukan untuk menelaah dan mendata berbagai keadaan dan kebutuhan sekitar madrasah yang bersangkutan, data tersebut dapat diperoleh dari berbagai pihak yang terkait di daerah sekitar madrasah yang bersangkutan, seperti masyarakat sekitar madrasah, pemerintah daerah, instansi vertikal terkait, perguruan tinggi, dunia usaha dan potensi daerah yang bersangkutan yang meliputi aspek sosial, ekonomi, budaya dan kekayaan alam.

Keadaan daerah seperti telah disebutkan dapat diketahui antara lain dari (a) rencana pembangunan daerah bersangkutan termasuk prioritas pembangunan daerah, baik jangka pendek maupun jangka panjang (b) pengembangan ketenagakerjaan, termasuk jenis kemampuan dan keterampilan yang diperlukan (c) aspirasi masyarakat mengenai pelestarian alam dan pengembangan daerahnya (d) menentukan fungsi dan susunan atau komponen muatan yang sesuai dengan kebutuhan madrasah dan masyarakat sekitar (Tim MEDP, 2008:20).

Berdasarkan kajian dari beberapa sumber seperti di atas, dapat diperoleh berbagai jenis kebutuhan. Berbagai jenis kebutuhan ini dapat mencerminkan fungsi muatan kurikulum lembaga, antara lain untuk (a) melestarikan dan mengembangkan kajian kitab kuning (b) meningkatkan 'amaliyah salafiyah (c) meningkatkan kemampuan berwirausaha (d) berdasarkan fungsi muatan dan kebutuhan lembaga tersebut dapat ditentukan kajian kebutuhan lokal.

Kegiatan ini pada dasarnya untuk mendata dan mengkaji berbagai kemungkinan muatan lokal yang dapat diangkat sebagai bahan kajian sesuai dengan dengan keadaan dan

kebutuhan madrasah. Penentuan bahan kajian kebutuhan lokal didasarkan pada kriteria (a) kesesuaian dengan tingkat perkembangan siswa (b) kemampuan guru dan ketersediaan tenaga pendidik yang diperlukan (c) ketersediaan sarana dan prasarana (d) tidak menimbulkan kerawanan sosial dan keamanan (e) kelayakan berkaitan dengan pelaksanaan di madrasah (f) menentukan mata pelajaran yang sesuai dengan kebutuhan madrasah dan masyarakat (g) mengembangkan SK, KD dan silabus.

Sebagai *researcher* kurikulum, guru memiliki peran sebagai peneliti kurikulum atau *curriculum researcher*. Peran ini dilaksanakan sebagai bagian dari tugas profesional guru yang memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kinerja sebagai guru.

Dalam melaksanakan peran sebagai peneliti, guru memiliki tanggung jawab untuk menguji berbagai komponen kurikulum, misalnya menguji bahan-bahan kurikulum, menguji efektivitas program, menguji strategi atau model pembelajaran dan lain sebagainya, termasuk mengumpulkan data tentang keberhasilan siswa dalam mencapai target kurikulum.

Metode yang digunakan oleh guru dalam meneliti kurikulum adalah penelitian tindakan kelas (PTK) dan *lesson study*. PTK adalah metode penelitian yang berangkat dari masalah yang dihadapi guru dalam implementasi kurikulum. Melalui PTK, guru berinisiatif melakukan penelitian sekaligus melaksanakan tindakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi.

Dengan demikian, PTK bukan saja dapat menambah wawasan guru dalam melaksanakan tugas profesionalnya,

akan tetapi secara terus-menerus guru dapat meningkatkan kualitas kinerjanya. Sedangkan *lesson study* adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok guru yang bekerja sama dengan orang lain, baik dosen, guru mata pelajaran yang sama atau guru satu tingkat kelas yang sama atau guru lainnya, dalam merancang kegiatan untuk meningkatkan mutu belajar siswa dari pembelajaran yang dilakukan oleh salah seorang guru dari perencanaan pembelajaran yang dirancang bersama atau sendiri, kemudian diobservasi oleh teman guru yang lain dan setelah itu mereka melakukan refleksi bersama atas hasil pengamatan yang baru saja dilakukan.

Dunia pendidikan di Indonesia sudah mengalami beberapa perubahan kurikulum. Hal ini bukan berarti ganti menteri pendidikan ganti kurikulum, seperti pendapat sebagian guru, melainkan kurikulum harus selalu berubah sesuai dengan tuntutan jaman. Sekolah dan komite sekolah mengembangkan KTSP dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi, dibawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan setempat.

Otonomi sekolah memotivasi guru untuk mengubah paradigma sebagai *curriculum user* menjadi *curriculum developer*, sehingga guru mampu keluar dari kultur kerja konvensional menjadi kultur kerja kontemporer yang dinamis dan guru mampu memainkan peran sebagai *agent of change* dan guru mengajar siswa sesuai dengan jamannya.

Pada era globalisasi seperti ini, madrasah dengan melibatkan guru, harus melakukan reformasi dan inovasi dalam proses belajar mengajar dan kurikulum secara terus menerus. Untuk dapat melakukan reformasi dan inovasi

pendidikan, diperlukan dukungan empirik yang dihasilkan melalui kegiatan penelitian.

Jika tidak, guru akan terisolasi dari pengetahuan dan informasi mutakhir. Tanpa ada dukungan penelitian, proses pendidikan akan stagnan dan reformasi serta inovasi mustahil dapat dilakukan. Hasil penelitian dapat membantu guru untuk mengambil keputusan yang tepat dan akurat untuk kepentingan proses belajar mengajar dan pembenahan kurikulum. Jika keputusan tersebut dibantu dengan hasil penelitian, proses belajar mengajar dan kurikulum dapat dicapai dengan optimal dan efektif.

Pembelajaran yang efektif merupakan hal yang kompleks dan rumit untuk dapat dikonsepsikan dan dibentuk paradigmanya secara tunggal dan universal (Suyanto, 2000:17). Siswa adalah insan manusia yang unik. Mereka tidak dapat diperlakukan seperti benda mati yang dapat dikendalikan semuanya oleh semua pihak. Mereka memiliki minat, bakat, keinginan, motivasi dan latar belakang sosial ekonomi yang berbeda.

Perbedaan ini membuat kesulitan dalam merumuskan proses belajar dan mengajar serta penyusunan kurikulum yang ideal. Tanpa dukungan hasil penelitian, guru dapat terjebak pada praktik pembelajaran dan perumusan kurikulum yang menyesatkan dan menjerumuskan siswa dan mematikan kreativitas mereka. Tanpa dukungan penelitian, guru bisa jadi menggunakan cara pembelajaran dan mengajarkan hal yang sama dari tahun ke tahun.

Sementara itu, jaman siswa dibesarkan telah berubah amat cepat, sehingga pada gilirannya akan berpengaruh pada sikap dan reaksi terhadap berbagai tuntutan jaman. Di sini

peran vital guru PAI untuk selalu terus haus sebagai peneliti kurikulum yang mampu memahami kondisi jaman.

C. Peran Guru Dalam Pengembangan Kurikulum Perspektif Pengelolaan

Berdasarkan perspektif segi pengelolaan, pengembangan kurikulum dapat dibedakan antara yang bersifat sentralisasi dan desentralisasi (Sukmadinata, 1997:198). Untuk mengkompromikan antara keduanya, akan dipaparkan peranan guru dalam pengembangan kurikulum yang bersifat sentral-sentral. Dalam membedakan antara pengembangan kurikulum yang bersifat sentral maupun desentral, maka harus dipahami bahwa hal-hal tersebut telah diatur dalam berbagai kebijakan yang telah diatur pemerintah, seperti batasan-batasan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, dalam Bab II pasal 2 terdapat 8 hal yang harus dilaksanakan oleh lembaga pendidikan di tingkatan daerah.

Adapun lingkup standar Nasional Pendidikan tersebut meliputi Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan atau Manajemen, Standar Pembiayaan dan Standar Penilaian Pendidikan. Dalam peran guru dalam pengembangan kurikulum yang bersifat sentralisasi, menurut Nana S. Sukmadinata, guru tidak memiliki peran dalam perancangan dan evaluasi kurikulum yang bersifat makro, karena telah disusun oleh tim atau komisi khusus, yang terdiri atas para ahli.

Guru menyusun kurikulum dalam bidangnya untuk jangka waktu satu tahun, satu semester, satu catur wulan, beberapa

minggu atau beberapa teori saja. Hal ini juga disebut dengan satuan pelajaran. Program tahunan, semesteran, satu catur wulan ataupun satuan pelajaran, metode atau media pembelajaran dan evaluasi, hanya keluasaan dan kedalamannya berbeda-beda.

Dengan adanya penjelasan di atas, jelas menjadi tugas guru menyusun dan memutuskan tujuan yang tepat, memilih dan menyusun tahap pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan, minat dan tahap perkembangan siswa memiliki metode dan media mengajar yang bervariasi serta menyusun program dan alat evaluasi yang tepat. Suatu kurikulum yang tersusun secara sistematis akan memudahkan dalam implementasiannya.

Implementasi kurikulum hampir seluruhnya tergantung kepada kreativitas, kecakapan, kesungguhan dan ketekunan seorang guru (Sukmadinata, 1997:199). Sedangkan peran guru dalam pengembangan kurikulum yang bersifat desentralisasi, kurikulum disusun oleh sekolah ataupun kelompok sekolah tertentu dalam suatu wilayah atau daerah. Pengembangan kurikulum semacam ini didasarkan atas karakteristik, kebutuhan, perkembangan daerah dan kemampuan sekolah-sekolah tersebut.

Kurikulum desentralisasi memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya meliputi (a) kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat (b) kurikulum sesuai dengan tingkat dan kemampuan sekolah baik kemampuan profesional, finansial maupun manajerial (c) kurikulum disusun oleh guru-guru sendiri, dengan demikian sangat memudahkan dalam pelaksanaannya (d) ada motivasi kepada sekolah, baik kepala sekolah ataupun guru, untuk

mengembangkan diri, mencari dan menciptakan kurikulum yang sebaik-baiknya, dengan demikian akan terjadi semacam kompetisi dalam pengembangan kurikulum.

Sedangkan beberapa kelemahannya seperti (a) tidak adanya keseragaman, untuk situasi yang membutuhkan keseragaman demi persatuan nasional, bentuk ini kurang tepat (b) tidak adanya standar penilaian yang sama (c) adanya kesulitan jika terjadi mutasi siswa antar sekolah (d) sulit untuk mengelola dan penilaian secara nasional (e) belum semua sekolah memiliki kesiapan untuk menyusun dan mengembangkan kurikulum sendiri.

Untuk mengatasi kelemahan itu, digagas adanya peran guru dalam pengembangan kurikulum yang bersifat sentral-desentral. Bentuk campuran antara keduanya ini dapat digunakan dalam kurikulum yang dikelola secara sentralisasi-desentralisasi memiliki batasbatas tertentu juga, peran guru dalam pengembangan kurikulum lebih besar dibandingkan dengan yang dikelola secara sentralisasi.

Guru-guru turut berpartisipasi, bukan hanya dalam penjabaran kurikulum induk ke dalam program tahunan, semester atau rencana pembelajaran, tetapi juga di dalam menyusun kurikulum yang menyeluruh untuk sekolahnya. Guru-guru turut memberikan andil dalam merumuskan setiap komponen dan unsur dari kurikulum. Dalam kegiatan yang seperti itu, mereka memiliki perasaan turut memiliki kurikulum dan terdorong untuk mengembangkan pengetahuan dan kemampuan dirinya dalam pengembangan kurikulum.

Oleh karena itu, guru sejak awal penyusunan kurikulum telah diikut sertakan, mereka memahami dan benar-benar

menguasai kurikulumnya, dengan demikian pelaksanaan kurikulum di dalam kelas akan lebih tepat dan lancar. Guru bukan hanya berperan sebagai pengguna, tetapi perencana, pemikir, penyusun, pengembang dan juga pelaksana dan evaluator kurikulum.

Dalam konteks pengembangan kurikulum PAI, merupakan tuntutan peran yang harus dilaksanakan guru adalah untuk menumbuhkan nilai-nilai *Ilahiyyah* yang selaras dengan relegiusitas Islam terhadap mental siswa. Nilai *Ilahiyyah* tersebut berkaitan dengan konsep tentang ke-Tuhanan dan segala sesuatuyang bersumber dari Tuhan. Nilai *Ilahiyyah* berkaitan dengan nilai keimanan, *'ubudiyyah* dan *mu'amalah*, dalam hal ini guru harus berusaha sekuat mungkin untuk mengembangkan diri siswa terhadap nilai-nilai tersebut.

Peran guru dalam penumbuhan nilai-nilai *Ilahiyyah* akan lebih meningkat jika disertai dengan berbagai perubahan, penghayatan dan penerapan strategi dengan perkembangan jiwa guru yang disesuaikan dengan jiwa siswa. Sehingga dipahami bersama bahwa guru PAI harus melakukan berbagai upaya dalam pengembangan kurikulum PAI dengan berbagai cara yang bersifat adaptif, adaptif, kreatif dan inovatif.

BAB III

PERAN KEPALA SEKOLAH/MADRASAH DALAM PENGEMBANGAN KURIKULUM PAI

A. Syarat Kepala Sekolah/Madrasah

Sebagaimana dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 6 tahun 2018, bahwa Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi taman kanak-kanak (TK), taman kanak-kanak luar biasa (TKLB), sekolah dasar (SD), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), sekolah menengah atas luar biasa (SMALB), atau Sekolah Indonesia di Luar Negeri. (Permendikbud, 2018)

Sedangkan Guru dapat menjadi bakal calon Kepala Sekolah apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:(Permendikbud, 2018)

1. Memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi paling rendah B;
2. Memiliki sertifikat pendidik;
3. Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil memiliki pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/c;
4. Pengalaman mengajar paling singkat 6 (enam) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah masing-masing,

kecuali di TK/TKLB memiliki pengalaman mengajar paling singkat 3 (tiga) tahun di TK/TKLB;

5. Memiliki hasil penilaian prestasi kerja Guru dengan sebutan paling rendah "Baik" selama 2 (dua) tahun terakhir;
6. Memiliki pengalaman manajerial dengan tugas yang relevan dengan fungsi sekolah paling singkat 2 (dua) tahun;
7. Sehat jasmani, rohani, dan bebas NAPZA berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit Pemerintah;
8. Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah menjadi terpidana; dan
10. Berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai Kepala Sekolah.

Dari persyaratan diatas menunjukkan bahwa seorang kepala sekolah dibutuhkan paling tidak yang sudah berpengalaman mengajar di sekolah minimal 6 tahun dan memiliki pengalaman sisi manajerial atau sisi seputar pengelolaan sekolah minimal 2 tahun, sehingga ini sebagai cerminan bahwa dari pengalaman seorang guru yang bisa memahami seluk beluk dalam pengelolaan pembelajaran di kelas maupun pengelolaan kelembagaan, menjadi modal kelak ketika memimpin sebagai kepala sekolah agar bisa memberikan terobosan atau inovasi terhadap perbaikan dan pengembangan pembelajaran serta pengelolaan sekolah.

Berkenaan dengan pembelajaran menjadi garapan utama, karena inti dalam kegiatan pendidikan di sekolah adalah bagaimana kegiatan pembelajaran bisa berjalan efektif dan efisien sesuai dengan visi misi sekolah. Dan ini dibutuhkan sosok kepala sekolah yang memiliki pemikiran yang visioner dalam mengembangkan sekolah yang ia pimpin. Sedangkan berkaitan dengan pembelajaran yang efektif dan efisien tidak lepas dari rancangan kurikulum yang dibuat dan diterapkan di sekolah. Hal ini juga menjadi perhatian penting bagi kepala sekolah bagaimana mencermati kurikulum yang didesain untuk diterapkan di sekolah yang ia pimpin dan ini butuh kejelian dan keseriusan tersendiri agar kurikulum bisa memudahkan bagi guru dalam melaksanakannya bukan malah membuat guru menjadi kesulitan

Hal itu juga berkesinambungan dengan kompetensi-kompetensi yang harus dipenuhi oleh seorang guru yang akan menjadi kepala sekolah, antara lain (Permendikbud, 2018): pengetahuan, sikap dan keterampilan yang melekat pada dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial

Sehingga bisa dicermati bahwasanya seorang kepala sekolah harus memiliki kompetensi yang menjadi keharusan dipenuhi agar dalam menjalankan tugas sebagai kepala sekolah bisa berjalan dengan lancar dan tepat sasaran. Jika dijabarkan kompetensi-kompetensi diatas dengan realita di sekolah sebagaimana berikut:

1. Pengetahuan, kepala sekolah dituntut memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam sehingga bisa menjadi rujukan bagi bawahan dengan memberikan solusi

pemecahan terhadap persoalan keilmuan pengetahuan dalam bidangnya

2. Sikap dan keterampilan yang melekat pada dimensi kompetensi kepribadian. Ini merupakan cerminan sebuah uswah atau panutan bagaimana seorang kepala sekolah secara pribadi memiliki kepribadian yang bisa dilihat dari sisi sikap maupun keterampilan atau perilakunya
3. Sikap dan ketrampilan Sikap dan keterampilan yang melekat pada dimensi kompetensi manajerial. Ini menunjukkan seorang kepala sekolah menguasai sisi teknis pengelolaan sekolah sehingga bisa diterapkan di sekolah
4. Sikap dan keterampilan yang melekat pada dimensi kompetensi supervisi. Kepala sekolah dituntut bisa memberikan arahan atau bimbingan pada bawahan dengan seksama dan penuh ketelatenan
5. Sikap dan keterampilan yang melekat pada dimensi kompetensi sosial. Kepala sekolah sebagai manusia social, diharapkan bisa mencerminkan sikap-sikap social yang baik terhadap semua warga sekolah dan menjadi pengayom bagi semuanya

Ditambahkan pula oleh Ade Cahyana bahwa Kompetensi kompetensi yang harus dimiliki oleh kepala sekolah adalah sebagai berikut (diadaptasi dari *Council of Chief State School Officers/CCSSO, 2002*)(Cahyana, 2008):

1. Memfasilitasi pengembangan, penyebarluasan, dan pelaksanaan visi pembelajaran yang dikomunikasikan dengan baik dan didukung oleh komunitas sekolah.

2. Membantu, membina, dan mempertahankan lingkungan sekolah dan program engajaran yang kondusif bagi proses belajar peserta didik dan pertumbuhan profesional para guru dan karyawan.
3. Menjamin bahwa manajemen organisasi dan pemanfaatan sumber daya sekolah digunakan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, efisien, dan efektif.
4. Bekerja sama dengan wali murid dan anggota masyarakat, memenuhi kepentingan dan kebutuhan komunitas yang beragam, dan memobilisasi sumber daya masyarakat.
5. Memberi contoh (teladan) tindakan yang baik.
6. Memahami, menanggapi, dan memengaruhi lingkungan politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang lebih luas.

B. Kinerja Kepala Sekolah/Madrasah

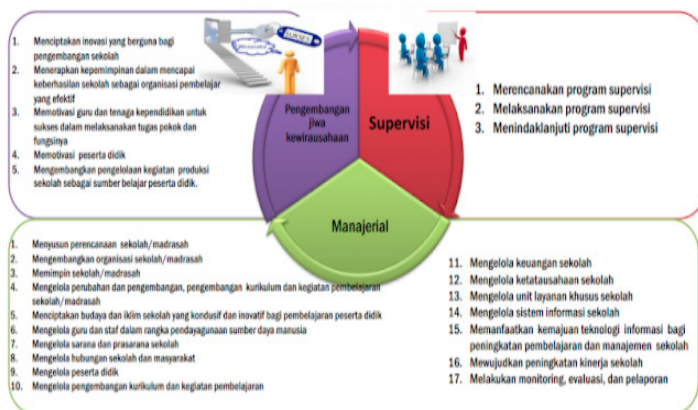
Secara umum kinerja kepala sekolah mencakup 3 hal, sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 6 tahun 2018 pada pasal 15 (1), yang berbunyi "Beban kerja Kepala Sekolah sepenuhnya untuk melaksanakan tugas pokok manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada Guru dan tenaga kependidikan"(Permendikbud, 2018)

Kinerja kepala sekolah itu bisa dikatakan sebuah prestasi atau tidak bisa dilihat dari indikator penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh atasan langsung sesuai dengan kewenangannya meliputi komponen sebagai berikut (Permendikbud, 2018):

1. Hasil pelaksanaan tugas manajerial;
2. Hasil pengembangan kewirausahaan;

3. Hasil pelaksanaan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan;
4. Hasil pelaksanaan pengembangan keprofesian berkelanjutan; dan
5. Tugas tambahan di luar tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).

Secara garis besar kinerja seorang kepala sekolah sebagaimana bagan dibawah ini yang penulis ambil dari blog milik ainul mulyana (Mulyana, 2019)



Tupoksi Kepala Sekolah Sesuai Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018

Dari tabel diatas menggambarkan bahwasanya tugas kepala sekolah dibagi menjadi 3 hal, yakni

1. Manajerial. Berbagai hal yang harus dilakukan oleh kepala sekolah berkenaan dengan manajerial mulai menyusun perencanaan sekoilah hingga melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
2. Supervisi. Ini berkenaan dengan pengawasan yang dilakukan kepala sekolah kepada bawahannya atau semua

- guru dan karyawan, yang berisi perencanaan program, pelaksanaan serta tindak lanjut dari supervise tersebut.
3. Pengembangan jiwa kewirausahaan. Ini merupakan bagian strategi untuk menciptakan kemandirian dalam keberlangsungan kegiatan sekolah melalui kegiatan-kegiatan kewirausahaan, mulai dari penciptaan inovasi pengembangan sekolah hingga pengelolaan kegiatan produksi.

C. Tugas Dan Peran Kepala Sekolah/Madrasah Dalam Pengembangan Kurikulum

Kepala sekolah dalam pelaksanaan tugas ada 6 tugas pokok dan fungsinya yaitu 1) sebagai pendidik (educator); 2) manajer (manager); 3) pengelola administrasi (administrator); 4) penyelia (supervisor); 5) pemimpin (leader); 6) pembaharu (inovator); dan 7) pendorong (motivator). (Muhadzdzibah, 2017). Hal ini menunjukkan tugas kepala sekolah tidaklah mudah karena kepala sekolah harus memiliki berbagai kompetensi dan berpikir visioner akan pengembangan Lembaga Pendidikan yang ia pimpin.

Sedangkan berkenaan tugas dan fungsi kepala sekolah diatas dengan pengembangan Kurikulum, ini menunjukkan bahwa tugas dan peran seorang kepala sekolah/madrasah sangat strategis dan secara garis besar ada dua (Juahab, 2019), yakni:

1. Kepala Sekolah Sebagai Menejer

Menurut Vincent Gaspersz. (2003) Tugas menejer adalah merencanakan, mengorganisasikan, mengatur, mengkoordinasikan dan mengendalikan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajer adalah

orang yang melakukan sesuatu secara benar (*people who do things right*).

Dengan demikian sebagai seorang kepala sekolah terkait pengembangan kurikulum diharapkan memiliki kemampuan yang matang dalam melaksanakan fungsi dari manajemen, yakni *planning, organizing, actuating dan controlling (POAC)*, sehingga dibutuhkan kecermatan dan pemahaman yang mendalam bagi seorang kepala sekolah dalam memahami terlebih dahulu tentang hakikat dan tujuan dari pengembangan kurikulum dan ini menjadi suatu keharusan bagi seorang kepala sebagai pijakan awal untuk melangkah pada tahap selanjutnya.

Selain itu juga kepala sekolah harus bisa mengaitkan arah pengembangan kurikulum dengan visi misi sekolah, sehingga apa yang mencapai target capaian sekolah bisa terlaksana, sehingga dalam hal ini tidak mudah soal mau atau tidak mau dalam pengembangan kurikulum tetapi dibutuhkan juga kemampuan analisis secara mendalam dalam kesesuaian dan kebutuhan sekolah. Hal ini bisa dilakukan dengan menggunakan cara analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats) untuk melihat posisi lembaga yang ia pimpin sejauh mana kemajuannya dan apa yang harus ditingkatkan pada masa yang akan datang melalui pengembangan kurikulumnya.

2. Kepala sekolah sebagai *leader* (pemimpin)

Dalam teori kepemimpinan setidaknya kita mengenal dua gaya kepemimpinan yaitu kepemimpinan yang berorientasi pada tugas dan kepemimpinan yang berorientasi pada manusia. Dalam hal ini kepala sekolah harus benar benar bisa memerankan peran sebagai

seorang leader bagi guru-guru yang ada di lembaga yang ia pimpin, sehingga seorang kepala sekolah harus mampu memberi arahan dan pengawasan terhadap tugas apa saja yang harus dikerjakan oleh seorang guru dan lebih-lebih tugas yang mendukung dalam pengembangan kurikulum yang dilakukan oleh sekolah dan tentunya tetap pada kirodor masih manusiawi, artinya apa yang menjadi tugas guru masih bisa diukur dan dikerjakan oleh guru dan tidak melebihi diluar kapasitas seorang guru

Karena tidak sedikit guru mendapat banyak tugas yang diembannya dari kepala sekolah terlalu *overload* sehingga kinerja guru menjadi berat dan tidak maksimal, seperti guru selain mengajar di kelas diminta pula untuk mengunjungi siswa siswi yang bermasalah ke rumahnya setiap pecan. Dalam hal ini tugas guru menjadi berat jika tidak dibagi oleh berbagai pihak yang bersangkutan, seperti bisa memerankan guru BK, atau guru piket lainnya

Oleh karenanya bagi seorang kepala sekolah dibutuhkan sosok yang memiliki kepribadian yang matang, sebab ini sangat berpengaruh dalam dalam memberikan arahan dan apa yang diperintahkan agar bisa dilaksanakan oleh guru. Sehingga kepribadian kepala sekolah sebagai *leader* menurut Ordway Tead harus menunjukkan sifat-sifat (Juahab, 2019):

- a. Kesadaran akan tujuan dan arah
- b. Antusiasme
- c. Keramahan dan kecintaan
- d. Integritas (keutuhan, kejujuran dan ketulusan hati)
- e. Penguasaan teknis

- f. Ketegasan dalam mengambil keputusan
- g. Kecerdasan
- h. Keterampilan mengajar
- i. Kepercayaan

Sifat-sifat tersebut merupakan modal yang harus dikuasai oleh kepala sekolah karena sangat berpengaruh dalam kelancaran menjalankan tugas dan peran kepala sekolah sebagai seorang leader, sehingga dalam hal ini dibutuhkan usaha keras dari kepala sekolah untuk mencapai itu semuanya.

Dengan demikian sebagai seorang kepala sekolah tugas dan perannya dalam pengembangan kurikulum tidaklah mudah karena dia harus bisa mempraktekkan posisi dia sebagai manajer dan leading dalam menggerakkan seluruh sumber daya manusia dan potensi yang dimiliki oleh sekolah/madrasah yang ia pimpin

BAB IV

LANDASAN PENGEMBANGAN KURIKULUM PAI

Salah satu komponen penting dari sistem pendidikan tersebut adalah kurikulum, karena kurikulum merupakan komponen pendidikan yang dijadikan acuan oleh setiap satuan pendidikan, baik oleh pengelola maupun penyelenggara, khususnya oleh guru dan kepala sekolah. Menurut (Sukmadinata, 2001). Kurikulum mempunyai kedudukan sentral dalam seluruh proses pendidikan. Kurikulum memberikan arahan segala bentuk aktivitas pendidikan demi tercapainya tujuan-tujuan pendidikan. Kurikulum juga merupakan suatu rencana pendidikan memberikan pedoman dan pegangan tentang jenis, lingkup dan urutan isi serta proses pendidikan.

Kurikulum sebagai rancangan pendidikan memiliki kedudukan yang sangat sentral dalam seluruh kegiatan pembelajaran, yang menentukan proses dan hasil belajar. Sedangkan pengembangan kurikulum dilakukan untuk mewujudkan adanya nilai tambah dari yang telah dilakukan sesuai dengan kurikulum potensial yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Oleh karena itu, pemahaman tentang kurikulum bagi para tenaga pendidik mutlak diperlukan.

Pengembangan kurikulum PAI salah satu kegiatannya untuk mendapatkan hasil kurikulum baru melalui terik-terik perencanaan penyusunan kurikulum dari hasil penilaian yang dilaksanakan selama periode tertentu (Baharun, 2017). Pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam

sebagian dari pengembangan, penjabaran, perluasan dan penyempurnaan beberapa materi dasar Pendidikan Agama Islam dan apa saja yang disampaikan kepada peserta didik atau sesuatu upaya yang telah direncanakan oleh sekolah dalam membantu pengembangan potensi peserta didik melalui pengalaman belajar yang potensial untuk mencapai tujuan, visi dan misi serta hasil yang diinginkan oleh lembaga pendidikan.

Berbicara dari aspek yang lain, pengembangan kurikulum perlu juga dilaksanakan melalui proses manajemen pengembangan kurikulum dan proses pelaksanaan, pengorganisasian, perencanaan dan pengevaluasian (Fauzi, 2017a). Oleh karena itu, untuk terwujudnya cita-cita pokok Pendidikan Agama Islam sekiranya harus memiliki prioritas utama dalam Pendidikan Agama Islam yang dijalankan di sekolah, sekarang ini memang cenderung sangat teoritik dan dirasakan tidak ada relevansinya dengan lingkungan yang selama ini peserta didik tinggal. Mengajarkan pendidikan Agama kepada peserta didik berarti membangun fitrah dasar manusia yang secara moral dibawa semenjak lahir. Fitrah dasar diibaratkan seperti balita tidak mendapatkan bimbingan dan perlindungan sejak lahir maka akan menjadi manusia yang sulit bermanfaat dan berguna bahkan bisa jadi menjadi manusia yang serakah dalam hidupnya.

Sesuai dengan pengetahuan dasar mengenai Pendidikan Agama Islam dalam berbagai pertimbangan tentang tujuan serta potensi-potensi yang terkandung didalam diri manusia, paling tidak ada tiga prinsip dalam merancang kurikulum, (Faunzi, 2009).

1. Pengembangan pendekatan religius melalui semua cabang ilmu pengetahuan.
2. Isi dari bahan pelajaran yang bersifat religius seharusnya bebas dari ide dan materi yang bersifat jumud dan hampa.
3. Perencanaan dengan perhitungan setiap komponen yang Taylor disebut sebagai tiga prinsip yaitu kontinuitas, sekuensi dan integrasi (Munzir Hitami, 2004).

Pengembangan kurikulum menurut Sukmadinata dirumuskan berdasarkan dua hal:

1. Perkembangan tuntutan, kebutuhan dan kondisi masyarakat.
2. Didasarkan atas pemikiran-pemikiran dan terarah pada pencapaian nilai-nilai filosofis terutama falsafah Negara dan filosofis ini merupakan persoalan mendasar dalam pengembangan kurikulum (Hanun Asrohah dan Anas Amin Alamsyah, 2011).

Pengembangan atau penjabaran kurikulum tersebut tidak hanya mengacu pada sentralisasi kurikulum tetapi lembaga pendidikan mampu menjabarkan dalam arti mampu menerapkan suatu program *hidden kurikulum*. Untuk menambah program Pendidikan Agama Islam, mengatasi atau mengembangkan kepribadian siswa melewati manajemen kurikulum yang baik supaya menjadi *insan kamil* yang berkehendak selaras dengan nilai-nilai dan norma serta mampu menginternalisasikan dan enam rukun Iman dan lima rukun Islam.

Dalam pengembangan kurikulum, diperlukan landasan-landasan sebagai asas dalam proses pengembangan kurikulum pendidikan. Hal ini harus dijadikan acuan bagi seorang perumus

kurikulum, jika tidak maka hasil kerja pengembangan tidak akan memiliki nilai efektifitas terhadap terwujudnya tujuan pendidikan. Hal diatas dirumuskan dari definisi landasan itu sendiri yang mengandung arti sebagai suatu gagasan atau kepercayaan yang menjadi sandaran, sesuatu prinsip yang mendasari, contohnya seperti landasan kepercayaan Agama, dasar atau titik tolak untuk munculnya ketaatan dalam bentuk lahir yaitu ibadah. Dengan demikian landasan pengembangan kurikulum dapat diartikan sebagai suatu gagasan, suatu asumsi atau prinsip yang menjadi sandaran atau titik tolak dalam melakukan kegiatan mengembangkan kurikulum.

Landasan yang dimaksud adalah: 1. Landasan Filosofis, 2 Psikologis, 3 Sosiologis, 4 Organisatoris.

A. Landasan Filosofis

Pandangan-pandangan filsafat sangat dibutuhkan dalam pendidikan, terutama dalam menentukan arah tujuan pendidikan. Filsafat akan menentukan arah kemana peserta didik akan dibawa, untuk itu harus ada kejelasan tentang pandangan hidup manusia atau tentang hidup dan eksistensinya. Filsafat atau pandangan hidup yang dianut oleh suatu bangsa dan kelompok masyarakat tertentu atau bahkan yang dianut oleh perorangan akan sangat mempengaruhi tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Sedangkan tujuan pendidikan sendiri pada dasarnya merupakan rumusan yang komprehensif mengenai apa yang seharusnya dicapai. Tujuan pendidikan memuat pernyataan-pernyataan mengenai berbagai kemampuan yang diharapkan dapat dimiliki oleh peserta didik selaras dengan sistem nilai dan filsafat yang dianutnya. Dengan demikian, sistem nilai atau filsafat yang

dianut oleh suatu komunitas akan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan rumusan tujuan pendidikan yang dihasilkannya. Dengan kata lain, filsafat suatu negara tidak bisa dipungkiri akan mempengaruhi tujuan pendidikan di negara tersebut.

Oleh karena itu, tujuan pendidikan disuatu negara akan berbeda dengan tujuan pendidikan di negara lainnya, sebagai implikasi dari adanya perbedaan filsafat yang dianutnya. Pengembangan kurikulum membutuhkan filsafat sebagai acuan atau landasan berpikir. Kajian-kajian filosofis tentang kurikulum akan berupaya menjawab permasalahan-permasalahan sekitar:

1. Bagaimana seharusnya tujuan pendidikan itu dirumuskan.
2. Isi atau materi pendidikan bagaimana yang seharusnya disajikan kepada siswa.
3. Metode pendidikan apa yang seharusnya digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan.
4. Bagaimana peranan yang seharusnya dilakukan pendidik dan peserta didik. (Abu Ahmadi, 2001).

Jawaban atas permasalahan tersebut akan sangat bergantung pada landasan filsafat mana yang digunakan sebagai asumsi atau sebagai titik tolak pengembangan kurikulum. Landasan filsafat tersebut beserta konsep-konsepnya yang meliputi konsep metafisika, epistemologi, logika dan aksiologi berimplikasi terhadap konsep-konsep pendidikan yang meliputi rumusan tujuan pendidikan, isi pendidikan, metode pendidikan, peranan pendidik dan peserta didik.

B. Landasan Psikologi

Pendidikan senantiasa berkaitan dengan perilaku manusia. Dalam setiap proses pendidikan terjadi interaksi antara peserta didik dan lingkungannya, baik lingkungan yang bersifat fisik maupun lingkungan sosial. Melalui pendidikan diharapkan adanya perubahan perilaku peserta didik menuju kedewasaan, baik dewasa dari segi fisik, mental, emosional, moral, intelektual maupun sosial. Yang harus diingat bahwa walaupun pendidikan dan pengajaran salah satu lembaga tempat untuk mengubah perilaku manusia, akan tetapi tidak semua perubahan perilaku manusia atau peserta didik mutlak sebagai akibat dari intervensi program pendidikan. Perubahan perilaku peserta didik dipengaruhi oleh faktor kematangan dan faktor dari luar program pendidikan atau lingkungan. Kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan atau program pendidikan, sudah pasti berhubungan dengan proses perubahan perilaku peserta didik. Kurikulum diharapkan dapat menjadi alat untuk mengembangkan kemampuan potensial menjadi kemampuan aktual peserta didik serta kemampuan-kemampuan baru yang dimiliki dalam waktu yang relatif lama.

Minimal terdapat dua bidang psikologi yang mendasari pengembangan kurikulum yaitu:

1. Psikologi perkembangan

Psikologi perkembangan merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu pribadi anak didik berkenaan dengan perkembangannya. Dalam psikologi perkembangan yang dalam term tertentu disamakan dengan ilmu jiwa perkembangan, didalamnya dikaji tentang hakekat perkembangan, pentahapan

perkembangan anak, aspek-aspek perkembangan, tugas-tugas perkembangan individu, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan perkembangan individu. Yang semuanya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan mendasari pengembangan kurikulum. Untuk dijadikan landasan dalam mempertimbangkan bobot belajar pada masing-masing tingkatan dan jenjang serta beban belajar yang mesti diselaraskan dengan tingkatan perkembangan psikologi dan kejiwaan peserta didik. (Nana Sudjana, 1988).

2. Psikologi belajar

Psikologi belajar merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu dalam konteks belajar. Psikologi belajar mengkaji tentang hakekat belajar dan teori-teori belajar, serta berbagai aspek perilaku individu lainnya dalam belajar, yang semuanya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan sekaligus mendasari perkembangan kurikulum.

Psikologi belajar juga dapat diartikan sebagai disiplin psikologi yang berisi teori-teori psikologi mengenai belajar, terutama mengupas bagaimana cara individu belajar atau melakukan pembelajaran. (Djamarah, 2000). Dari pengertian tersebut ada terdapat kata-kata '*change*' maksudnya adalah seseorang yang telah mengalami proses belajar yang mengalami perubahan tingkah laku, baik dalam kebiasaan (*Habit*), kecakapan-kecakapan (*Skills*) atau dalam tiga aspek yaitu pengetahuan (*Kognitif*), sikap (*Affektif*) dan keterampilan (*Psikomotor*).

C. Landasan Sosiologis

Kurikulum dapat dipandang sebagai suatu rancangan pendidikan. Sebagai suatu rancangan, kurikulum menentukan pelaksanaan dan hasil pendidikan. Kita maklumi bahwa pendidikan merupakan usaha mempersiapkan peserta didik untuk terjun ke lingkungan masyarakat. Pendidikan bukan hanya untuk pendidikan semata, namun pendidikan dapat memberikan bekal pengetahuan, keterampilan serta nilai-nilai untuk hidup, bekerja dan mencapai perkembangan lebih lanjut di masyarakat. Peserta didik berasal dari masyarakat, mendapatkan pendidikan baik formal maupun informal dalam lingkungan masyarakat dan diarahkan bagi kehidupan masyarakat pula. Kehidupan masyarakat, dengan segala karakteristik dan kekayaan budayanya menjadi landasan dan sekaligus acuan bagi pendidikan. Dengan pendidikan, kita mengharapkan melalui pendidikan dapat lebih mengerti dan mampu membangun kehidupan masyarakatnya. Oleh karena itu, tujuan, isi, maupun proses pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi, karakteristik, kekayaan dan perkembangan yang ada di masyarakat. Karena di setiap lingkungan masyarakat masing-masing memiliki sistem sosial budaya tersendiri yang mengatur pola kehidupan dan pola hubungan antar anggota masyarakat. Ada dua pertimbangan sosial budaya yang dijadikan landasan dalam pengembangan kurikulum:

1. Setiap orang dalam masyarakat selalu berhadapan dengan masalah anggota masyarakat yang belum dewasa dalam kebudayaan, maksudnya manusia belum mampu menyesuaikan diri dengan cara kelompok di lingkungannya.

2. Kurikulum dalam setiap masyarakat merupakan refleksi dari cara orang berfikir, merasa, bercita-cita atau kebiasaan. Karena itu untuk membina struktur dan fungsi kurikulum perlu memahami kebudayaan. (A. Hamid Syarief, 2002). Karena itu, para pengembangan kurikulum harus:
 - a. Mempelajari dan memahami kebutuhan masyarakat
 - b. Menganalisis budaya masyarakat dimana tempat sekolah berada
 - c. Menganalisis kekuatan serta potensi daerah
 - d. Menganalisis syarat dan tuntutan tenaga kerja
 - e. Menginterpretasi kebutuhan individu dalam kerangka kepentingan masyarakat

Dari penjelasan tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa melalui pendidikan manusia dapat mengenal peradaban masa lalu, turut serta dalam peradaban sekarang dan membuat peradaban masa yang akan datang. Penerapan teori, prinsip, hukum dan konsep-konsep yang terdapat didalam semua ilmu pengetahuan yang ada dalam kurikulum, harus disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, sehingga hasil belajar yang dicapai oleh siswa lebih bermakna dalam hidupnya. Pengembangan kurikulum hendaknya memperhatikan kebutuhan masyarakat dan perkembangan masyarakat. Disinilah tuntutan dalam salah satu dasar pengembangan kurikulum. Tujuh fungsi sosial pendidikan, yaitu : (Ngalim Purwanto, 1995).

1. Mengejar keterampilan
2. Mentransmisikan budaya
3. Mendorong adaptasi lingkungan

4. Membentuk kedisiplinan
5. Mendorong bekerja berkelompok
6. Meningkatkan perilaku etik
7. Memilih bakat dan memberi penghargaan prestasi

Faktor kebudayaan merupakan bagian yang penting dalam pengembangan kurikulum dengan pertimbangan:

1. Individu lahir tidak langsung berbudaya, baik dalam hal kebiasaan, cita-cita, sikap, pengetahuan, keterampilan dan sebagainya. Semua itu dapat diperoleh individu melalui interaksi dengan lingkungan budaya, keluarga, masyarakat sekitar, dan sekolah atau lembaga pendidikan. Oleh karena itu, sekolah atau lembaga pendidikan mempunyai tugas khusus memberikan pengalaman kepada peserta didik dengan salah satu alat yang disebut kurikulum.
2. Kurikulum pada dasarnya harus mengakomodasi aspek-aspek sosial dan budaya. Aspek sosiologis adalah yang berkenaan dengan kondisi sosial masyarakat yang sangat beragam, seperti masyarakat industri, pertanian, nelayan dan sebagainya. Pendidikan disekolah pada dasarnya bertujuan mendidik anggota masyarakat agar dapat hidup berintegrasi, berintraksi dan beradaptasi dengan anggota masyarakat lainnya serta meningkatkan kualitas hidupnya sebagai makhluk berbudaya. Hal ini membawa implikasi bahwa kurikulum sebagai salah satu alat untuk mencapai tujuan pendidikan bermuatkan kebudayaan yang bersifat umum seperti nilai-nilai, sikap-sikap, pengetahuan dan kecakapan.

D. Landasan Organisatoris

Landasan ini berpijak pada teori psikologi asosiasi, yang menganggap keseluruhan adalah jumlah bagian-bagiannya sehingga menjadikan kurikulum sebagai mata pelajaran yang terpisah-pisah. Kemudian disusul teori psikologi Gestalt yang menganggap keseluruhan mempengaruhi organisasi kurikulum yang disusun secara unit tanpa adanya batas-batas antara berbagai mata pelajaran. Ada dua pola organisasi yang harus diperhatikan dalam pengembangan kurikulum, yaitu organisasi horizontal dan vertikal.

Organisasi horizontal adalah pola pengelolaan pengalaman belajar dilihat dari hubungan antara pengalaman belajar satu dengan pengalaman belajar lainnya pada saat atau waktu yang bersamaan (dalam satu waktu, misalnya dalam satu hari, satu semester, satu kelas, dan lain-lain). Bagaimana menetapkan pengalaman belajar yang akan disajikan dalam satu hari atau satu minggu tertentu, agar smooth dipelajari oleh siswa, agar tetap saling mendukung. Dalam mengelola pengalaman belajar secara horizontal ini, yang harus diperhatikan adalah beban belajar yang harus ditanggung oleh siswa dalam rentang waktu tersebut, dan variasi atau kombinasi jenis pengalaman belajar yang harus dipelajari (*scope*). Artinya dalam organisasi horizontal ini, perlu dipertimbangkan kemampuan siswa dalam mempelajari sesuatu dalam rentang waktu yang tersedia. Berapa banyak pengalaman belajar yang bisa dipelajari siswa dalam waktu satu hari atau satu minggu. Biasanya beban belajar ini dikaitkan dengan SKS atau jumlah mata pelajaran.

Organisasi vertikal adalah pola pengelolaan berbagai pengalaman belajar dilihat dari aspek waktu atau jenjang.

Dalam organisasi vertikal harus diperhatikan bagaimana hubungan dan/atau urutan pengalaman belajar pada semester satu dengan semester dua; bagaimana hubungan antara pengalaman belajar untuk kelas 1 dengan kelas 2, kelas 3, dan sebagainya, bagaimana pengalaman belajar yang disajikan untuk siswa SD dengan untuk siswa SMP dan demikian juga dengan pengalaman belajar untuk siswa SMP dengan untuk siswa SMA. Dengan kata lain, organisasi vertikal bicara tentang urutan (*sequence*) penyajian pengalaman belajar yang akan dipelajari para siswa.

Macam-macam desain kurikulum secara umum desain kurikulum yang paling populer digunakan sebagai berikut:

1. **Desain Kurikulum Berpusat pada Mata Pelajaran (*The Subject-Centered Curriculum*)**

Sesuai dengan namanya, desain kurikulum ini fokus pada mata pelajaran yang akan diajarkan kepada siswa. Kurikulum ini berisi kumpulan mata pelajaran yang harus dipelajari siswa selama rentang waktu tertentu sesuai dengan jenjang pendidikannya. Biasanya desain kurikulum ini tidak memiliki tujuan secara eksplisit yang menuntut siswa menguasai kompetensi tertentu. Tujuan kurikulum ini bersifat implisit yang menunjukkan pada tuntutan agar siswa mempelajari dan menguasai materi pelajaran atau pengalaman belajar yang sudah tersusun ke dalam sejumlah mata pelajaran.

2. **Desain Kurikulum Bidang Studi (*Broad-fields Curriculum*)**

Desain kurikulum ini mengelompokkan sejumlah mata pelajaran yang memiliki fokus kajian yang sama menjadi

satu bidang kajian atau bidang studi. Mata pelajaran sejarah, ekonomi, sosiologi, antropologi adalah diantara mata pelajaran yang mempelajari masalah-masalah sosial. Oleh karena itu mata pelajaran-mata pelajaran tersebut dikelompokkan ke dalam satu bidang kajian atau bidang studi yang disebut dengan ilmu sosial (*Social Sciences*). Dalam kurikulum SD selama ini disebut dengan bidang studi Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Demikian juga dengan mata pelajaran ilmu hayat atau biologi, fisika, kimia, bumi dan antariksa, karena mata pelajaran-mata pelajaran tersebut mengkaji masalah-masalah alam, maka dikelompokkan menjadi bidang studi Ilmu Pengetahuan Alam (*Natural Sciences*).

3. **Desain Kurikulum Terpadu (*Integrated Curriculum*)**

Desain kurikulum ini melebur (fusi) semua mata pelajaran menjadi satu dengan menghilangkan batas dan ciri mata pelajaran masing-masing. Pengamalaman belajar atau materi yang disajikan dalam kurikulum ini tidak merujuk pada salah satu mata pelajaran atau bidang studi, tetapi merujuk pada satu tema tertentu. Daftar kajian yang akan dipelajari oleh siswa berisi topik-topik atau tema-tema yang bisa dibahas dari berbagai disiplin ilmu. Dengan demikian dalam kurikulum yang didesain dalam bentuk *integrated curriculum* tidak ada lagi nama mata pelajaran atau bidang studi, yang ada adalah tema.

Dalam perkembangan kurikulum di Indonesia, kurikulum sekolah yang secara konsisten menggunakan desain kurikulum terintegrasi sejak Tahun 1975 adalah kurikulum TK. Dalam kurikulum TK tidak akan ditemukan nama mata pelajaran atau bidang studi. Di dalamnya

hanya ada sederetan tema dan sub-tema yang disusun secara gradul mulai dari tema yang terdekat dengan diri anak sampai ke tema yang terjauh dengan mereka. Diantara tema-tema yang menjadi bahasan anak-anak di TK adalah tema Diriku, Keluargaku, Lingkunganku, Binatang, Kendaraan, Tanaman, dst. Implementasi dari kurikulum ini adalah pada saat membahas suatu tema akan dilihat dari berbagai sudut pandang (perspektif), seperti dari sudut pandang kemampuan berbahasa, lingkungan dan kesehatan.

BAB V

PERKEMBANGAN KURIKULUM MADRASAH DI INDONESIA

Wacana kajian perkembangan kurikulum Pendidikan Islam yang didalamnya juga memuat madrasah sebagai bagian dari lembaga pendidikan islam sejalan dengan pertumbuhan system pendidikan islam itu sendiri yang pada perkembangannya dibatasi pada dua fase yaitu fase pra kemerdekaan (1900–1945) serta fase pasca kemerdekaan (1945) hingga saat ini. Menurut Muhaimin menerangkan yang mendasari pembagian fase diatas adalah analisa terhadap pengembangan pendidikan Islam pada fase pra kemerdekaan diperuntukan sebagai upaya mengimbangi pendidikan Kolonial, sebaliknya pada fase pasca kemerdekaan ditunjukan sebagai langkah memadukan Pendidikan Agama Islam ke dalam sistem Pendidikan Nasional.(Muhaimin, 2003, p. 69) Berikut ini kami jelaskan uraian perkembangan kurikulum Madrasah di Indonesia.

A. Kurikulum Pendidikan Agama Sebelum Kemerdekaan

Pendidikan Agama Islam mengalami sebuah fase perjalanan yang begitu panjang hingga sampai pada fase saat ini dimana Pendidikan Islam terintegrasi kedalam system pendidikan Nasional. Sistem pembelajaran sejak zaman pra Islam, khususnya pada era berkembangnya Hindu- Budha di Indonesia seluruhnya telah bermuatan keagamaan. Penerapan pembelajaran keagamaan Hindu- Budha dicirikan

pada tempat pelaksanaannya diselenggarakan di padepokan-padepokan. Isi materi yang diajarkan mencakup materi teologi (ilmu agama), bahasa serta sastra, ilmu- ilmu sosial, ilmu- ilmu perbintangan dan ilmu pasti. Adapun terkait Pendidikan Islam, Pembelajaran yang berlandaskan materi materi ajaran Islam diawali semenjak kehadiran para pedagang yang berasal dari Gujarat India ke tanah air kurang lebih kisaran abad ke-13. Perkembangan agama Islam terjadi dan tumbuh subur di kawasan pesisir karena sebagai jalur perdagangan dan terjadinya interaksi antara penduduk pribumi dengan para pedagang gujarat, sedangkan di daerah pedalaman masih kental dengan ajaran ajaran agama Hindu-Budha.

Seiring perkembangan waktu dan berakhirnya zaman kerajaan Islam di Nusantara ditandai dengan masuknya penjajahan kolonial Hindia-belanda, eksistensi pembelajaran Islam di Indonesia senantiasa terus berkembang dimana prosesnya telah berlangsung sangat panjang serta telah memasyarakat. Pada masa pra kemerdekaan, pendidikan Islam memang kurang mendapatkan perhatian oleh pemerintah kolonial. Pendidikan pra kemerdekaan yang dikelola oleh pemerintah kolonial lebih terfokus pada penyiapan tenaga kerja untuk menjadi tenaga kerja untuk kepentingan pemerintah hindia belanda kala itu. Hal ini juga dijelaskan oleh Wahyuni bahwa cirikhas pelaksanaan pendidikan pada zaman penjajahan Belanda dan Jepang, khususnya pada aspek kurikulum pendidikan diwarnai oleh misi dan tujuan penjajah sehingga bisa dikatakan bahwa keberadaan lembaga pendidikan kala itu termasuk kurikulumnya diarahkan untuk menciptakan sumberdaya manusia yang mampu memenuhi kebutuhan kebutuhan penjajah dan membantu misi penjajah.

(Wahyuni, 2015, p. 232). Dhaifi menambahkan pendidikan di era pra-kemerdekaan sangat diwarnai oleh kolonialisme dimana pendidikan agama lebih cenderung mengajarkan agama agama penjajah, selain itu dari segi akses pendidikan kala itu pendidikan hanya ditujukan bagi golongan tertentu dan sifatnya sangat terbatas, yaitu anak-anak priyai (Dhaifi, 2017, p. 78). Menurut Kuntowijoyo Priyayi adalah pegawai pemerintah kolonial (abding kanjeng gubernemen) dan abdi dalem Susuhunan. (Kuntowijoyo, 2002, pp. 151–152)

Pada masa pendudukan kolonial hindia-belanda dan jepang, pendidikan Islam dikelola secara langsung oleh peran serta masyarakat dengan model pendidikan pesantren, sekolah dan balai balai latihan. Hal ini dijelaskan juga oleh Sabarudin, Pembelajaran di Indonesia pada era pra-kemerdekaan doklasifikasikan menjadi ke dalam 3 periode, ialah: a) Pembelajaran yang berlandaskan ajaran keagamaan, b) Pembelajaran yang berlandaskan kepentingan penjajahan, dan c) Pembelajaran dalam rangka perjuangan kemerdekaan. (Sabarudin, 2015, p. 141)

Menurut Wirjosukarto (1985) dalam Muhaimin menerangkan bahwa pembelajaran pada masa pra kemerdekaan terdapat dua bentuk atau corak pendidikan, yaitu corak lama yang berpusat di pondok pesantren dan corak baru yang dilaksanakan oleh lembaga atau sekolah yang didirikan dan dikelola oleh pemerintah Belanda. (Muhaimin, 2003, p. 70) Hal tersebut dipertegas oleh hasil penelitian Steenbrink yang menunjukkan bahwa pendidikan yang dikelola oleh kolonial hindia-belanda sangat berbeda dengan pendidikan Islam Indonesia yang sifatnya tradisional, bukan saja dari segi metode, tetapi lebih khusus pada segi isi

dan tujuannya atau kurikulumnya. Pendidikan yang dikelola oleh pemerintah kolonial, pada aspek kurikulum lebih berpusat pada ilmu pengetahuan dan ketrampilan dunia yang mana sering diistilahkan dengan pendidikan umum. Sedangkan lembaga pendidikan Islam lebih ditekankan pada pengetahuan dan ketrampilan untuk agama (Steenbrink, 1986, p. 24). Pendidikan Islam pra Kemerdekaan lebih bercorak pendidikan tradisional dimana dalam pelaksanaannya didirikan dan dikelola secara langsung oleh masyarakat pribumi.

Beberapa jenis dan corak karakteristik pendidikan Islam Tradisional dimana lebih sering diistilahkan dengan Pendidikan Pribumi Awal. Beberapa jenis pendidikan ala pribumi yang masih bersifat tradisional dengan ciri-khas tanpa manajemen yang tertata dan masih sangat minimalis diantaranya: diantaranya: 1) Pengajian Al Qur'an, 2) Pengajian Kitab/pesantren. Pada aspek kurikulumnya lebih mengacu pada pembelajaran Al Qur'an dan kitab kuning/kitab klasik. Dalam pelaksanaannya diselenggarakan di rumah-rumah, masjid, surau atau langgar dan juga pesantren atau padepokan serta tempat-tempat lainnya. Khususnya pada pembelajaran Kitab, yang menjadi bahan kajian menjadi indikator tinggi rendahnya capaian keilmuan agama seseorang (Yunus, 1992).

1. Pengajian Al Qur'an

Pengajian Al Qur'an menjadi model pendidikan Agama Islam dasar yang dikelola oleh masyarakat pribumi. Dalam pelaksanaannya pendidikan ini masih sangat sederhana. Tujuan, materi dan kurikulum secara keseluruhannya berpusat pada pengkajian Al Qur'an. Mahmud Yunus menjelaskan bahwa pelaksanaan pendidikan ini berbasis surau atau masjid sebagai tempatnya dan hampir disetiap desa selalu berdiri

surau/langgar atau masjid dimana berfungsi sebagai sarana transformasi ajaran agama Islam dimana dalam prosesnya diajarkan bagaimana cara membaca AL Qur'an dan tata cara ibadah yang benar dalam Islam (Yunus, 1992, p. 34). Corak pendidikan ini lebih condong mengarah pada pendidikan Islam tingkat awal (dasar). Berkaitan dengan kurikulum yang diajarkan, proses pengajian Al Qur'an ini diawali dengan membaca beberapa bagian dari ayat Al Qur'an. Menurut Steenbrink pada tahap awal peserta didik belajar membaca surat Al Fatihah dilanjutkan mempelajari Juz'ama yang terdiri dari surat-surat pendek pilihan yang penting sebagai bekal untuk menjalankan praktik ibadah sehari-hari (Steenbrink, 1986, p. 10). Murid-murid diajak untuk belajar berbagai huruf Arab, menghafal teks-teks Arab yang terdapat dalam Al Qur'an serta bacaan dan doa-doa dalam shalat. Sistem ini diberikan secara individual (face to face) antara sang guru dengan murid. Proses pembelajaran dilaksanakan di rumah guru atau di langgar, pada kondisi lain juga terkadang dilakukan di rumah murid dikarenakan orang tua murid mempunyai kedudukan penting. Menurut Snouck Hurgronje sebagaimana dikutip Steenbrink menjelaskan proses pelaksanaan pengajian Al-Qur'an dilaksanakan secara individual. Murid-murid berkumpul di salah satu langgar/mushola atau diserambi atau di rumah sang guru. Para murid membaca dan melagukan ayat-ayat suci Al Qur'an satu persatu dibawah bimbingan guru selama $\pm \frac{1}{4}$ atau $\frac{1}{2}$ jam. Ketika salah seorang murid menghadap sang guru, murid lainnya dengan suara nyaring mengulangi mengkaji bacaan kemarin atau lanjutan pelajaran yang telah diperbaiki gurunya (Steenbrink, 1986, p. 11).

Dalam hal ini Muhaimin menambahkan susunan isi kurikulum pada tingkat awal atau dasar dimulai dari a)

mempelajari bacaan Al qur'an tanpa memahami isi, b) belajar bacaan dan praktik shalat, c) materi tauhid/aqidah atau ketuhanan dilanjutkan apabila kesemua proses pembelajaran telah selesai diakhiri dengan upacara tammatan atau khataman dan upacara sunnatan (Muhaimin, 2003, p. 72). Tidak dampai disitu, dalam perkembanganya model pendidikan agama islam ini mengalami perubahan dimana terjadi klasifikasi tingkat pendidikan menjadi dua tingkat yaitu; pertama: pemula yang baru mempelajari huruf hijaiyah sampai mampu membaca, kedua: tingkat lanjutan, dimana capaian pada point pertama ditambah dengan mempelajari materi materi lainnya seperti al-barjanji, qosidah burdah, ilmu tajwid dan kitab kuning (Yunus, 1992, p. 35).

2. Pengajian Kitab/Pesantren.

Pelaksanaan pengajian kitab ini lebih cenderung mengacu pada model pesantren. Kemunculan model pendidikan Pesantren erat kaitanya dengan hadirnya para musafir muslim yang melakukan perdagangan di Nusantara pada abad 7 M dan 8 M. sejarah mengatakan, abad ke 11 M Islam sudah masuk di nusantara, pada abad ke 13 sampai akhir abad 17 intensitas penyebaran agama Islam berkembang pesat ditandai dengan berdirinya pusat-pusat kekuasaan Islam di Aceh, Demak, Giri, Ternate, Goa yang mana menjadi dikenal luas nya pesantren sebagai model pendidikan Islam kala itu. (Nahrawi, 2008, p. 28)

Awal mula model kurikulum pendidikan pesantren mengacu pada tingkat kemudahan dan kompleksitas kitab-kitab yang dipelajari. Kitab kitab dipilih diajarkan mulai dari yang tingkat dasar, menengah dan lanjutan. Seiring

perjalanan waktu, pesantren terus melakukan pembenahan dan pengembangan pada segala aspek, khususnya ranah kurikulum beberapa pesantren mulai mengakomodir materi materi pendidikan umum dalam isi kurikulum pesantren (Asri, 2017, p. 193). Proses pelaksanaan pengajian kitab ini memiliki beberapa kemiripan dengan pengajian alqur'an dimana tempat dilaksanakannya berbasis surau, langgar atau masjid dan juga ada yang dilaksanakan di rumah-rumah guru atau ustadz atau kyai. Pada tahap selanjutnya pengajian kitab ini mengalami perkembangan dari berbagai aspek, yang mana pesantren menjadi cikal bakal lahirnya madrasah. Perbedaan pengajian kitab/pesantren dengan pengajian Al Qur'an menurut Steenbrink diklasifikasikan menjadi tiga bagian (Steenbrink, 1986, p. 12) diantaranya:

- a. Dari segi pelaksanaannya, murid atau yang sering disebut santri dalam sekolah kitab ini dibuatkan sebuah tempat menginap berupa asrama dimana sering disebut Pesantren.
- b. Dari segi isi kurikulumnya, materi pelajaran yang diberikan dimulai dengan pendidikan tata bahasa seperti Ilmu Nahwu dan Sharaf.
- c. Dari segi proses pembelajarannya, materi disampaikan melalui dua model, secara individual, dan berkelompok/ model Halaqoh.

Kurikulum pengajian kitab khususnya yang mengacu pada model pendidikan pesantren pada proses pembelajarannya diawali dengan mempelajari dan menyelesaikan ilmu tata bahasa (nahwu dan sharaf), selanjutnya baru diijinkan untuk mempelajari ilmu lainnya seperti *ilmu fiqih*, *tafsir*, *ushuluddin*, *mantek*, *tashawuf*, *hadist* dan ilmu ilmu lainnya.

Pelaksanaan proses kegiatan pembelajaran dimana guru membacakan teks satu demi satu per baris, dilanjutkan dengan menterjemahkannya, apabila sekira memerlukan penjelasan lebih mendalam guru akan memberikan penjelasan (Steenbrink, 1986, p. 14).

Apabila dilihat dari sejarah perkembangan penyebaran Islam di Indonesia, model pendidikan ini juga telah dipakai oleh para masyarakat Hindu-Budha. Selain itu proses pembelajaran dengan model halaqoh atau juga sering disebut pembelajaran individual sebagaimana diterapkan di lingkungan yang mana materi kajiannya diawali dengan mempelajari bahasa arab ternyata juga diketemukan di pusat ibukota wilayah Islam di Bagdad (Steenbrink, 1986, p. 22). Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa model pendidikan ala pesantren tidak hanya sebatas murni dari tradisi Arab atau pun Hindu, melainkan merupakan hasil dari perpaduan antara tradisi dua budaya Arab Islam dan India Hindu di Jawa. Mahmud Yunus (1979) menjelaskan sebagaimana dikutip oleh Muhaimin (Muhaimin, 2003, p. 73) bahwa isi dari kurikulum pendidikan Islam dengan model pemondokan atau padepokan atau dalam istilah populernya disebut pesantren pada tahun 1900 – 1908 mencakup:

- a. Pengajian Al – qur'an
- b. Pengajian kitab yang terdiri atas berbagai tingkat dari yang terendah hingga yang tinggi tingkatnya yaitu:
 - 1) Diawali dengan mempelajari Ilmu tatabahasa/ gramatikal Nahwu, shorof, dan ilmu fiqh dengan memakai kitab jurumiyah, Imriti, alfiyah, matan Bina, Fathul Qorib, etc.

- 2) Dilanjutkan mempelajari ilmu tauhid, nahwu, shorof dengan memakai kitab sanusi, syaikh khalid (azhari, 'Asymawi), Kailani, fathul Mu'in, etc.
- 3) Mempelajari tauhid, nahwu, shorof, fiqh, tafsir dengan memakai kitab Kifayatul 'Awam (Ummul-Barahin), ibnu Aqil, Muhalli, jalalain/Baidlawi, etc.

Tujuan utama pendidikan Agama Islam model pesantren adalah menyiapkan calon lulusan yang terfokus pada penguasaan ilmu agama Islam. Rencana pelajaran (kurikulum) disusun dan ditetapkan secara langsung dengan mengacu pada kitab-kitab tertentu yang dipilih oleh seorang Kyai. Pada pelaksanaannya, pemilihan kitab sebagai bahan kajian dimulai dari jenis kitab yang rendah kemudian dilanjutkan pada satu disiplin ilmu keislaman yang memiliki tingkatan lebih tinggi. Kenaikan kelas ditandai dengan bergantinya kitab yang dikaji dimana diawali dengan selesainya kitab-kitab terdahulu yang telah dipelajari.

Sistem Pendidikan agama Islam pada era pra-kemerdekaan lebih bercorak sistem pendidikan Informal dimana yang dipentingkan adalah pengenalan nilai-nilai ajaran Islam (Daulay, 2007, p. 5). Barulah pada fase selanjutnya lahir lembaga-lembaga pendidikan Islam yang dikelola oleh masyarakat pribumi seperti masjid, pesantren, meunasah, rangkah, dayah, dan surau dimana kesemuanya lebih bersifat tempat sebagai basis pelaksanaannya. Dalam buku yang sama, sebagaimana disampaikan Daulay (Daulay, 2007, p. 5) terkait ciri-ciri yang paling menonjol dalam fase ini adalah :

1. Pertama, kurikulum/materi pelajaran terkonsentrasi kepada pengembangan dan pendalaman ilmu-ilmu

agama, pembelajaran terkonsentrasi pada pembahasan kitab-kitab klasik yang berbahasa arab.

2. Kedua, metode yang digunakan memakai sistem sorogan, wetonan, mudzakaroh/musyawarah.
3. Ketiga, system yang dipakai menggunakan model non klasikal yakni sistem *halaqoh*.
4. Output akhirnya diprospekkan untuk menjadi Ulama', kyai, ustadz, guru agama, modin dan profesi ranah keagamaan lainnya.

Menurut Daulay arti dari Madrasah sebagaimana mengutip dalam *Shorter Encyclopedia of Islam* adalah "*Name of an institution where the Islamic science are studied*" (nama dari suatu lembaga dimana didalamnya diajarkan ilmu-ilmu ke-Islaman. (Daulay, 2012, p. 98). Madrasah yang mana menjadi produk pengembangan dari pesantren dan beberapa lembaga pendidikan islam informal kala itu dimana model ini diperkenalkan oleh para ulama yang menimba ilmu dari timur tengah terus mengalami kemajuan kearah bentuk yang ideal. Karakteristik masyarakat Indonesia yang agamis menjadi modal besar berhasilnya dakwah Islam di Nusantara. Menurut Azumardi Azra madrasah mulanya lebih kental dan eksklusif mengajarkan ilmu keislaman seperti ilmu bahasa Arab dan ilmu Islam seperti Alquran, Hadis, fikih, sejarah Islam dan kebudayaan, tasawuf dan ilmu keIslam lainnya. Namun seiring perkembangannya, madrasah secara perlahan mulai mengakomodir dan memasukkan matapelajaran seperti matematika, geografi dan ilmu-ilmu umum lainnya (Azra, 1999, p. 72).

Ditinjau dari aspek kurikulumnya, Napitupulu menjelaskan madrasah terbagi menjadi tiga jenis yaitu Madrasah Diniyah

(madin), Madrasah dan Madrasah Keagamaan (MA-PK) (Napitupulu, 2018, p. 155). Madrasah diniyah adalah jenis madrasah yang didalamnya mengajarkan khusus untuk ilmu keagamaan. Madrasah diniyah ini masih terbagi menjadi tiga yaitu diniyah awaliyah, diniyah Wustho, Diniyah 'Ulya. Sedangkan madrasah kedua adalah madrasah formal sebagaimana sekolah pada umumnya yang terbagi menjadi tiga; madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah dan madrasah Aliyah. Adapun Madrasah jenis ketiga adalah madrasah formal pada jenjang menengah yang memfokuskan pada pengkajian dan penguasaan ilmu pengetahuan agama, dengan kata lain madrasah formal program keagamaan.

B. Kurikulum Pendidikan Agama Pasca Kemerdekaan

Pasca kemerdekaan Indonesia, Pemerintah semakin memberikan perhatian terhadap keberlangsungan pendidikan agama Islam. Dilihat dari historisnya, pendidikan Islam di Indonesia mengalami proses perkembangan yang begitu panjang dimulai pada abad ke XX M hingga saat ini. Perkembangan tersebut terbagi dalam tiga masa yaitu pada masa orde lama dan orde baru dan pasca reformasi.

1. Perkembangan Kurikulum Pendidikan Islam pada Masa Orde lama

Pasca kemerdekaan yang sering diistilahkan dengan sebutan orde lama memberikan angin segar bagi perkembangan Pendidikan Islam seiring berdirinya kementerian agama (dulu; Departemen Agama yang resmi berdiri pada 3 Januari 1946). Pada tanggal 27 Desember 1945 melalui Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNP) sebagaimana dijelaskan oleh Direktorat

pendidikan Islam (Ditjen Pendidikan Islam, n.d.) juga memberikan anjuran bahwa *"Madrasah dan pesantren yang pada hakikatnya adalah satu sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata yang telah berurat dan berakar dalam masyarakat Indonesia pada umumnya, hendaknya mendapatkan perhatian dan bantuan nyata berupa tuntunan dan bantuan material dari pemerintah"* selain itu, lahirnya kebijakan-kebijakan terkait perjalanan **Pendidikan Agama tertuang dalam Undang-Undang No, 4 Tahun 1950** bab XII Pasal 20 yang berisi; a) pada sekolah sekolah negeri diberlakukan mata pelajaran agama, orang tua peserta didik harus memberikan persetujuan kepada anaknya apakah akan mengikuti pelajaran agama atau tidak, b) pada aspek pelaksanaan pendidikan agama di sekolah negeri diatur dalam peraturan yang disusun oleh dua kementerian (Kementerian Pendidikan dan kementerian Agama). Melihat hal tersebut bisa disimpulkan tahun 1950 sebagai tonggak bagi **madrasah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan secara formal telah mendapatkan pengakuan pemerintah.**

Berkaitan dengan pengembangan Kurikulum pada madrasah, upaya penyesuaian dilakukan dengan memasukkan sepertiga pelajaran agama dan sisanya pelajaran umum dalam kurikulum. Rumusan kurikulum tersebut menjawab kekhawatiran beberapa kalangan yang menyatakan bahwa madrasah tidak cukup hanya mengajarkan agama saja, tetapi juga harus mengajarkan pendidikan umum, kebijakan ini diambil untuk merespon munculnya anggapan yang melekat kepada madrasah bahwa pelajaran umum yang diajarkan di madrasah tidak akan mampu mencapai tingkat yang sama jika

dibandingkan dengan sekolah umum (Ditjen Pendidikan Islam, n.d.). Kurikulum Pendidikan Agama pada masa Orde Lama terbagi menjadi dua jenis kurikulum yaitu kurikulum tahun 1947 dan kurikulum 1952-1964 (Dhaifi, 2017, p. 78).

a. Kurikulum 1947

Kurikulum pertama yang lahir setelah Indonesia Merdeka adalah kurikulum tahun 1947. Kurikulum ini juga disebut *rencana pelajaran* atau dalam bahasa belanda disebut *leer plan* (Wahyuni, 2015, p. 234). Menurut Dhaifi, kurikulum 1947 baru dilaksanakan pada tahun 1950. Hal tersebut disebabkan karena system perpolitikan yang belum stabil. Secara formal pengembangan kurikulum di Indonesia pasca kemerdekaan baru dimulai tahun 1950 sehingga kurikulum ini sering disebut dengan istilah kurikulum 1950. Pada tahun ini kurikulum pendidikan agama belum sepenuhnya berjalan maksimal, kurikulum pendidikan tahun 1947 cenderung masih bercorak system pendidikan kolonial belanda dan jepang. Hal ini ditengarai karena pada waktu tersebut Indonesia baru merdeka dan sedang dalam proses penataan serta mencari model pendidikan yang ideal. Pendidikan pada masa ini lebih mengutamakan pendidikan watak, yang ditekankan adalah bagaimana menanamkan rasa nasionalisme sehingga terbangun kesadaran berbangsa dan bernegara dikalangan masyarakat.

Rencana Pelajaran 1947 atau yang sering disebut kurikulum 1950 khususnya pada jenjang

Sekolah Rakyat terdapat enam belas matapelajaran, terkhusus di area Sunda, Jawa dan Madura diajarkan matapelajaran bahasa daerah. Rincian mata pelajaran yang diajarkan meliputi tatacara menulis, berhitung, seni suara, keterampilan tangan, bahasa Indonesia, ilmu alam, ilmu hayat, berhitung, ilmu bumi, ilmu sejarah, berhitung, Ilmu alam, Ilmu hayat, Ilmu Bumi, Sejarah, Menggambar, Pekerjaan Tangan, Pekerjaan Keputrian, Gerak Badan, Kebersihan dan Kesehatan, pendidikan Budi Pekerti, dan Pendidikan Agama. Menurut Wahyuni khusus pada matapelajaran agama pada tahun 1951 baru diajarkan mulai kelas 1 dimana pada tahun-tahun sebelumnya matapelajaran agama hanya mulai kelas empat keatas (Wahyuni, 2015, p. 234).

b. Kurikulum 1952

Hadirnya Kurikulum 1952 sebagai upaya penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Istilah lain dari kurikulum ini sering disebut *rencana pelajaran terurai 1952*. Pasca munculnya SKB Dua Menteri (Menteri PP&K dan Menteri Agama) tahun 1951 yang mana isinya mengatur bagaimana pelaksanaan pendidikan agama Islam menegaskan bahwa pelaksanaan materi pendidikan agama Islam wajib diberikan di sekolah umum minimal dua jam per-minggu. Menurut Dhaifi, departemen agama (saat ini Kementerian Agama) membentuk Tim penyusunan kurikulum Pendidikan agama di sekolah yang dipimpin langsung oleh K.H Imam Zarkasyi dari Pesantren Modern Gontor. Hasil dari

penyusunan kurikulum pendidikan agama tersebut disahkan secara langsung oleh Menteri Agama pada tahun 1952. Dari usaha tersebut berimplikasi pada diperolehnya porsi 25 % untuk pendidikan agama dari keseluruhan matapelajaran yang diajarkan di sekolah selama satu minggu (Dhaifi, 2017, p. 79).

c. Kurikulum 1964

Kurikulum 1964 merupakan diberi nama *Rencana Pendidikan 1964*, sebagaimana Hamalik menjelaskan bahwa ciri utama kurikulum ini dimana pemerintah bercita cita supaya masyarakat memperoleh ilmu pengetahuan akademik sebagai bekal awal pada tingkat SD sehingga dalam proses pembelajarannya berpusat pada program Pancawardhana (Hidayat, 2013, p. 3). Pengembangan Pancawardhana diantaranya mencakup pengembangan 1) cipta, 2) rasa, 3) karsa, 4) karya dan 5) moral. Khususnya pada matapelajaran diklasifikasikan menjadi lima kelompok bidang studi yang mencakup: moral, kecerdasan, artistic/emosional, keterampilan dan jasmani.

2. Perkembangan Kurikulum PAI era orde baru

Pengembangan kurikulum PAI di Indonesia terus diupayakan seiring perjalanan waktu, pergantian kepemimpinan dan politik ikut mewarnai perubahan kurikulum tersebut. Pada era orde baru, segala bentuk kebijakan berkaitan dengan sistem pendidikan madrasah lebih cenderung melanjutkan dan meningkatkan kebijakan pendidikan pada masa orde lama. Menurut Nurhayati, zaman orde baru, madrasah pada era tersebut lebih bersifat lembaga pendidikan otonom

dimana pengawasannya dibawah kementerian agama, belum menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional (Nurhayati, 2013, p. 134). Permasalahan tersebut apabila dilihat dari segi muatan kurikulum madrasah disebabkan lebih didominasi dengan muatan muatan agama, selain itu ketidak seragaman struktur kurikulum yang dipakai sehingga memunculkan image kurikulum madrasah belum memiliki standar yang baku dan belum terpantaunya system manajemen madrasah secara konsisten oleh pemerintah.

Melihat kondisi tersebut, Menteri Agama pada waktu itu mencoba melakukan perbaikan dan pengembangan yang mana kemudian lahir kebijakan sebagaimana dituangkan dalam ketetapan MPRS Nomor XXVII tahun 1966 pasal 1 yang isinya menerangkan bahwa PAI masuk kedalam kurikulum menjadi matapelajaran yang diajarkan di sekolah sekolah umum dari tingkat dasar sampai universitas (Daulay, 2007, p. 150). Dalam pelaksanaannya dijelaskan terkait isi dari matapelajaran agama sebagaimana ketetapan **MPRS diatas pada pasal 4 didalamnya memuat kebijakan tentang isi pendidikan**. Untuk mencapai dasar dan tujuan pendidikan maka isi dari pembelajaran agama ditujukan untuk; a) Mempertinggi jiwa, mental, moral, budi pekerti dan memperkuat keyakinan agama anak, b) Meningkatkan kecerdasan dan keterampilan, serta c) memberikan pembinaan dan pengembangan fisik yang kuat dan sehat (Ditjen Pendidikan Islam, n.d.). Hal ini menunjukkan bahwa usaha usaha yang dilakukan sebagai agenda awal pemerintah pada masa orde baru adalah mereformalisasi dan merestrukturisasi madrasah.

Hal diatas juga dikuatkan oleh lahirnya ketetapan MPRS No. XXVII/1966 tentang "Agama, Pendidikan dan Kebudayaan" dimana dengan gamblang dan jelas memperlihatkan kecenderungan peranan Agama. Dalam konsideranya disebutkan bahwa ketetapan tersebut didasarkan beberapa alasan diantaranya:

- a. Pendidikan, agama dan kebudayaan menjadi tiga unsur mutlak yang harus dipertahankan dalam rangka *nation and character building*.
- b. Falsafah pancasila menjadi sumber untuk meningkatkan harkat martabat manusia.
- c. Dalam rangka meningkatkan ketahanan revolusi Indonesia salah satu factor yang menentukan adalah moral dan mental manusia Indonesia.

Berkaitan dengan matapelajaran PAI. ketetapan ini memberikan status yang sangat berarti dimana PAI tidak lagi merupakan matapelajaran pilihan melainkan telah menjadi matapelajaran pokok yang wajib diikuti seluruh peserta didik dan menjadi syarat kelulusan ujian akhir (Mukhtar, 1999, p. 139).

Pada masa orde baru, perkembangan kurikulum pendidikan agama lebih bersifat menyempurnakan kurikulum sebelumnya yaitu pengembangan berkelanjutan dari kurikulum masa orde lama yaitu 1947 dan 1952 yang selanjutnya pada masa orde baru disempurnakan dengan lahirnya kurikulum 1964, 1968, 1975, 1984 atau yang sering disebut kurikulum CBSA, 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Seiring perjalanan waktu pengembangan kurikulum PAI tersebut dari kesemua jenis kurikulum berjalan secara berkelanjutan.

Untuk selanjutnya dipaparkan beberapa model kurikulum yang berlangsung di era orde baru sebagaimana berikut ini:

d. Kurikulum 1968

Kurikulum ini lahir sebagai perubahan pengembangan dari kurikulum sebelumnya yaitu kurikulum 1964 yang mana hal tersebut sangat dipengaruhi oleh perubahan sistem politik dari pemerintahan rezim orde lama ke rezim orde baru. Pada prosesnya kurikulum 1968 menggantikan kurikulum tahun 1964. Menurut Hidayat, pada kurikulum 1968 ini mengalami perubahan struktur kurikulum dari penekanan Pancawardhana ke penekanan pendekatan organisasi materi pelajaran menjadi kelompok pembinaan jiwa pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus (Hidayat, 2013, p. 4). Pada kurikulum ini terdapat 9 matapelajaran yang diajarkan yang mana diarahkan pada upaya membentuk manusia pancasilais sejati, kuat, sehat jasmani, memiliki kecerdasan dan keterampilan yang tinggi pada aspek jasmani, moral, budi pekerti dan keyakinan agama yang kuat. Khususnya untuk matapelajaran pendidikan agama masih memiliki kesamaan dengan kurikulum sebelumnya.

e. Kurikulum 1975

Pada kurikulum tahun 1975, orientasi pengajaran lebih menitikberatkan pada efektifitas dan efisiensi kegiatan proses belajar mengajar. Kurikulum 1975 ini diberlakukan mulai jenjang SD-SMP dan SMP sedangkan pada tahun 1976 barulah disusun dan

diterapkan untuk sekolah keguruan atau yang sering disebut SPG, STM dan atau SMEA (sekolah menengah kejuruan). Pada model kurikulum ini mulai dikenal istilah satuan pelajaran yang menjadi rencana pelajaran pada setiap pembahasannya. Tujuan pendidikan dan pengajaran terbagi menjadi tiga ranah; a) tujuan institusional, b) tujuan kurikuler, c) tujuan instruksional umum dan khusus.

Pada pelaksanaannya, menurut Hidayat (Hidayat, 2013, p. 6) menjelaskan kurikulum ini memiliki prinsip sebagai berikut:

- 1) Berorientasi pada tujuan
- 2) Menganut pendekatan integrative
- 3) Menekankan pada efektifitas dan efisiensi daya dan waktu
- 4) Menganut pendekatan system yang dikenal dengan dengan prosedur pengembangan system instruksional (PPSI)
- 5) Kurikulum bercorak psikologi behaviorisme dengan menekankan pada stimulus respon (rangsang-jawab) dan latihan (drill)

Khususnya matapelajaran agama Islam pada kurikulum 1975 mengalami perubahan yang signifikan pasca lahirnya SKB 3 menteri (Menteri agama, menteri dalam negeri dan menteri P&K). Perubahan signifikan tersebut adalah berubahnya porsi pendidikan agama menjadi 30 % dan pendidikan umum 70 %, ijazah lembaga madrasah setara dengan ijazah sekolah umum dan dalam proses mutasi/

pindah antar lembaga madrasah ke sekolah umum (beda kementerian) diakui/diperbolehkan (Dhaifi, 2017, p. 80).

f. Kurikulum 1984 (Kurikulum CBSA)

Kurikulum 1984 lebih menekankan pada process skill approach, meskipun penekanan utama pada pendekatan proses, tetapi tujuan tetap menjadi penting. Dalam istilah lain kurikulum ini sering disebut "kurikulum 1975 yang disempurnakan", ada juga yang sering menyebut kurikulum CBSA. Kurikulum 1984 lahir sebagai perbaikan terhadap kurikulum 1975. Kurikulum ini memiliki ciri-ciri:

- 1) Berorientasi pada tujuan pembelajaran (instruksional)
- 2) Pendekatan dalam proses pembelajaran berpusat pada peserta didik melalui system Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) atau Student Active Learning (SAL)
- 3) Materi pelajaran dikemas dengan model pendekatan spiral, pengemasan materi pelajaran berdasarkan kedalaman dan keluasan, semakin tinggi kelas dan jenjang sekolah maka semakin dalam dan luas materi pelajaran yang diberikan.
- 4) Diawali dengan penanaman pengertian terlebih dahulu baru kemudian dilanjutkan dengan latihan latihan
- 5) Materi disampaikan berdasarkan tingkat kesiapan atau kematangan siswa

- 6) Menggunakan pendekatan keterampilan proses, maksudnya memberikan penekanan pada proses pembentukan keterampilan memperoleh pengetahuan dan mengkomunikasikan perolehanya.
- g. Kurikulum 1994 dan Suplemen kurikulum 1999
- Kurikulum 1994 disusun sebagai langkah untuk menyempurnakan kurikulum 1984. Dalam pelaksanaannya didasarkan pada undang undang no. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Beberapa ciri utama dari pemberlakuan kurikulum ini antarlain:
- 1) System caturwulan menjadi model pembagian tahapan pelajaran
 - 2) Pelajaran lebih menekankan pada materi/isi yang cukup padat
 - 3) Kurikulum ini bersifat populis, maksudnya memberlakukan satu system kurikulum untuk semua siswa di Indonesia
 - 4) Pada proses KBM, guru hendaknya memilih dan menggunakan strategi yang melibatkan siswa aktif dalam belajar baik secara fisik, mental dan social.
 - 5) Dalam pengajaran dimulai dari yang sifatnya kongret ke hal yang sifatnya abstrak, dari yang mudah ke hal yang sulit, dari hal yang sederhana ke hal yang kompleks.
 - 6) Pengulangan materi yang sulit dilakukan untuk pementapan pemahaman siswa.

Beberapa problem muncul seiring pemberlakuan kurikulum ini. Hal tersebut diakibatkan karena kurikulum ini lebih cenderung pada penguasaan materi (content oriented). Beberapa problem tersebut antara lain dirasa beban siswa terlalu berat karena banyaknya tuntutan mata pelajaran dan materi yang harus dikuasai. Selain itu materi pelajaran dianggap terlalu sulit, materi dirasa kurang relevan dengan tingkat perkembangan berfikir siswa dan kurang memiliki kaitan dengan kehidupan sehari-hari. Atas dasar munculnya problem problem tersebut mendorong dilakukannya penyempurnaan kurikulum ini. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menyusun dan memberlakukan Suplemen Kurikulum 1994.

Menurut Dhaifi, kurikulum 1994 adalah hasil dari langkah memadukan dan mengembangkan kurikulum-kurikulum sebelumnya terutama kurikulum 1975 dan 1984 yang mana pada periode ini sebagai moment penegasan bahwa madrasah adalah lembaga pendidikan yang berciri khas islam. Isi kurikulum, struktur dan konsepnya senafas dengan nilai-nilai Islam dimana hal tersebut tertuang dalam UU Siddiknas No 2 tahun 1989 (Dhaifi, 2017, p. 80).

3. Kurikulum Pendidikan Agama Pasca Reformasi hingga sekarang

Pergantian rezim kepemimpinan berdampak pada perubahan kebijakan dalam dunia pendidikan yang mana kurikulum yang berlaku juga mengalami perubahan. Diantara beberapa perubahan kurikulum yang berjalan pada era reformasi antara lain:

a. Kurikulum 2004 (KBK)

Kurikulum 2004 lebih dikenal dengan istilah *Kurikulum Berbasis Kompetensi* (KBK). Menurut Hidayat, sebelum tahun 2004, tepatnya tahun 2002 kurikulum ini (KBK) telah disusun sebagai upaya penyempurnaan kurikulum 1994 merespon terjadinya perubahan structural pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralistik (Hidayat, 2013, p. 13). Penyempurnaan tersebut berlanjut pada tahun 2004 dimana seiring proses pemberlakuan kurikulum KBK ini lebih dikenal dengan Kurikulum 2004.

Pada kurikulum ini, pendidikan berbasis kompetensi lebih menitik beratkan pada pengembangan kemampuan untuk melakukan (kompetensi) tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini mengandung arti bahwa dalam proses pendidikan lebih mengacu pada bagaimana menyiapkan individu peserta didik yang mampu melaksanakan seperangkat kompetensi tertentu sebagaimana yang telah ditetapkan. Kurikulum KBK memiliki ciri-ciri antara lain:

- 1) Menekankan pada pencapaian kompetensi siswa baik secara individu maupun klasikal
- 2) Berorientasi pada hasil belajar siswa/ learning outcomes dan keberagaman/kemajemukan
- 3) Menggunakan pendekatan dan metode yang variatif

- 4) Sumber belajar tidak terbatas pada guru, melainkan mencakup sumber-sumber lain yang memiliki unsur edukatif
 - 5) Dalam proses evaluasi/penilaian lebih menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi.
- b. Kurikulum 2006 (KTSP)

Kurikulum 2006 atau yang akrab sering diistilahkan dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) secara substansial dalam pemberlakuanya lebih mengarah pada mengimplementasiakan regulasi yang tertuang dalam PP No. 19 tahun 2005 meskipun secara esensinya, isi dan arah pengembangan KBM masih bercirikan tercapainya paket-paket kompetensi, bukan sebatas pada tuntas tidaknya sebuah subject matter.

Secara singkat ciri ciri Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan memiliki kesamaan dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi. Perbedaan yang paling tampak antara KTSP dengan KBK terletak pada kewenangan dalam hal penyusunanya, dimana mengacu pada desentralisasi system pendidikan. System desentralisasi adalah system pendidikan dimana pemerintah dalam hal ini kementerian pendidikan hanya menyusun standar kompetensi dan kompetensi dasar. Tugas sekolah/madrasah adalah melakukan pengembangan dengan menyusun silabus dan penilaiannya menyesuaikan dengan setting kondisi sekolah dan daerah dimana sekolah tersebut berada.

Menurut Wina Sanjaya sebagaimana yang dijelaskan dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP Pasal 1, Ayat 15) dijelaskan bahwa kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) merupakan kurikulum operasional dimana dalam penyusunan serta pelaksanaanya dilakukan oleh masing-masing satuan pendidikan dengan memperhatikan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) (Sanjaya, 2010, p. 128).

c. Kurikulum 2013

Kurikulum 2013 disusun sebagai upaya penyempurnaan kurikulum sebelumnya yaitu kurikulum 2006 atau KTSP. Dalam rangka mengendalikan mutu hasil pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan, pemerintah menetapkan peraturan menteri agama RI tentang kurikulum madrasah 2013 matapelajaran PAI dan bahasa Arab. Tujuan dari kurikulum 2013 adalah untuk mempersiapkan manusia Indonesia yang memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga Negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan peradaban dunia. Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Dalam kurikulum 2013, penekanan nilai keagamaan sangat kental sekali bahkan tidak hanya terkhusus pada matapelajaran PAI, melainkan juga terintegrasi

pada seluruh mata pelajaran yang diajarkan. Dalam hal ini yang menjadi pembeda PAI pada Kurikulum 2013 adalah pada Tematik Integratif. Pembelajaran PAI dalam Kurikulum 2013 lebih bernuansa pada penguatan moral akhlak dan karakter peserta didik, dalam pemahaman agama dan praktik ibadah melalui mata pelajaran PAI bukan sekedar pembelajaran yang sifatnya tekstualis dogmatis semata.

C. Madrasah Era SKB 3 Menteri

Awal mula sebelum munculnya SKB 3 menteri, pengelolaan dan pembinaan sekolah dan madrasah berada pada tanggung jawab kementerian pendidikan dan kebudayaan sebagaimana Keppres No 34 Tahun 1972 dan Inpres No 15 Tahun 1974. Dari lahirnya keppres tersebut memicu kekhawatiran serta kecemasan umat Islam terkait akan dihapuskannya sistem pendidikan madrasah. Kekhawatiran dan kecemasan tersebut mendorong pemerintah mengeluarkan surat keputusan bersama (SKB 3 Menteri). Selain dipicu kekhawatiran tersebut, Antara tahun 1970-an pemerintah pun sudah mulai memikirkan bagaimana memadukan model pendidikan madrasah dalam sistem pendidikan nasional. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam hal ini adalah memperkuat struktur yang ada pada madrasah pada aspek jenjang maupun kurikulumnya dengan harapan nantinya lulusan madrasah mampu mendapatkan pengakuan yang setara dengan lulusan sekolah dan dapat melanjutkan ke sekolah sekolah yang dikelola dibawah naungan Departemen Pendidikan dan kebudayaan. Untuk itulah pintu pertama dan utama integrasi madrasah/ pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan Nasional ditandai dengan dikeluarkannya SKB tiga

Menteri tahun 1974 tentang peningkatan mutu pendidikan pada madrasah (Mukhtar, 1999, p. 132).

Pasca dikeluarkannya SKB 3 Menteri dimulai tahun 1975, lebih tepatnya dekade 90-an eksistensi madrasah sebagai lembaga pendidikan semakin diakui secara penuh sebagai bagian utuh dari system pendidikan nasional. Dengan satu system yang utuh dimaksudkan bahwa pelaksanaan pendidikan Nasional tidak hanya bergantung pada jalur pendidikan sekolah semata melainkan juga memanfaatkan jalur pendidikan luar sekolah. Langkah kongrit pemerintah pada era orde baru dalam hal ini berusaha menyusun undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang system Pendidikan nasional yang sekaligus menggantikan UU No. 4 tahun 1950 Jo. No 2 Tahun 1954. Menurut Mukhtar, dalam konteks ini memberikan penegasan definitif pada madrasah melalui kebijakan kebijakan yang sifatnya lebih operasional serta dimasukkan dalam kategori pendidikan sekolah tanpa menghilangkan ciri khas keagamaanya. Melalui upaya ini dapat disimpulkan bahwa madrasah berkembang secara terpadu dan terintegrasi dalam system pendidikan nasional (Mukhtar, 1999, p. 133).

Kelahiran SKB Tiga Menteri utamanya adalah merespon kekhawatiran Umat Islam akan dihapuskannya system pendidikan madrasah sebagai konsekwensi dari Keppres tahun 1972 dan Inpres tahun 1974 diatas. Atas dasar itu pemerintah melalui Departemen Agama kala itu dipimpin oleh menteri agama R.I Mukti Ali melaksanakan sidang kabinet terbatas pada tanggal 26 Nopember 1974 yang berimplikasi terhadap lahirnya SKB 3 Menteri. Pada tahap selanjutnya oleh presiden menanggapi masalah tersebut mengeluarkan petunjuk pelaksanaan kepres dan Inpres diatas yang mana

isinya menegaskan bahwa 1) pembinaan pendidikan umum adalah tanggung jawab Menteri pendidikan dan kebudayaan, sedangkan pendidikan agama menjadi tanggung jawab Menteri Agama, 2) untuk pelaksanaan keppres dan Inpres diatas sebaiknya perlu ada kerjasama antara departemen P&K, departemen dalam negeri dan departemen Agama.

Usaha untuk memperkuat posisi madrasah setara dengan sekolah dituangkan dalam Bab I pasal 1 ayat 2 yang isinya madrasah mencakup tiga jenjang: a) madrasah Ibtidaiyah setingkat sekolah dasar, b) MTs setingkat SMP dan MA setingkat SMA. Pada bab II pasal 2 juga ditegaskan kesetaraan Madrasah dengan sekolah diantaranya: a) Ijazah Madrasah memiliki nilai yang sama dengan Ijazah Sekolah umum yang setingkat, b) lulusan madrasah dapat melanjutkan ke Sekolah umum setingkat lebih atas dan c) Siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat.

Dengan dikeluarkannya SKB Tiga Menteri memberikan nilai positif dan mempertegas kesetaraan status madrasah dengan sekolah umum. Berbagai kebijakan strategis lahir diantaranya mengatur organisasi dan tatakerja madrasah pada semua tingkatan, mengeluarkan peraturan tentang persamaan ijazah madrasah swasta dengan negeri melalui Keputusan Menteri Agama No 5 tahun 1977, melakukan penyusunan ulang kurikulum dengan penyempurnaan komposisi matapelajaran dimana madrasah memuat matapelajaran umum dengan jumlah yang sama dengan kurikulum sekolah pada tiap jenjangnya.

Tahap awal sebagai realisasi SKB 3 menteri, disusunlah kurikulum 1976, disempurnakan kembali melalui kurikulum 1984 sebagai tindak lanjut lahirnya SKB 2 Menteri tahun 1984

yang isinya tentang pengaturan pembakuan isi kurikulum sekolah umum dan kurikulum madrasah (Nurhayati, 2013, p. 138). Pada tingkat MI, komposisi kurikulum 1984 terdiri atas 15 matapelajaran dimana 30 % nya adalah matapelajaran Agama dan selebihnya matapelajaran umum. Pada tingkat MTs, komposisi kurikulum terbagi menjadi tiga bagian; a) pendidikan dasar umum, b) pendidikan dasar akademik dan, c) pendidikan keterampilan, dari 16 matapelajaran yang diajarkan 5 diantaranya adalah rumpun matapelajaran agama seperti Qur'an Hadist, Akidah Akhlak, Fikih, Sejarah dan kebudayaan Islam serta Bahasa Arab. Sedangkan pada tingkat MA, struktur kurikulumnya berbeda antar tiap jurusannya, selain itu pada jenjang MA dibuka program MA-PK / Madrasah Aliyah Program Khusus dimana diberlakukan kurikulum khusus dengan komposisi matapelajaran didominasi oleh bidang studi agama. Integrasi madrasah dalam system pendidikan nasional menemukan bentuk dalam UUSPN tahun 1989 yang mana melalui UU Sistem Pendidikan nasional tersebut madrasah mengalami perubahan definisi dari yang awalnya sekolah agama menjadi sekolah umum yang bercirikan Islam (Nurhayati, 2013, p. 140).

D. Bentuk Struktur Kurikulum Madrasah

Sebagaimana amanat undang undang RI No 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional menyatakan bahwa pendidikan nasional memiliki fungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Atas dasar itu, Madrasah sebagai bagian dari system pendidikan nasional memiliki andil besar dalam usaha mewujudkan tujuan tersebut.

Dalam perkembangan kemajuan madrasah sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk Pengembangan Madrasah tahun 2010-2030 adalah mewujudkan madrasah yang unggul dan mampu berdaya saing (kompetitif) maka perlu disusunnya kurikulum yang terstandar. Semangat Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) menjadi modal utama peningkatan kualitas madrasah dengan tetap memperimbangkan kuantitas dan kualitas madrasah. Kurikulum madrasah sebagaimana tertuang dalam PMA 184 tahun 2019 disusun dengan tetap mempertimbangkan penguatan moderasi beragama, pendidikan karakter, pendidikan anti korupsi, penguatan budaya literasi dan pembentukan akhlak mulia peserta didik. Beberapa kurikulum madrasah mulai dari tingkat Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah dengan beberapa program keahlian khusus dijelaskan sebagai berikut:

1. Madrasah Ibtidaiyah/MI

Adapun struktur kurikulum pada jenjang Madrasah Ibtidaiyah mencakup:

Mata Pelajaran		Alokasi Waktu Per Pekan					
Kelompok A		I	II	III	IV	V	VI
1	Pendidikan Agama Islam						
	Al Qur'an Hadist	2	2	2	2	2	2
	Akidah-Akhlak	2	2	2	2	2	2
	Fikih	2	2	2	2	2	2
	Sejarah Kebudayaan Islam	-	-	2	2	2	2
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	5	5	6	4	4	4
3	Bahasa Indonesia	8	9	10	7	7	7

4	Bahasa Arab	2	2	2	2	2	2
5	Matematika	5	6	6	6	6	6
6	Ilmu Pengetahuan Alam	-	-	-	3	3	3
7	Ilmu Pengetahuan Sosial	-	-	-	3	3	3
Kelompok B							
1	Seni Budaya dan Prakarya	4	4	4	5	5	5
2	Pendidikan Jasmani, olahraga dan kesehatan	4	4	4	4	4	4
3	Muatan lokal	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	34	36	40	42	42	42

Sebagai keterangan, matapelajaran pada kelompok A adalah matapelajaran yang muatan serta acuanya dikembangkan secara langsung oleh pusat baik kemendikbud dan kementerian agama. adapun untuk kelompok B, adalah matapelajaran yang muatan serta acuanya dikembangkan secara langsung oleh pusat baik kemendikbud dan kementerian agama dan dapat dilengkapi oleh content yang bersifat local.

2. Kurikulum Madrasah Tsanawiyah/MTs

Struktur kurikulum pada jenjang MTs mencakup substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama tiga tahun mulai kelas VII hingga kelas IX.

Mata Pelajaran		Alokasi Waktu Per Pekan		
KELOMPOK A		I	II	III
1	Pendidikan Agama Islam			
	Al Qur'an Hadist	2	2	2

	Akidah-Akhlak	2	2	2
	Fikih	2	2	2
	Sejarah Kebudayaan Islam	2	2	2
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	3	3	3
3	Bahasa Indonesia	6	6	6
4	Bahasa Arab	3	3	3
5	Matematika	5	5	5
6	Ilmu Pengetahuan Alam	5	5	5
7	Ilmu Pengetahuan Sosial	4	4	4
8	Bahasa Inggris	4	4	4
KELOMPOK B				
1	Seni Budaya	3	3	3
2	Pendidikan Jasmani, olahraga dan kesehatan	3	3	3
3	Prakarya atau Informatika	2	2	2
4	Muatan lokal	-	-	-
	Jumlah	46	46	46

3. Kurikulum Madrasah Aliyah/MA

Struktur kurikulum Madrasah Aliyah program Peminatan MIPA:

Mata Pelajaran		Alokasi Waktu Per Pekan		
KELOMPOK A		I	II	III
1	Pendidikan Agama Islam			
	Al Qur'an Hadist	2	2	2
	Akidah-Akhlak	2	2	2

	Fikih	2	2	2
	Sejarah Kebudayaan Islam	2	2	2
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	2	2	2
3	Bahasa Indonesia	4	4	4
4	Bahasa Arab	4	2	2
5	Matematika	4	4	4
6	Sejarah Indonesia	2	2	2
7	Bahasa Inggris	3	3	3
KELOMPOK B				
1	Seni Budaya	2	2	2
2	Pendidikan Jasmani, olahraga dan kesehatan	2	2	2
3	Prakarya dan kewirausahaan	2	2	2
4	Muatan lokal	-	-	-
KELOMPOK C (PEMINATAN) Peminatan Akademik				
1	Matematika	3	4	4
2	Biologi	3	4	4
3	Fisika	3	4	4
4	Kimia	3	4	4
Mata Pelajaran Pilihan :				
Mata Pelajaran Pilihan Lintas Minat dan atau Pendalaman Minat dan atau Informatika		6	4	4
Jumlah		51	51	51

**Struktur kurikulum Madrasah Aliyah program
Peminatan IPS:**

Mata Pelajaran		Alokasi Waktu Per Pekan		
KELOMPOK A		I	II	III
1	Pendidikan Agama Islam			
	Al Qur'an Hadist	2	2	2
	Akidah-Akhlak	2	2	2
	Fikih	2	2	2
	Sejarah Kebudayaan Islam	2	2	2
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	2	2	2
3	Bahasa Indonesia	4	4	4
4	Bahasa Arab	4	2	2
5	Matematika	4	4	4
6	Sejarah Indonesia	2	2	2
7	Bahasa Inggris	3	3	3
KELOMPOK B				
1	Seni Budaya	2	2	2
2	Pendidikan Jasmani, olahraga dan kesehatan	2	2	2
3	Prakarya dan kewirausahaan	2	2	2
4	Muatan lokal	-	-	-
KELOMPOK C (PEMINATAN) Peminatan Akademik				
1	Geografi	3	4	4
2	Sejarah	3	4	4
3	Sosiologi	3	4	4
4	Ekonomi	3	4	4

Mata Pelajaran Pilihan :			
Mata Pelajaran Pilihan Lintas Minat dan atau Pendalaman Minat dan atau Informatika	6	4	4
Jumlah	51	51	51

Dilihat dari susunanya, kurikulum pada program peminatan khususnya kelompok matapelajaran A dan B secara umum memiliki kesamaan, yang membedakan adalah pada matapelajaran peminatan yang tercantum dalam Kelompok C.

Matapelajaran pada kelompok C sesuai jenis peminatannya sebagai berikut:

Struktur Kurikulum MA Peminatan Bahasa dan Budaya,

KELOMPOK C (PEMINATAN)				
Peminatan Akademik:				
1	Bahasa dan Sastra Indonesia	3	4	4
2	Bahasa dan Sastra Inggris	3	4	4
3	Bahasa dan Sastra Asing Lainnya	3	4	4
4	Antropologi	3	4	4

Struktur Kurikulum MA Peminatan Keagamaan, meliputi:

KELOMPOK C (PEMINATAN)				
Peminatan Akademik:				
1	Ilmu Tafsir	2	2	2
2	Ilmu Hadis	2	3	3
3	Ushul Fikih	2	3	3
4	Bahasa Arab	2	3	3

9. Struktur Kurikulum MAN Program Keagamaan (MAN-PK), meliputi:

Mata Pelajaran		Alokasi Waktu Perpekan		
KELOMPOK A (UMUM)		X	XI	XII
1	Pendidikan Agama Islam			
	a. Al Qur'an Hadis	4	4	4
	b. Akidah Akhlak	4	4	4
	c. Fikih	2	2	2
	d. Sejarah Kebudayaan Islam	2	2	2
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	2	2	2
3	Bahasa Indonesia	4	4	4
4	Bahasa Arab	4	2	2
5	Matematika	4	4	4
6	Sejarah Indonesia	2	2	2
7	Bahasa Inggris	3	3	3
KELOMPOK B (UMUM)				
1	Seni Budaya	2	2	2
2	Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	2	2	2
3	Prakarya dan Kewirausahaan	2	2	2
4	Muatan Lokal*)	-	-	-
KELOMPOK C (PEMINATAN)				
Peminatan Akademik:				
1	Ilmu Tafsir	2	2	2
2	Ilmu Hadis	2	3	3
3	Ushul Fikih	2	3	3
4	Bahasa Arab	2	3	3
Mata Pelajaran Pilihan:				
1. Mata Pelajaran Pilihan Lintas Minat dan/atau Informatika		6	4	4
2. Pendalaman Minat Keagamaan		6	6	6
Jumlah		57	57	57

Catatan:

1. Mata pelajaran Al-Quran Hadis pada MA Peminatan Keagamaan terdiri dari konten Tafsir dan Hadis masing-masing 2 jam pelajaran;
2. Mata pelajaran Akidah Akhlak pada MA Peminatan Keagamaan terdiri dari konten Ilmu Kalam dan Akhlak Tasawuf masing-masing 2 jam pelajaran.

Struktur Kurikulum MA Akademik, meliputi:

Mata Pelajaran		Alokasi Waktu Perpekan		
KELOMPOK A (UMUM)		X	XI	XII
1	Pendidikan Agama Islam			
	a. Al-Qur'an Hadis	2	2	2
	b. Akidah Akhlak	2	2	2
	c. Fikih	2	2	2
	d. Sejarah Kebudayaan Islam	2	2	2
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	2	2	2
3	Bahasa Indonesia	4	4	4
4	Bahasa Arab	4	2	2
5	Matematika	4	4	4
6	Sejarah Indonesia	2	2	2
7	Bahasa Inggris	3	3	3
KELOMPOK B (UMUM)				
1	Seni Budaya	2	2	2
2	Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	2	2	2
3	Prakarya dan Kewirausahaan	2	2	2
4	Muatan Lokal	-	-	-
KELOMPOK C (PEMINATAN)				
Peminatan Akademik:		12	16	16
Mata Pelajaran Pilihan:				
1.	Mata Pelajaran Pilihan Lintas Minat dan/atau Pendalaman Minat dan/atau Informatika	6	4	4
2.	Pendalaman Minat Akademik	6	6	6
Jumlah		57	57	57

Struktur Kurikulum MA Plus Keterampilan, meliputi:

Mata Pelajaran		Alokasi Waktu Perpekan		
KELOMPOK A (UMUM)		X	XI	XII
1	Pendidikan Agama Islam			
	a. Al-Qur'an Hadis	2	2	2
	b. Akidah Akhlak	2	2	2
	c. Fikih	2	2	2
	d. Sejarah Kebudayaan Islam	2	2	2
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	2	2	2
3	Bahasa Indonesia	4	4	4
4	Bahasa Arab	4	2	2
5	Matematika	4	4	4
6	Sejarah Indonesia	2	2	2
7	Bahasa Inggris	3	3	3
KELOMPOK B (UMUM)				
1	Seni Budaya	2	2	2
2	Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	2	2	2
3	Prakarya dan Kewirausahaan	2	2	2
4	Muatan Lokal	-	-	-

KELOMPOK C (PEMINATAN)			
Peminatan Akademik:	12	16	16
Mata Pelajaran Pilihan:			
1. Mata Pelajaran Pilihan Lintas Minat dan/atau Pendalaman Minat dan/atau Informatika	6	4	4
2. Keterampilan	6	6	6
Jumlah	57	57	57

Keterangan

1. Mata pelajaran Kelompok A merupakan kelompok mata pelajaran yang muatan dan acuannya dikembangkan oleh pusat.
2. Mata pelajaran Kelompok B merupakan kelompok mata pelajaran yang muatan dan acuannya dikembangkan oleh pusat dan dapat dilengkapi dengan muatan/konten lokal.
3. Mata pelajaran Kelompok B dapat berupa mata pelajaran muatan lokal yang berdiri sendiri.
4. Satu jam pelajaran beban belajar tatap muka adalah 45 (empat puluh lima) menit.
5. Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan dapat memuat konten lokal.
6. Muatan Lokal dapat memuat Bahasa Daerah dan/atau kearifan lokal atau mata pelajaran lain yang menjadi kekhasan/keunggulan madrasah terdiri atas maksimal 3 (tiga) mata pelajaran dengan jumlah maksimal 6 (enam) jam pelajaran.
7. Mata pelajaran Keterampilan merupakan mata pelajaran pilihan bagi peserta didik yang berminat pada program keterampilan.

Struktur Kurikulum MAK:

1. Struktur Kurikulum MAK secara umum, meliputi:

Mata Pelajaran		Alokasi Waktu Perpekan		
KELOMPOK A (UMUM)		X	XI	XII
1	Pendidikan Agama Islam			
	a. Al-Qur'an Hadis	2	2	2
	b. Akidah-Akhlak	2	2	2
	c. Fikih	2	2	2
	d. Sejarah Kebudayaan Islam	2	2	2
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	2	2	2
3	Bahasa Indonesia	4	4	4
4	Bahasa Arab	4	2	2
5	Matematika	4	4	4
6	Sejarah Indonesia	2	2	2
7	Bahasa Inggris	3	3	3
KELOMPOK B (UMUM)				
1	Seni Budaya	2	2	2
2	Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	2	2	2
3	Prakarya dan Kewirausahaan	2	2	2
4	Muatan Lokal	-	-	-
KELOMPOK C (PEMINATAN)				
Kejuruan				
1	Mata Pelajaran Peminatan Akademik dan Vokasi (MAK)	24	24	24
Jumlah		57	55	55

BAB VI

MODEL MODEL PENGEMBANGAN KURIKULUM

Model pada dasarnya berkaitan dengan rancangan yang dapat digunakan untuk menerjemahkan sesuatu ke dalam realitas, yang sifatnya lebih praktis. Model berfungsi sebagai sarana untuk mempermudah komunikasi, sebagai petunjuk yang bersifat perspektif untuk mengambil keputusan, dan sebagai petunjuk perancangan untuk kegiatan pengelolaan.

Pengembangan kurikulum penting untuk meningkatkan keberhasilan system pendidikan secara menyeluruh. Sekolah yang tidak kreatif dan inovatif dalam pengembangan kurikulum akan semakin tertinggal dan ditinggal oleh peserta didik dan masyarakat dunia kerja. kurikulum merupakan jantungnya dunia pendidikan. Untuk itu, kurikulum perlu dirancang dan disempurnakan untuk meningkatkan mutu pendidikan secara nasional dan meningkatkan mutu sumber daya manusia Indonesia, sehingga bangsa Indonesiamemiliki daya saing dengan negara lain.

Pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan kurikulum agar menghasilkan rencana kurikulum yang luas dan spesifik. Proses ini berhubungan dengan seleksi dan pengorganisasian berbagai komponen dan situasi belajar mengajar, antara lain penetapan jadwal pengorganisasian kurikulum dan spesifik yang disarankan, mata pelajaran kegiatan, sumber dan alat pengukur pengembangan kurikulum yang mengacu pada kreasi sumber sumber unit,

rencana unit dan garis pelajaran kurikulum ganda lainnya, untuk memudahkan proses belajar mengajar.

Beberapa ide yang mendasari pengembangan kurikulum didapat dari (1) adanya perubahan dalam pengembangan visi, misi, tujuan dan sasaran yang diemban, (2) perubahan ilmu dan teknologi yang semakin cepat, (3) hasil evaluasi terhadap kurikulum sebelumnya, (4) perubahan kebutuhan *stakeholders*, (5) pandangan atau saran dari para pakar atau ahli, (6) tuntutan dunia global dan lain sebagainya.

Dapat disimpulkan bahwa model pengembangan kurikulum adalah pola, rancangan, konsep yang menggambarkan proses dan prosedur suatu kurikulum untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan pendidikan.

Model pengembangan kurikulum adalah model yang digunakan untuk mengembangkan suatu kurikulum, dimana pengembangan kurikulum dibutuhkan untuk memperbaiki atau menyempurnakan kurikulum yang dibuat untuk dikembangkan sendiri baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah atau sekolah. Pengembangan kurikulum tidak lepas dari beberapa aspek yang mempengaruhinya seperti cara berpikir, sistem nilai-nilai moral, keagamaan, politik, budaya dan sosial proses pengembangan, kebutuhan peserta didik, kebutuhan masyarakat maupun arah program pendidikan. Aspek-aspek tersebut akan menjadi bahan yang perlu dipertimbangkan secara matang-matang. Model pengembangan kurikulum merupakan suatu prosedur dalam rangka mendesain, menerapkan, dan mengevaluasi suatu kurikulum. Berikut akan dijabarkan model kurikulum menurut beberapa ahli:

A. Model Pengembangan Menurut Ralph Tyler

Ralph Tyler lahir pada 22 april 1902 di Chicago, Tyler merupakan seorang pendidik dari Amerika yang bekerja dibidang penilaian dan evaluasi. Ia mendapat jabatan di sejumlah badan yang menetapkan pedoman untuk mempengaruhi kebijakan dan yang mendasari lahirnya Undang-Undang Pendidikan Dasar dan tahun 1965 di Amerika. Tyler membagi aktivitasnya, pada siang hari bersekolah, dan malam harinya ia bekerja sebagai operator telegram kereta api. Ia menerima gelar sarjana pada tahun 1921 saat usia 19 tahun dari Doana Collega di Kreta, Nebraska. Aktivitas pertama mengajarnya sebagai guru sekolah tinggi di Pierre, south Dakota. Kemudian ia memperoleh gelar master dari universitas Nebraska pada tahun 1923 dan gelar Ph. D. dari Universitas Chicago pada tahun 1927.

Sebagai bapak pengembangan kurikulum, Tyler telah menanamkan atas perlunya hal yang rasional, sistematis, dan pendekatan yang berarti dalam tugas mereka. Tetapi pendapat Tyler dipandang rendah oleh beberapa penulis sebelumnya.

Beberapa penulis lain berpendapat bahwa Tyler tidak menjelaskan sumber tujuan dengan memadai. Tetapi, sebenarnya Tyler telah membahas hal itu dalam sebuah buku utuh. Tyler telah menguraikan dan menganalisis sumber-sumber tujuan yang datang dari anak didik, mempelajari kehidupan kontemporer, mata pelajaran yang bersifat akademik, filsafat, dan psikologi belajar. Walaupun demikian, Tyler tidak menyebutkan langkah-langkah konkret dalam pengembangan kurikulum. Tyler hanya memberikan dasar-

dasarnya saja. Model pengembangan kurikulum ini dapat dilihat pada tahapan berikut:

1. *Objectives* (menentukan tujuan pendidikan yang diharapkan).

Dalam menentukan tujuan pendidikan melalui langkah-langkah sebagai berikut; mempelajari siswa sebagai sumber tujuan, mempelajari kehidupan kontemporer di lingkungan masyarakat, penentuan tujuan berdasarkan tinjauan filosofis, peninjauan tujuan berdasarkan tinjauan psikologis.

2. *Selecting Learning Experiences* (menentukan pengalaman belajar yang akan diperoleh guna mencapai tujuan yang dimaksud).

Ada beberapa prinsip pengalaman belajar; memberikan kesempatan pada siswa untuk berbuat tingkah laku yang menjadi tujuan, pengalaman belajar harus menyenangkan bagi siswa, siswa harus terlibat dalam belajar, diberikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan pendidikan, pengalaman belajar yang disediakan dapat memberikan beberapa kemampuan.

Setelah mengidentifikasi beberapa buah tujuan umum, perencana merifinnya dengan cara menyaring melalui dua saringan, yaitu filosofi pendidikan dan psikologi belajar. Hasilnya akan menjadi Tujuan pembelajaran khusus dan meyebutkannya juga pendidikan sekolah dan filosofi masyarakat sebagai saringan pertama untuk tujuan ini.

Selanjutnya perlu disusun garis-garis besar nilai-nilai yang didapat dan mengilustrasikannya dengan

memberi tekanan pada empat tujuan demokratis. Untuk melaksanakan penyaringan, para pendidik harus menjelaskan prinsip-prinsip belajar yang baik, dan psikologi belajar memberikan ide mengenai jangka waktu yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan waktu untuk melaksanakan kegiatan secara efisien. Tyler pun menyarankan agar pendidik memberi perhatian kepada cara belajar yang dapat:

- a. Mengembangkan kemampuan berpikir
 - b. Menolong dalam memperoleh informasi
 - c. Mengembangkan sikap masyarakat
 - d. Mengembangkan minat
 - e. Mengembangkan sikap kemasyarakatan
3. *Organizing Learning Experiences* (mengorganisasi pengalaman belajar yang akan diberikan).
 4. *Evaluation* (Mengevaluasi efektivitas pengalaman belajar guna mengetahui tujuan pendidikan telah dicapai).

Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui hasil belajar siswa sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan mengetahui.

Sehubungan dengan hal tersebut Tyler (1949) memperingatkan agar dibedakan antara konten (isi) pelajaran atau kegiatan-kegiatan belajar dengan pengalaman-pengalaman belajar, karena pengalaman belajar merupakan pengalaman yang diperoleh dan dialami anak-anak didik sebagai hasil belajar dan interaksi mereka dengan konten (isi) dan kegiatan belajar. Untuk mengembangkan pengalaman belajar yang mereka peroleh harus bermuara pada pemberian pengalaman

para pelajar yang dirancang dengan baik dan dilaksanakan dengan benar. Dari beberapa konsepsi kurikulum diatas kelihatan bahwa kurikulum dapat dilihat dari segi yang sempit atau dari segi yang luas (sebagai pengalaman yang diperoleh di sekolah atau diluar sekolah).

B. Model Pengembangan Kurikulum Menurut Hylda Taba

Proses pengembangan kurikulum menurut Taba dapat dilakukan dengan lima langkah. Dimulai dengan mengadakan unit-unit eksperimen bersama guru-guru. Di dalam unit ini diadakan studi yang seksama tentang hubungan antara teori dan praktik. Perencanaan didasarkan atas dasar teori yang kuat, dan pelaksanaan eksperimen di dalam kelas menghasilkan data-data yang digunakan untuk menguji landasan teori yang digunakan.

Ada delapan langkah yang digunakan dalam kegiatan unit eksperimen menurut Taba yaitu; mendiagnosis kebutuhan, merumuskan tujuan-tujuan khusus, memilih isi, mengorganisasi isi, memilih pengalaman belajar, mengevaluasi, melihat sekuen, dan keseimbangan.

Selanjutnya menguji unit eksperimen, kegiatan ini dilaksanakan tidak hanya pada kelas eksperimen tetapi diuji juga pada kelas atau tempat lain sehingga dapat diketahui tingkat validitas dan juga dapat memperoleh data untuk penyempurnaan. Setelah melakukan penyempurnaan atau revisi juga diadakan konsolidasi. Pada kegiatan ini dilakukan penarikan kesimpulan yang bersifat umu, karena hasil dari kesimpulan tersebut belum tentu bisa digunakan di sekolah lain.

Setelah melakukan penarikan kesimpulan, dilaksanakan pengkajian oleh ahli kurikulum, tujuannya untuk mengetahui konsep yang digunakan sesuai atau tidak. Kemudian kurikulum diterapkan di daerah yang lebih luas tidak hanya di sekolah yang dilakukan eksperimen. Sehingga dengan langkah ini dapat diketahui masalah yang dihadapi, baik yang berkaitan dengan pendidikan, fasilitas, hingga pembiayaan.

Taba menggunakan pendekatan akar rumput bagi perkembangan kurikulum. Taba percaya kurikulum harus dirancang oleh guru dan bukan diberikan oleh pihak berwenang. Menurut Taba guru harus memulai proses dengan menciptakan suatu unit belajar mengajar khusus bagi murid-murid mereka di sekolah dan bukan terlibat dalam rancangan suatu kurikulum umum.

Pada beberapa buku karya Hilda Taba yang paling terkenal dan besar pengaruhnya adalah *Curriculum Development: Theory and Practice* (1962). Dalam buku ini, Hilda Taba mengungkapkan pendekatannya untuk proses pengembangan kurikulum. Dalam pekerjaannya itu, Taba mengindetifasikan model dasar Tayler agar lebih representatif terhadap pengembangan kurikulum di berbagai sekolah. Model pengembangan kurikulum ini oleh Hilda Taba ini berbeda dengan lazimnya yang banyak ditempuh secara yang bersifat deduktif karena caranya induktif. Oleh Karena itu sering disebut "Model Terbalik" atau "*Inverted Model*".

Pengembangan kurikulum model ini diawali dengan melakukan percobaan, penyusunan teori, dan kemudian baru ditetapkan. Hal itu diharapkan dimaksudkan untuk lebih mempertemukan antara teori dan praktik, serta menghilangkan

sifat keumuman dan keabstrakan yang terjadi dalam kurikulum yang dilakukan tanpa kegiatan percobaan.

Dalam pendekatannya, Taba menganjurkan untuk lebih mempunyai informasi tentang masukan (input) pada proses setiap langkah proses kurikulum, secara khusus, Taba menganjurkan untuk menggunakan pertimbangan ganda terhadap isi (organisasi kurikulum yang logis) dan individu pelajar (psikologis kurikulum).

Untuk memperkuat pendapatnya, Taba mengkalim bahwa semua kurikulum disusun dari elemen-elemen dasar. Suatu kurikulum bisanya berisi seleksi dan organisasi isi; itu merupakan manifestasi atau implikasi dari bentuk-bentuk (patterns) belajar dan mengajar. Kemudian, suatu program evaluasi dari hasil pun akan dilakukan.

Taba percaya bahwa esensial proses deduktif ini cenderung untuk mengurangi kemungkinan-kemungkinan inovasi kreatif, sebab membatasi kemungkinan mengeksperimentasikan konsep-konsep baru kurikulum. Taba menyatakan bahwa :

1. Bila perubahan nilai dari mendesain ulang kerangka yang menyeluruh maka sebelumnya harus ditetapkan lebih dahulu suatu pola yang akan dipelajari dan diuji.
2. Panitia penyusunan kurikulum yang tradisional itu dapat menduduki rencana-rencana kurikulum yang bermanfaat, bagian dari desain itu sendiri hanya atas dasar logika bukan empiric.
3. Karena mereka tidak melakukan pengujian secara empirik, kurikulum yang dihasilkan cenderung merupakan skema / sket bagan yang sangat umum dan abstrak dan sedikit membantu untuk melaksanakan praktek instruksional.

Ketiga masalah tersebut menunjukkan efesiensi perekrayaan kurikulum yang tradisional dan kesenjangan antara teori dan praktek. Suatu contoh adanya disfungsi dalam teori praktek terdapat pada core kurikulum yang dirancang untuk mengajukan (1) Integrasi isi / materi, (2) Hubungan dengan kebutuhan siswa-Jalannya praktek core tersebut umumnya hanya merupakan reorganisasi administratif, block of time mata ajaran-mata ajaran yang terpisah-pisali, dan dimana masalah-masalah kehidupan terisolasi dari materi (content) yang valid. Bentuk core yang dilaksanakan berdasarkan rekayasa deduktif menghasilkan pemisahan teori dan praktek

Taba mengajukan pandangan yang berlawanan dengan urutan tradisional dengan mengembangkan inverted model, yakni: langkah awal dimulai dari perencanaan unit-unit mengajar-belajar yang spesifik oleh para guru, bukan diawali aengan desain kerangka (*framework*) yang umum. Urut-unit tersebut diuji / dilaksanakan dalam kelas, yang ada pada gilirannya digunakan sebagai dasar empirik untuk menentukan desain yang menyeluruh (*overall design*). Keuntungan digunakannya inverted sequence ini ialah:

1. Membantu untuk menjembatani kesenjangan antara teori dan praktek karena produksi unit-unit tadi mengkombinasikan kemampuan teoritik dan pengalaman praktis.
2. Kurikulum yang terdiri dari unit-unit mengajar-belajar yang disiapkan oleh guru-guru lebih mudah diintroduser ke sekolah, berarti lebih mudah dimengerti dibandingkan dengan kurikulum yang umum dan abstrak yang dihasilkan oleh umtan tradisional.

3. Kurikulum yang terdiri dari kerangka umum dan unit-unit belajar-mengajar lebih berpengaruh terhadap praktek kelas dibandingkan dengan kurikulum yang ada.

Langkah-langkah pengembangan kurikulum Hilda Taba (1962) mengemukakan perencanaan kurikulum terdiri atas 5 langkah berurutan, ialah :

1. Langkah Pertama, ***Experimental Production of Pilot Units.***

Kelompok tenaga pengajar membuat unit eksperimen sebagai ajang untuk melakukan studi tentang hubungan teori dan praktek. Untuk itu diperlukan (1) Perencanaan yang didasarkan atas teori yang kuat (2) Eksperimen didalam kelas yang dapat menghasilkan data empiris untuk menguji landasan teori yang digunakan. Hasil dari langkah ini berupa teaching-learning unit yang masih bersifat draft yang siap diuji pada langkah berikutnya. Unit eksperimen ini dirancang melalui delapan kegiatan sebagai berikut :

- a. Diagnosing needs

Tenaga pengajar mengidentifikasi masalah-masalah, kondisi, kesulitan serta kebutuhan-kebutuhan siswa dalam suatu proses pengajaran. Lingkup diagnosis tergantung pada latar belakang program yang akan direvisi, termasuk didalamnya tujuan konteks dimana program tersebut difungsikan.

- b. Formulating Specific Objectives

Formulasi tujuan-tujuan khusus, sebagai penjabaran dari tujuan umum yang dimuskan berdasarkan kebutuhan-kebutuhan yang telah diidentifikasi

yang menjadi titik berat pada teaching learning unit. Namun demikian tidak semua tujuan khusus tersebut dapat tercapai oleh masing-masing imit.

c. Selecting Content

Pemilihan isi (materi) berdasarkan kesepadanan dengan tujuan khusus, dan harus mempertimbangkan tingkat validitas dan signifikannya. Karena itu perlu dilakukan seleksi terhadap tingkatan isi (materi) yang meliputi pemilihan topik utama, pemilihan ide-ide dasar dan pemilihan materi khusus.

d. Organizing Content

Pengorganisasian materi dilakukan berdasarkan tingkat kemampuan awal serta minat siswa. Pengorganisasian isi disusun dari konkrit keabstrak dan dari mudah ke sulit.

e. Selecting Learning Experiences (Activities)

Pengalaman belajar disusun dengan maksud terjadi interaksi antara siswa dan materi pelajaran. Karena setiap materi memiliki beberapa fungsi tertentu.

f. Organizing Learning Experiences Activities

Pengalaman belajar siswa disusun dan diorganisasikan dengan sekuensi dan organisasi materi (*content*). Kegiatan belajar siswa diarahkan dari induktif kegeneralisasi dan abstraksi serta difokuskan pada pengembangan ide-ide utama, langkah-langkah perolehan konsep dan perilaku yang baik

g. Evaluating

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan unit oleh siswa. Hasil evaluasi

berguna untuk menentukan tujuan, diagnosis kesulitan belajar, serta penilaian dalam rangka pengembangan dan revisi kurikulum.

h. Checking for Balance and Sequence

Setelah garis besar teaching learning dirancang lengkap, selanjutnya perlu dicek konsistensi antara semua bagian yang berkenaan dengan keseimbangan dan urutan topik-topik yang telah tersusun atau unsur-unsur dalam unit tersebut.

2. Langkah Kedua, *Testing of Experimental Units*

Teaching-learning units yang dihasilkan pada langkah pertama perlu diujicobakan di kelas-kelas eksperimen pada berbagai situasi dan kondisi belajar. Pengujian dilakukan untuk mengetahui tingkat validitas dan keyakinan terap bagi tenaga pengajar yang berbeda-beda gaya mengajar dan kemampuan melaksanakan pengajaran unit. Hasil uji coba menjadi masukan bagi penyempumaan draft kurikulum.

3. Langkah Ketiga, *Revising dan Consolidating*

Revisi dan penyempumaan draft teaching learning units dilakukan berdasarkan data dan informasi yang terkumpul selama langkah pengujian. Pada langkah ini dilakukan pula penarikan kesimpulan (konsolidasi) tentang konsistensi teori yang digunakan. Langkah ini dilakukan bersama oleh koordinator kurikulum dan ahli kurikulum. Produk langkah ini berupa teaching learning units yang telah teruji di lapangan. Bila hasilnya sudah memadai, maka unit-unit tersebut dapat disebarakan dalam lingkup yang lebih luas.

4. Langkah Keempat *Developing a Framework*

Pengembangan ini dilakukan oleh ahli kurikulum dan para professional kurikulum lainnya. Produk dari langkah-langkah ini adalah dokumen kurikulum yang siap untuk diimplementasikan dan diidentifikasi.

5. Langkah Keempat, *Instalation and Desimination of The New Unit*

Instalasi dan desiminasi adalah peresmian dan penyebarluasan kurikulum hasil pengembangan, sebagai sub sistem pada sistem sekolah secara menyeluruh. Tanggung jawab tahap ini dibebankan pada administrator sekolah. Penerapan kurikulum merupakan tahap yang ditempuh dalam kegiatan pengembangan kurikulum. Pada tahap ini harus diperhatikan berbagai masalah seperti kesiapan tenaga pengajar untuk melaksanakan kurikulum di kelasnya, penyediaan fasilitas pendukung yang memadai, alat atau bahan yang diperlukan dan biaya yang tersedia, semuanya perlu mendapat perhatian dalam penerapan kurikulum agar tercapai hasil optimal.

C. Model Pengembangan Kurikulum Menurut DK Wheeler

Pendekatan yang digunakan Wheeler dalam pengembangan kurikulum memiliki bentuk rasional. Setiap langkah merupakan pengembangan secara logis terhadap yang terdahulu, lebih umum mengerjakan suatu langkah tertentu tidak dapat dilakukan sebelum langkah-langkah sebelumnya dilakukan.

Hal ini dapat dilihat dari 5 langkah berikut yang tampak sekali bahwa elemen-elemen yang dipakai merupakan

perkembangan daripada elemen dari Tyler dan Taba, tapi dipresentasikan dengan acak dan agak berbeda. Berikut langkah-langkah model pengembangan kurikulum Wheeler:

1. Seleksi maksud, tujuan dan sasaran.
2. Seleksi pengalaman belajar untuk membantu mencapai maksud, tujuan dan saran.
3. Seleksi isi melalui tipe-tipe tertentu dari pengalaman yang mungkin ditawarkan.
4. Organisasi dan integrasi dari pengalaman belajar dan isi yang berkenaan dengan proses belajar mengajar.
5. Evaluasi dari setiap fase atau masalah tujuan-tujuan.

Kontribusi Wheeler terhadap pengembangan kurikulum adalah untuk menekankan hakikat lingkaran daripada elemen-elemen kurikulum. Proses kurikulum tampak lebih sederhana memberikan suatu indikator bahwa langkah-langkah lingkaran bersifat kontinu atau berkelanjutan memiliki makna responsif terhadap perubahan-perubahan pendidikan yang ada. Pendapat Wheeler tentang proses kurikulum menekankan pada saling ketergantungan antara satu elemen terhadap elemen kurikulum lain, dan telah menempatkan tes dengan waktu yang baik.

Dalam bukunya yang cukup berpengaruh, *Curriculum Process*, Wheeler (1967) mempunyai argumen tersendiri pengembangan kurikulum (*curriculum developers*) dapat menggunakan suatu proses melingkar (*a cycle process*), yang namanya setiap elemen saling berhubungan dan bergantung.

Pendekatan yang digunakan Wheeler dalam pengembangan kurikulum pada dasarnya memiliki bentuk

rasional. Setiap langkah kurikulum pada dasarnya memiliki bentuk rasional. Setiap langkah (phase) nya merupakan pengembangan secara logis terhadap model sebelumnya, di mana secara umum langkah tidak dapat dilakukan sebelum langkah-langkah sebelumnya telah diselesaikan. Sebagai mantan akademisi University of Western Australia, Wheeler mengembangkan ide-idenya sebagaimana yang telah dilakukan oleh Tyler dan Taba. Wheeler menawarkan lima langkah itu jika dikembangkan dengan logis temporer, akan menghasilkan suatu kurikulum yang efektif. Dari lima langkahnya ini, sangat tampak bahwa Wheeler mengembangkan lebih lanjut apa yang telah dilakukan Tyler dan Taba meski hanya dipresentasikan agak berbeda.

Langkah-langkah atau phases Wheeler (*Wheeler's phases*) adalah: ***Selection of aims, goals, and objectives (seleksi maksud, tujuan, dan sasarannya)*** ***Selection of learning experiences to help achieve these aims, goals and objectives*** (seleksi pengalaman belajar untuk membantu mencapai maksud, tujuan, dan sasaran.)

1. *Selection of content through which certain types of experiences may be offered* (Seleksi isi melalui tipe-tipe tertentu dari pengalaman yang mungkin ditawarkan).
2. *Organization and intergration of learning experiences and content with respect to the teaching learning process* (organisasi dan integrasi pengalaman belajar dan isi yang berkenaan dengan proses belajar dan mengajar).
3. *Evaluation of each phase and the problem of goals* (evaluasi setiap fase dan masalah-masalah tujuan).

D. Model Pengembangan Kurikulum Menurut Beauchamp

Dalam model Beauchamp (1986) mengemukakan lima hal dalam proses pengembangan kurikulum sebagai berikut. (Abdurrahman dan Farida Herna Astuti, 2018: 480-481):

1. Menetapkan wilayah atau area yang akan melakukan perubahan kurikulum. Wilayah itu bisa terjadi hanya pada suatu sekolah atau madrasah, satu kecamatan, kabupaten atau kota atau mungkin tingkat provinsi atau tingkat nasional. Penetapan arena ini ditentukan oleh wewenang yang dimiliki oleh pengambil kebijakan dalam pengembangan kurikulum.
2. Menetapkan personalia, yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengembangan kurikulum. Pihak-pihak yang harusnya dilibatkan dalam proses pengembangan kurikulum itu terdiri dari para ahli pendidikan termasuk di dalamnya para guru yang dianggap berpengalaman, seorang profesional dan tenaga lain dalam bidang pendidikan seperti pustakawan, laboran, konsultan pendidikan. Para profesional dalam bidang lain seperti tokoh masyarakat, politisi, industriawan, dan pengusaha. Dalam proses pengembangan kurikulum, semua kelompok yang perlu dirumuskan tugas dan peranannya secara jelas.
3. Menetapkan organisasi dan prosedur yang akan ditempuh yaitu dalam hal merumuskan tujuan umum (standar kompetensi) dan tujuan khusus (kompetensi dasar), memilih isi dan pengalaman belajar dan menentukan evaluasi. Keseluruhan prosedur tersebut dapat dibagi ke

dalam lima langkah yaitu; membentuk tim pengembangan kurikulum, melakukan penilaian terhadap kurikulum yang sedang berjalan, melakukan studi atau penjajakan tentang penentuan kurikulum baru, merumuskan kriteria dan alternatif pengembangan kurikulum, menyusun dan menulis kurikulum yang dikehendaki.

4. Implementasi kurikulum, pada tahapan ini perlu disiapkan secara matang berbagai hal yang dapat berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap aktivitas penggunaan kurikulum seperti pemahaman guru tentang kurikulum, sarana atau fasilitas yang tersedia dalam manajemen sekolah.
5. Melaksanakan evaluasi kurikulum yang menyangkut; evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum oleh guru-guru di sekolah, evaluasi terhadap desain kurikulum, evaluasi keberhasilan siswa, dan evaluasi dari keseluruhan sistem kurikulum.

Dalam model ini melibatkan para ahli dan tokoh pendidikan yang berpengaruh pada pengembangan kurikulum baik secara langsung maupun tidak. Penyesuaian ini disesuaikan dengan tingkat dan luas wilayah. Sebagaimana untuk tingkat provinsi dan nasional tidak begitu melibatkan guru. Sebaliknya untuk tingkat di bawahnya seperti kabupaten, kecamatan, dan sekolah keterlibatan guru lebih besar dalam pengembangan kurikulum. Langkah ini berkenaan dengan prosedur yang harus ditempuh dalam perumusan tujuan umum dan tujuan khusus, memilih isi dan pengalaman belajar serta kegiatan evaluasi, dan dalam menentukan keseluruhan desain kurikulum. Selanjutnya mengimplementasikan kurikulum dan mengevaluasi.

BAB VII

MACAM-MACAM KONSEP KURIKULUM

Pendidikan dan kurikulum merupakan dua hal yang tidak terpisahkan. Proses belajar mengajar di satuan pendidikan tidak terlepas dari kurikulum sebagai salah satu komponen pentingnya. Kurikulum dengan berbagai fungsi dan perannya dalam proses tersebut memberikan arah, pedoman proses dan kualifikasi lulusan.

Ruang lingkup kurikulum mulai dari kelas, satuan pendidikan, wilayah sampai kurikulum nasional. Berdasarkan hal ini, semua pihak mempunyai peran dan kepentingannya terhadap kurikulum. Harapan bahwa proses pendidikan akan melahirkan generasi yang lebih baik akan tercapai dengan menerapkan kurikulum yang sesuai dalam proses pembelajaran.

Kurikulum dalam semua lingkungannya merujuk pada kurikulum nasional. Kurikulum nasional dikembangkan selaras dengan tujuan nasional dari suatu Negara. Kurikulum suatu Negara sangat mungkin berbeda satu sama lain, pengembangannya juga sangat beragam sesuai dengan kebutuhannya masing-masing

Pengembangan kurikulum menurut Seller (Sanjaya: 2013) berorientasi pada enam hal yaitu: (1) Tujuan pendidikan mengenai arah kegiatan proses pendidikan; (2) Pandangan tentang anak, anak dipandang sebagai suatu yang aktif atau pasif; (3) Pandangan tentang proses pembelajaran, proses belajar mengajar sebagai suatu proses transformasi ilmu

pengetahuan ataukah sebagai proses mengubah perilaku; (4) Pandangan tentang lingkungan, lingkungan akan dikelola secara formal berdasarkan langkah tertentu atau akan dikelola secara bebas; (5) Pandangan tentang guru, konsep guru sebagai instruktur atau sebagai fasilitator; (6) Evaluasi belajar, evaluasi mengukur suatu keberhasilan akan diperoleh melalui tes atau nontes.

Sedangkan menurut Sukmadinata (1997) konsep kurikulum berkembang sesuai dengan perkembangan teori dan praktek pendidikan serta aliran pendidikan yang mendasarinya. Lebih lanjut Sukmadinata mengemukakan bahwa minimal ada empat teori pendidikan yang banyak menjadi bahasan para ahli pendidikan yang dipandang menjadi dasar pelaksanaannya. Keempat teori pendidikan tersebut yaitu teori pendidikan klasik, pendidikan pribadi, pendidikan interaksional dan pendidikan teknologi.

Aliran pendidikan berdasarkan pada pandangan terkait guru, siswa, isi dan proses pendidikan. Empat aliran pendidikan ini memiliki perbedaan dalam konsep kurikulum dan praktik pendidikannya. Konsep kurikulum akademik berdasarkan pada aliran pendidikan klasik. Konsep kurikulum humanistik berdasarkan pada teori pendidikan pribadi. Konsep kurikulum rekonstruksi sosial berdasarkan pada aliran pendidikan interaksionis. Konsep kurikulum teknologi berdasarkan pada aliran pendidikan teknologi.

A. Kurikulum Akademik

Kurikulum akademik berdasarkan pada aliran pendidikan klasik. Kurikulum ini merupakan konsep kurikulum yang pertama ada, tetapi sekarang masih juga diterapkan karena

kepraktisannya dalam artian mudah disusun dan digabungkan dengan konsep kurikulum lainnya.

Pengembangan kurikulum akademik berpusat kepada pengetahuan, berorientasi pada pengembangan intelektual siswa dan dikembangkan oleh ahli mata pelajaran sesuai dengan disiplin ilmunya masing-masing. Kurikulum ini lebih menekankan pada isi pendidikan dan bertujuan untuk melatih berfikir.

Pada perkembangannya kurikulum ini tidak hanya berfokus pada materi yang disampaikan tetapi juga memperhatikan pada proses belajar yang terjadi dalam diri siswa. Sukmadinata (1997) mengemukakan bahwa sekurang-kurangnya terdapat tiga pendekatan dalam pengembangan kurikulum akademis ini, yaitu 1) melanjutkan pendekatan struktur pengetahuan maksudnya siswa bukan hanya sekedar mengingat materi tetapi belajar memperoleh dan menguji fakta dari materi yang dipelajari; 2) pembelajaran yang bersifat integratif maksudnya menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat yang membutuhkan pengetahuan yang lebih komprehensif; 3) pendekatan yang dilaksanakan pada sekolah-sekolah fundamentalis maksudnya pembelajaran berdasarkan mata pelajaran tetapi tanpa dihubungkan dengan kebutuhan praktis pemecahan masalah dalam kehidupan.

Metode pembelajaran dalam kurikulum akademis ini lebih banyak menggunakan metode ekspositori dengan guru menyampaikan secara langsung materi pembelajarannya dan metode inkuiri. Evaluasi pembelajaran disesuaikan dengan tujuan mata pelajarannya, sebagai contoh: pelajaran humaniora dievaluasi dengan esai, pelajaran matematika

dievaluasi berdasarkan pemahaman pada aksioma atau teoremanya.

Pola organisasi materi pelajaran pada kurikulum akademis menurut Sukmadinata (1997) diantaranya:

1. *Correlated curriculum*
Konsep dalam suatu pelajaran dikorelasikan dengan konsep pada pelajaran lainnya.
2. *Unified* atau *Concentrated curriculum*
Materi pelajaran tersusun dalam tema-tema pelajaran yang mencakup berbagai disiplin ilmu.
3. *Integrated curriculum*
Materi pelajaran diintegrasikan dalam suatu persoalan, kegiatan atau segi kehidupan tertentu serta disiplin ilmunya tidak muncul seperti halnya pada *unified curriculum*.
4. *Problem solving curriculum*
Materi pelajaran berisi topik pemecahan masalah sosial dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan berbagai mata pelajaran atau disiplin ilmu.

B. Kurikulum Humanistik

Kurikulum akademik berdasarkan pada aliran pendidikan pribadi. Kurikulum ini dikembangkan dengan penekanan pada siswa dan proses pembelajaran dibandingkan dengan hasil pembelajarannya. Dengan kata lain, desain kurikulumnya untuk membantu siswa dalam proses pembelajaran yang dilaluinya. Kurikulum ini menuntut suatu hubungan yang baik antara siswa dengan guru. Guru menjadi sumber dalam

memberikan dorongan yang memperlancar proses belajar siswanya.

Kurikulum humanistik memperhatikan siswa dalam kesatuan perilakunya, bukan hanya intelektual tetapi emosional dan tindakan. Sanjaya (2013) mengemukakan bahwa kurikulum yang berorientasi pada siswa minimal dapat dipandang dari dua perspektif, yaitu perspektif kehidupan anak di masyarakat dan perspektif psikologi.

Perspektif kehidupan anak di masyarakat berarti memandang siswa sebagai bagian dari masyarakat yang memerlukan pengembangan diri dalam berbagai aspeknya. Tidak hanya pengembangan kemampuan intelektualnya saja, tetapi proses belajar dirancang untuk memfasilitasi pengembangan siswa dalam berbagai aspek kehidupannya. Pengembangan materi kurikulum dan dan rancangan pengalaman belajar dalam proses belajarnya disesuaikan dengan kebutuhan siswa sebagai persiapan dalam kehidupannya di masyarakat.

Dari perspektif psikologi, pengembangan kurikulum ini menekankan adanya hubungan emosional antara siswa dengan guru. Guru bersinggungan dengan siswa bukan hanya dari segi intelektual siswanya saja, tetapi menyangkut seluruh pribadi siswa. Jika hal itu diwujudkan dalam proses pembelajaran, diharapkan tujuan pendidikan dalam membangun manusia seutuhnya dapat tercapai.

Sukmadinata (1997) mengemukakan bahwa termasuk dalam kurikulum humanistik yaitu pendidikan konfluen, kritikisme radikal dan mistikisme modern. Pendidikan konfluen lebih menekankan pada keutuhan pribadi dalam arti individu harus memberikan respon secara utuh (pikiran,

perasaan, tindakan) terhadap kesatuan yang menyeluruh dari lingkungan.

Pendidikan kritikisme radikal bersumber dari aliran naturalisme atau romantisme Rousseau. Pendidikan ini berpandangan bahwa siswa menemukan dan mengembangkan sendiri segala kemampuan dan potensinya. Pendidikan lebih pada upaya untuk memfasilitasinya berupa dorongan dan ransangan sehingga siswa dapat berkembang. Dalam hal ini tidak ada pemaksaan terhadap siswa.

Pendidikan mistikisme modern menekankan pada latihan dan pengembangan kepekaan perasaan serta kehalusan budi pekerti. Bentuk pendidikannya bisa melalui sensitivity training, yoga, meditasi dan sebagainya.

Crow (Sanjaya,2013) menyarankan pengembangan kurikulum ini dengan mengakomodasi hal-hal berikut:

1. Kurikulum sesuai dengan perkembangan anak;
2. Kurikulum mencakup pengetahuan, sikap dan keterampilan;
3. Siswa dipandang sebagai subyek belajar;
4. Pembelajaran sesuai dengan minat, bakat dan tingkat perkembangan siswa.

C. Kurikulum Rekonstruksi Sosial

Kurikulum akademik berdasarkan pada aliran pendidikan interaksional. Kurikulum ini memusatkan perhatian pada permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat untuk kemudian diakomodir upaya penyelesaiannya dalam proses pendidikan. Sukmadinata (1997) mengemukakan bahwa pendidikan dipandang sebagai kegiatan bersama dengan

melibatkan interaksi yang bukan hanya antara siswa dengan guru tetapi siswa dengan siswa serta interaksi siswa dengan lingkungan dan sumber belajar lainnya.

Interaksi dan kerjasama yang terjalin dalam proses pembelajaran diharapkan mampu dalam mengupayakan pemecahan masalah-masalah di masyarakat. Kurikulum dirancang untuk dapat mengidentifikasi kondisi permasalahan sosial kemasyarakatan kemudian merancang upaya pemecahan masalahnya. Pada akhirnya penerapan kurikulum akan bermuara pada terbentuknya masyarakat yang lebih baik, masyarakat baru yang lebih stabil.

Pengembangan kurikulum berarti harus memperhatikan kebutuhan masyarakat dan perkembangan sosial yang terjadi. Proses pembelajaran bukan hanya membantu individu siswa dalam mengembangkan kemampuannya termasuk kemampuan sosialnya, tetapi juga memberikan ruang dan mendorong siswa berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan.

Lebih lanjut Sukmadinata (1997) mengemukakan ciri-ciri desain kurikulum rekonstruksi sosial, yaitu:

1. Asumsi maksudnya bahwa tantangan atau kondisi permasalahan yang terjadi di masyarakat merupakan bidang garapan studi sosial yang perlu didekati oleh bidang-bidang lainnya, seperti bidang ekonomi, sosiologi, psikologi, estetika, pengetahuan alam, matematika, dan sebagainya. Permasalahan di masyarakat bersifat universal dan dapat dikaji dalam kurikulum pendidikan.
2. Masalah-masalah sosial yang mendesak. Kegiatan pembelajaran diarahkan dan dipusatkan pada permasalahan sosial yang mendesak untuk ditangani.

3. Pola organisasi disusun seperti sebuah roda dengan tema utama di tengah-tengah sebagai porosnya. Tema utama dijabarkan ke dalam sejumlah topik dan ditempatkan sebagai jari-jari rodanya. Semua kegiatan jari-jari tersebut dirangkum menjadi suatu kesatuan sebagai velk.

Sanjaya (2013) mengemukakan dua perspektif dalam kurikulum ini, yaitu perspektif status quo dan perspektif pembaharuan. Rancangan kurikulum dalam perspektif status quo diarahkan untuk dapat melestarikan nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat. Aspek-aspek yang dianggap penting dalam masyarakat harus diperhatikan dengan baik dan terakomodir dalam kurikulum. Pengembangan kurikulumnya memerlukan pengkajian yang mendalam terkait aktivitas yang dilakukan masyarakat. Sedangkan kurikulum dalam perspektif pembaharuan menekankan pada proses pengembangan hubungan antara kurikulum dengan kehidupan sosial, politik dan ekonomi yang berkembang di masyarakat. Pengembangan kurikulum ini diharapkan dapat mempertemukan dan menyiapkan siswa dengan kondisi permasalahan yang ada di masyarakat.

Lebih jauh Sanjaya (2013) mengemukakan hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengimplementasian kurikulum rekonstruksi sosial ini, yaitu:

1. Siswa memfokuskan pada salahsatu aspek yang ada di masyarakat yang dianggap perlu diubah;
2. Siswa melakukan suatu tindakan terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat;
3. Siswa bertindak berdasarkan pada nilai.

Dilihat dari tujuan dan isi kurikulum, Sukmadinata (2017) mengemukakan bahwa hal tersebut berubah setiap tahunnya dalam kurikulum rekonstruksi sosial ini. Proses belajar dirancang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapainya. Contoh kegiatan bisa berupa survey terhadap masyarakat, studi hubungan antara variabel yang terkaitnya, melakukan studi latar belakang, mengkaji dan menganalisis praktek, memantapkan rencana perubahan sebagai solusinya, mengevaluasi semua rencana dengan kriteria target pencapaiannya.

Dalam pendidikan rekonstruksi sosial diupayakan kurikulum sesuai antara tujuan nasional dengan tujuan siswa. Pemecahan masalah sosial sesuai dengan minat dan bakatnya siswa. Tidak ada kompetisi dalam kegiatan belajarnya, tuntutananya justru siswa dapat saling kerjasama, saling pengertian, dan tercapai konsensus.

Dengan demikian, evaluasi pembelajarannya diarahkan kepada kemampuan siswa dalam menterjemahkan masalah, mencari penyelesaian masalah dan memiliki kemauan untuk melakukan suatu tindakan. Evaluasi tidak hanya menilai sisi kemampuan siswa saja, tetapi pengaruh kegiatan sekolah terhadap masyarakatnya.

Pandangan rekonstruksi sosial berkembang dengan suatu harapan terhadap kemampuan manusia dalam membangun dunia yang lebih baik kedepannya.

D. Kurikulum Teknologi

Kurikulum akademik berdasarkan pada aliran pendidikan teknologi. Pengembangan kurikulum tidak terlepas dari perkembangan teknologi yang terjadi. Perkembangan

teknologi yang semakin pesat memberikan kemungkinan proses pembelajaran dirancang dengan lebih efektif dan efisien. Sanjaya (2013) menyatakan bahwa pengaruh perkembangan teknologi dalam kurikulum dapat dilihat dari dua hal, yaitu 1) sisi penerapan hasil-hasil teknologi dan 2) sisi teknologi sebagai suatu sistem.

Sisi penerapan teknologi dapat berupa perencanaan yang sistematis dan lebih mudah dengan menggunakan media atau alat bantu dalam kegiatan pembelajaran. Penggunaan media yang merupakan penerapan atau pemanfaatan hasil teknologi diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Sedangkan dari sisi teknologi sebagai suatu sistem berarti menekankan pada penggunaan pendekatan sistem dalam penyusunan program melalui perumusan khusus sebagai tujuan yang harus dicapai. Program pembelajarannya bisa berupa program sistem, program sistem yang didukung oleh media atau alat bantu, atau bisa berupa program sistem yang dipadukan dengan media atau alat bantu pembelajaran.

Perkembangan teknologi pada abad dua puluh ini sangat pesat. Isi kurikulum mengarah pada penguasaan sejumlah kompetensi. Kompetensi ini diuraikan kepada kompetensi yang lebih khusus yang akhirnya menjadi suatu perilaku yang dapat diamati atau diukur.

Menurut Sanjaya (2013) terdapat beberapa karakteristik dari kurikulum teknologi ini, yaitu:

1. Belajar dipandang sebagai suatu proses respon terhadap rangsangan yang diberikan.

2. Belajar berdasarkan pada suatu rangkaian langkah-langkah tertentu dengan sejumlah tugas yang harus diselesaikannya.
3. Secara khusus pembelajaran secara individual, walaupun dalam hal-hal tertentu memungkinkan bias belajar secara kelompok.

Lebih lanjut, Sanjaya (2013) mengemukakan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam implementasi kurikulum teknologi ini, yaitu 1) kesadaran akan tujuan; 2) kesempatan kepada siswa untuk memperoleh pengalaman praktek sesuai dengan tujuannya; 3) informasi kepada siswa terkait hal yang telah dicapainya.

Contoh Implementasi Macam-Macam Konsep Kurikulum

Dari berbagai sumber terkait implementasi konsep kurikulum akademik, humanistik, konstruksi sosial dan teknologi.

1. Kurikulum akademik

Kurikulum tahun 1960-an pada sekolah-sekolah di negara bagian Amerika Serikat

Man: A Course of Study (MACOS) merupakan kurikulum untuk sekolah dasar yang terdiri dari buku-buku, film, poster, rekaman, permainan dan perlengkapan lainnya.

2. Kurikulum humanistik

Pembelajaran konfluen oleh George Issac Brown dengan sekitar 40 tekniknyanya diantaranya a. *dyads* berupa latihan komunikasi afektif antara dua orang; b. *fantasy body trips* berupa pemahaman tentang badan dan diri individu; c. *rituals* berupa suatu kegiatan untuk menciptakan kebiasaan, kegiatan atau ritual baru.

3. Kurikulum rekonstruksi sosial

Paulo Freire yang membantu Negara di Amerika Latin dalam memerangi kebodohan dan keterbelakangan dengan menggalakkan budaya akal budi (*conscientization*)

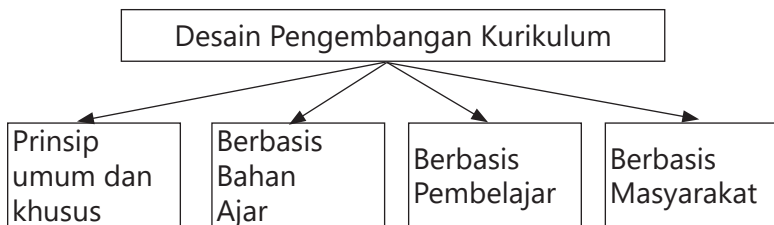
4. Kurikulum teknologi

Penggunaan audio dan video, overhead projector, film slide, komputer, berbagai aplikasi pembelajaran online.

BAB VIII

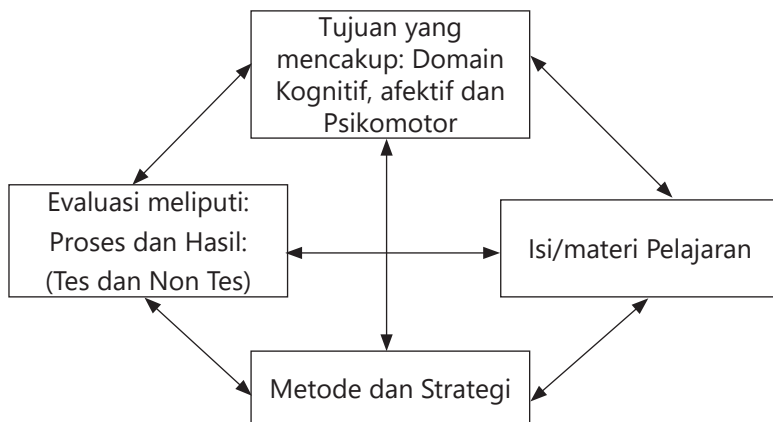
DESAIN PENGEMBANGAN KURIKULUM

Konfigurasi pengembangan kurikulum merupakan tahapan kegiatan efektif untuk membentuk dan menentukan sasaran, isi, materi, sistem, dan penilaian pembelajaran. Desain pengembangan kurikulum harus selaras pada kebutuhan dengan tetap fokus pada kualitas dan kearifan lokal, untuk menghasilkan lulusan berkualitas di tingkat lokal maupun global. Pada bagian ini akan dibahas tentang desain pengembangan kurikulum yang memasukkan standar esensial/prinsip pengembangan kurikulum, kurikulum yang difokuskan pada materi bahan ajar, kurikulum yang berfokus pada peserta didik dan kurikulum yang berdasarkan pada masyarakat yang digambarkan dalam peta konsep di bawah ini.



Bagan 8.1 Peta Konsep Desain Pengembangan Kurikulum

Kurikulum (Andayani, 2012) merupakan sistem yang terbentuk oleh empat komponen yaitu tujuan, isi, evaluasi dan metode yang digambarkan sebagai berikut:



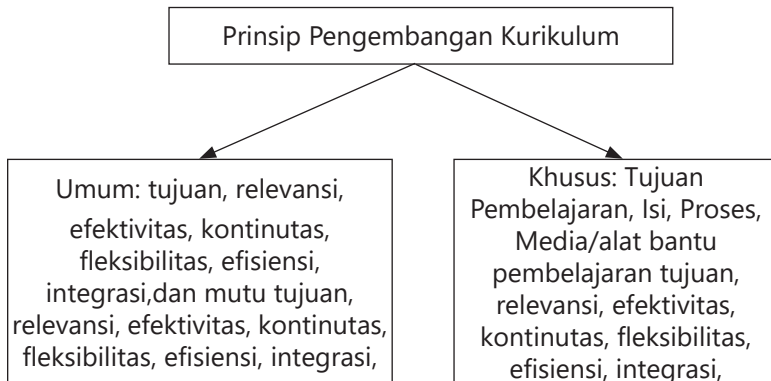
Bagan 8.2 Komponen Kurikulum

A. Prinsip Dasar Pengembangan Kurikulum

Aturan-aturan yang akan digunakan dalam pengembangan kurikulum pada dasarnya adalah prinsip-prinsip yang akan menghidupkan kurikulum. Dalam membangun kurikulum, kita dapat memanfaatkan aturan yang telah dibuat dalam kehidupan sehari-hari serta membuat standar baru sendiri. Aturan esensial ini dipandang sebagai pandangan fundamental yang tepat dalam mengembangkan kurikulum. Jenis-jenis prinsip ini dibedakan oleh tingkat keefektifannya yang dapat kita ketahui lewat tingkat resikonya(Sudarman, 2019).

Prinsip dasar ini dipandang sebagai pandangan fundamental yang tepat dalam desain pengembangan kurikulum/ program pendidikan. Digambarkan (Oliva, 1992) bahwa Jenis-jenis prinsip dasar dalam pengembangan kurikulum merupakan kebenaran keseluruhan, kebenaran sebagian, dan dugaan sebagian prinsip-prinsip dasar tidak semuanya benar.

Dalam pengembangan kurikulum, pengembang kurikulum harus menggunakan prinsip sebagai acuan untuk memenuhi harapan stakeholder pendidikan. Dalam pengembangan kurikulum diharapkan memenuhi prinsip umum dan prinsip khusus yang dapat digambarkan sebagai berikut:



Bagan 8.3. Prinsip Pengembangan Kurikulum

Prinsip-prinsip dasar/umum meliputi prinsip berorientasi pada tujuan, prinsip relevansi, prinsip efektivitas dan efisiensi, prinsip kontinuitas dan fleksibilitas serta prinsip integrasi dijabarkan oleh (Hidayat, 2013) sebagai berikut:

1. **Prinsip berorientasi pada tujuan**, pada prinsip ini tujuan atau kompetensi merupakan arah dalam pengembangan. Kurikulum yang dapat dipahami dengan jelas untuk dapat dijabarkan yang lebih spesifik dan operasional serta komprehensif dari aspek kognitif, afektif dan psikomotor secara menyeluruh.
2. **Prinsip relevansi** merupakan kesesuaian atau keserasian pendidikan dengan tuntutan kehidupan, yang meliputi tiga aspek yaitu: relevansi pendidikan dengan lingkungan

hidup siswa, relevansi dengan perkembangan kehidupan masa sekarang dan masa yang akan datang serta relevansi dengan tuntutan dalam dunia pekerjaan. Prinsip relevansi dalam menyusun kurikulum sebaiknya memperhatikan kebutuhan lingkungan masyarakat sekitar dan peserta didik, agar nantinya berguna bagi pembelajar untuk bersaing dalam dunia kerja yang akan datang serta menyesuaikan dengan perkembangan teknologi agar selaras dalam usaha membangun negara

3. **Prinsip efektivitas dan efisiensi.** Dalam pengembangan kurikulum tidak terlepas dan merupakan penjabaran dari perencanaan pendidikan, yang merupakan penjabaran dari kebijaksanaan pemerintah di bidang pendidikan. Pada dasarnya kurikulum berisikan empat aspek utama..tujuan-tujuan..pendidikan..atau kompetensi, isi pendidikan dan pengalaman belajar serta penilaian. Efektivitas pembelajaran meliputi seberapa jauh tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang diinginkan agar dapat dicapai melalui kegiatan pembelajaran yang ditempuh sedangkan..efisiensi berimplikasi mengusahakan. kegiatan..pembelajaran mendayagunakan waktu, biaya dan sumber-sumber lain secara cermat dan tepat sehingga hasil kegiatan pembelajaran dapat memenuhi harapan. Untuk menyelesaikan suatu program diperlukan waktu, tenaga dan biaya yang kadang-kadang sangat besar jumlahnya dan kesemuanya itu sangat bergantung kepada banyak program yang akan diselesaikan. Hal ini yang dikatakan bahwa usaha yang dilakukan itu efisien. Jadi efisiensi merupakan perbandingan antara hasil yang dicapai dan *out put* yang diharapkan paling tidak

menunjukkan hasil yang seimbang. Dengan kata lain prinsip ekonomis ini harus diterapkan dengan tenaga, waktu dan biaya sedikit atau sekecil mungkin untuk mendapatkan hasil yang optimal.

4. **Prinsip kontinuitas dan fleksibilitas.** Kontinuitas mengimplikasikan mengusahakan dalam setiap kegiatan pembelajaran merupakan bagian yang berkesinambungan dengan kegiatan pembelajaran lainnya baik secara vertikal maupun horizontal. Perkembangan dan proses belajar anak..berlangsung secara berkesinambungan, tidak terputus-putus. Oleh karena itu, pengalaman belajar yang disediakan kurikulum juga hendaknya berkesinambungan antara suatu tingkat kelas dengan kelas lainnya, antara satu jenjang dengan jenjang lainnya, juga antar jenjang pendidikan dengan pekerjaannya. Sedangkan..fleksibilitas mengimplikasikan kegiatan pembelajaran bersifat luwes, disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat. Kurikulum..yang fkleksibel mengartikan kurikulum hendaknya mempunyai kelenturan. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang berisi hal-hal yang solid, tetapi dalam pelaksanaannya memungkinkan terjadinya..penyesuaian-penyesuaia berdasarkan kondisi daerah, waktu maupun kemampuan dan latar belakang anak. Kurikulum ini mempersiapkan anak untuk masa sekarang dan yang akan..datang. Kurikulum tetap fleksibel dilaksanakan ditempat manapun, bahkan bagi anak yang memiliki latar belakang dan kemampuan yang berbeda.
5. **Prinsip Integrasi** merupakan keterpaduan kurikulum sehingga mampu mengembangkan manusia yang utuh dan pribadi yang terintegrasi selaras dengan lingkungan

hidup dan mampu menjawab berbagai persoalan yang dihadapi dalam kehidupannya. Untuk itu kurikulum harus dapat mengembangkan kecakapan hidup yang terbagi dalam lima kategori yaitu:

- a. Ketrampilan mengenal diri sendiri (*self awareness*) atau kecakapan personal (*personal skill*)
 - b. Kecakapan berfikir rasional (*thinking skill*) yaitu diri sendiri kemampuan (*mindfulness*) atau kemampuan individu (kemampuan individu)
 - c. Kecakapan berfikir rasional (*thinking skill*) yaitu kemampuan penalaran yang masuk akal
 - d. Kecakapan sosial (*social skill*) atau kemampuan sosial (*social ability*)
 - e. Kecakapan akademik (*academic skill*) atau sering disebut kemampuan skolastik (kemampuan ilmiah)
 - f. Kecakapan vokasional (*vocational skill*) atau Kemampuan profesional
6. Prinsip Mutu (Oemar Hamalik, 2017) menyatakan pengembangan kurikulum harus berorientasi pada mutu (mutu guru, proses pembelajaran, dan media yang bermutu).

Menurut Abdurahman an-Nahlawi dalam (Majid, 2006) menyatakan bahwa kurikulum Islami diharapkan memenuhi ketentuan, yaitu: memiliki sistem pengajaran dan materi yang selaras dengan fitrah manusia; mewujudkan tujuan pendidikan Islam; sesuai dengan tingkatan pendidikan (karakteristik, tingkatan pemahaman, jenis kelamin serta tugas kemasyarakatan) yang telah dirancang dalam kurikulum; memperhatikan tujuan masyarakat yang realistis; menyangkut

penghidupan dan bertitik tolak dari keislaman yang ideal; sesuai dengan konsep Islam; realistis dan sesuai dengan tuntutan dan kondisi negara itu sendiri; memiliki metode yang adaptif (selaras dengan berbagai respon sehingga sesuai dengan perbedaan individu); harus efektif, dalam memberikan hasil pendidikan yang bersifat behavioristik, dan tidak memberikan dampak emosional yang meluap-luap dalam diri generasi muda; sesuai dengan berbagai tingkatan usia dan perkembangan anak didik; memperhatikan aspek.. pendidikan tentang segi-segi perilaku yang bersifat aktifitas langsung seperti; berjihad, dakwah Islam, serta pembangunan masyarakat muslim dalam lingkungan persekolahan sehingga kegiatan ini dapat mewujudkan seluruh rukun Islam dan syi'arnya, metode pendidikan dan pengajarannya, serta etika dalam kehidupan siswa secara individu dan sosial.

Prinsip-prinsip dalam pengembangan kurikulum dalam prespektif Islam merupakan sebuah sistem dan perkembangan kurikulum yang harus selaras dengan fitrah insani, kurikulum yang diarahkan untuk mencapai tujuan akhir pendidikan Islam dan hendaknya memperhatikan periodisasi pengembangan peserta didik, memelihara kebutuhan masyarakat, serta merupakan organisasi kurikulum yang tidak saling berseberangan dan tidak menimbulkan pertentangan. Dalam pelaksanaan kurikulum yang realistis, perlu untuk memilih metode yang selaras, yaitu efektif untuk dilaksanakan (Asmariyani, 2014).

B. Kurikulum yang Berpusat Pada Bahan Ajar

Kurikulum yang berpusat pada bahan ajar atau materi yang ditawarkan kepada siswa sebagai pembelajar dalam

kegiatan pembelajaran digunakan untuk mencapai tujuan. Adapun kriteria yang dapat membantu dalam perancangan kurikulum dalam menentukan isi materi ajar atau isi kurikulum antara lain (Hidayat, 2013):

1. Isi kurikulum harus..sesuai, tepat dan bermakna bagi perkembangan siswa
2. Isi kurikulum harus dapat mencerminkan kenyataan sosial..
3. Isi kurikulum harus mengandung pengetahuan ilmiah yang tahan uji
4. Isi kurikulum dapat menunjang tercapainya tujuan pendidikan..

Materi kurikulum pada hakikatnya adalah isi kurikulum. Oleh karena itu, materi tersebut harus mencerminkan bahan ajar yang mampu membangun pencerahan tentang wawasan keilmuan.. (Yamin, 2009).

Isi/materi..kurikulum pada hakekatnya adalah semua kegiatan dan pengalaman yang dikembangkan dan disusun dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Secara umum, isi kurikulum itu dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu: 1. Logika yang merupakan argumentasi nalar terhadap pengetahuan tentang benar-salah, berdasarkan prosedur keilmuan. 2. Etika, yaitu pengetahuan tentang baik-buruk, nilai, dan moral. 3. Estetika, yaitu pengetahuan tentang indah-jelek, yang ada nilai seni(Arifin, 2011).

Pengembangan materi kurikulum harus berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut (Hamdi, 2017) : mengandung bahan kajian yang dapat dipelajari siswa dalam pembelajaran,, berorientasi pada tujuan, sesuai dengan hierarki tujuan

pendidikan. Materi pembelajaran disusun secara logis dan sistematis, dalam bentuk:

1. Teori adalah sekumpulan perkembangan atau gagasan, definisi, atau kata-kata relasional yang terkait, yang menyajikan penilaian metodis tentang efek samping dengan menentukan hubungan antara faktor-faktor dengan tujuan untuk memperjelas dan meramalkan keajaiban-keajaiban ini.
2. Konsep adalah ide refleksi yang dibentuk oleh asosiasi tempat menarik, merupakan makna singkat dari kumpulan realitas.
3. Generalisasi adalah tujuan keseluruhan yang bergantung pada isu eksplisit, mulai dari investigasi, penilaian atau pembuktian dalam penelitian.
4. Prinsip adalah standar pemikiran utama, contoh skema yang ada dalam materi yang menciptakan hubungan antar ide.
5. Prosedur merupakan Strategi, khususnya perkembangan langkah-langkah berturut-turut dalam topik yang harus dilakukan oleh siswa.
6. Realitas adalah berbagai data yang tidak umum dalam materi yang dianggap penting, terdiri dari ungkapan, individu, bintik, dan peristiwa.
7. Istilah adalah kata-kata jargon baru dan unik yang disajikan dalam materi.
8. Model / delineasi, khususnya hal atau kegiatan atau siklus yang diharapkan dapat menjelaskan suatu penggambaran atau penilaian.

9. Definisi adalah penjelasan tentang arti penting atau signifikansi suatu hal / kata dalam tata letaknya.
10. Preposisi merupakan kata relasional/ teknik yang digunakan untuk menyampaikan topik dengan tujuan akhir untuk mencapai tujuan program pembelajaran

Materi ajar merupakan isi kurikulum yang dikembangkan dengan prinsip-prinsip materi kurikulum yang mengandung bahan kajian yang dipelajari pembelajar yang mengacu pada pencapaian tujuan setiap satuan pendidikan dan tujuan pendidikan nasional. Bahan ajar memiliki peran yang sangat pokok dalam pembelajaran yang di dalamnya terkandung karakteristik pembelajaran sehingga mampu mengoptimalkan pelaksanaan pembelajaran.

Bahan ajar merupakan seperangkat materi yang disusun secara sistematis yang menciptakan lingkungan belajar bagi peserta didik. Bahan ajar dapat berupa informasi, alat, teks yang disusun secara sistematis yang menampilkan kompetensi yang akan dikuasai peserta didik, diperlukan pengajar dalam perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran bersama peserta didik. Keberadaan bahan ajar memiliki sejumlah fungsi dalam proses pembelajaran yaitu: pihak yang memanfaatkan bahan ajar dan strategi pembelajaran yang digunakan. Fungsi bahan ajar bagi pendidik yaitu menghemat waktu pendidik dalam mengajar, peran pendidik sebagai fasilitator, meningkatkan proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan interaktif, pedoman dalam proses pembelajaran dan merupakan substansi kompetensi yang harus dikuasai peserta didik, serta sebagai alat evaluasi dalam penguasaan kompetensi pembelajaran.

Adapun fungsi bahan ajar bagi pembelajar merupakan pedoman dalam proses pembelajaran dan merupakan substansi kompetensi yang seharusnya dipelajari atau dikuasainya, membantu meningkatkan potensi pembelajar untuk belajar mandiri, untuk belajar sesuai urutan dan kecepatannya masing-masing.

Berdasarkan..strategi pembelajaran yang digunakan fungsi bahan ajar dapat dibedakan menjadi tiga macam (Prastowo, 2014) yaitu dalam pembelajaran klasikal, individual dan kelompok. Dalam pembelajaran klasikal fungsi bahan ajar sebagai sumber informasi dan pengawas serta pengendali proses pembelajaran serta sebagai bahan pendukung proses pembelajaran. Dalam pembelajaran individual, bahan ajar berfungsi sebagai media utama..dalam pembelajaran, menyusun dan mengawasi proses peserta didik memperoleh informasi serta sebagai penunjang pembelajaran individual lainnya. Dalam pembelajaran kelompok, bahan ajar berfungsi: sumber informasi yang terintegrasi tentang latar belakang materi, peran orang-orang yang terlibat dalam belajar kelompok serta petunjuk tentang proses pembelajaran kelompoknya sendiri, sebagai bahan pendukung bahan belajar utama yang dirancang untuk meningkatkan motivasi belajar siswa.Dalam pembuatan bahan ajar harus sesuai dengan tuntutan kurikulum yang mempertimbangkan kebutuhan siswa (baik karakteristik maupun setting lingkungan sosial), dapat membantu siswa..dalam memperoleh..alternatif bahan ajar disamping buku-buku teks, serta bertujuan memudahkan proses pembelajaran.

Adapun kriteria penyeleksian isi/bahan ajar (Idi, 2016) harus meliputi: validitas, signifikansi, minat (*interest*),

learnability (mampu belajar), konsisten dengan realitas sosial, dan kegunaan (*utility*).

Dalam pengembangan kurikulum, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan (Hamdi, 2017) yaitu ruang lingkup (*scope*), urutan (*sequence*), dan penempatan bahan (*grade placement*), dan bentuk organisasi..isi. Ruang.lingkup materi merupakan cakupan kedalaman dan keluasan dari keseluruhan materi, kegiatan dan pengalaman yang akan disampaikan kepada peserta didik. Ruang lingkup menunjukkan apa yang dianggap paling penting untuk disampaikan kepada..peserta didik. Urutan, yaitu penyusunan..materi pelajaran menurut aturan dan sistematika tertentu secara berurutan.

Dalam pengembangan kurikulum berpegang pada urutan dari yang mudah sampai yang sulit, dari yang sederhana sampai yang kompleks, dari keseluruhan sampai bagian-bagian, dari dahulu hingga sekarang (kronologis), dan dari yang konkret menuju yang abstrak. Penempatan, yaitu penempatan isi/ materi sesuai dengan tingkat perkembangannya (tingkat atau kelas) tertentu. Bentuk organisasi.isi.merupakan susunan atau bentuk pengemasan materi, seperti mata pelajaran, bidang studi, berkolerasi atau terpadu. Setiap mata pelajaran (misalnya) dikembangkan menjadi beberapa pokok bahasan dan subpokok bahasan.

Kurikulum yang berpusat pada bahan ajar hendaklah juga perlu mempersiapkan bahan ajar dengan analisis materi pelajaran yang tepat, membuat bahan ajar dengan memasukkan strategi-strategi kognitif (*advance organizer*, peta konsep, *chunking*, metafora dan simile) bukan hanya dalam bahan cetakan (buku/modul) namun juga dalam bentuk website, CD-ROM dan e-learning.

C. Kurikulum yang Mengutamakan Peranan Siswa

Kurikulum adalah sistem rancang yang membantu perkembangan dan pengembangan peserta didik. Peserta didik merupakan pembelajar yang memiliki sifat, karakteristik, dan kemampuan kekhasan dan spesifikasi masing-masing. Pendidik dan pengembang kurikulum perlu memperhatikan dan memahami keunikan dan kedinamisan perkembangan peserta didik dalam menyusun, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengembangkan kurikulum. Kurikulum merupakan kesatuan dari unsur-unsur psikologi, karena pendidikan adalah tentang perilaku manusia itu sendiri, mendidik berarti mengubah perilaku pembelajar menuju kedewasaan.

Kurikulum dengan pendekatan yang berpusat pada siswa (Oemar Hamalik, 2017), pembelajaran dilaksanakan berdasarkan kebutuhan, minat dan kemampuan siswa dan gaya belajar siswa (belajar mandiri, belajar modul, paket belajar dan sebagainya).

Pengembangan kurikulum berbasis kebutuhan peserta didik, tidak akan terlepas dari teori-teori psikologis yang melandasi penyusunannya, seperti teori belajar psikologi Behavioristik, psikologi kognitif, dan teori belajar psikologi Humanistik yang dijelaskan (Iskandar Wiryokusumo, 1988) sebagai berikut:

1. Teori belajar Psikologi Behavioristik beranggapan bahwa tingkah laku manusia dikendalikan penguatan dari lingkungan. Tingkah laku belajar terdapat jalinan yang erat antara reaksi-reaksi behavioral dengan stimulasinya. Dalam teori ini menggambarkan tingkah-laku murid merupakan reaksi terhadap lingkungan mereka masa

lalu dan masa sekarang dan bahwa segenap tingkah laku adalah hasil belajar. Berdasarkan teori ini, maka tingkah laku siswa dapat dianalisis dengan mempelajari latar belakang penguatan terhadap tingkah laku tersebut.

2. Teori belajar Psikologi Kognitif beranggapan bahwa tingkah seseorang tidak hanya dikontrol oleh ganjaran dan penguatan, tetapi tingkah laku seseorang senantiasa didasarkan pada..kognisi. Dalam teori ini menggambarkan tingkah laku seseorang lebih bergantung kepada *insight* terhadap hubungan-hubungan yang ada di dalam suatu situasi.
3. Teori belajar Psikologi Humanistik beranggapan bahwa setiap orang itu menentukan perilaku mereka sendiri. Mereka bebas dalam menentukan kualitas hidup mereka, tidak terikat oleh lingkungannya. Menurut teori ini penyusunan..dan..penyajian materi pembelajaran harus sesuai dengan perasaan dan perhatian siswa. Tujuan utama para pendidik adalah membantu siswa untuk mengembangkan dirinya, yaitu membantu masing-masing individu untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantunya dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada pada diri mereka sendiri.

Dari penjelasan di atas, maka pondasi psikologis dalam pengembangan kurikulum menempati posisi dan peran penting. Peserta didik sebagai pembelajar adalah subjek dan sekaligus target/obyek kurikulum, maka pertimbangan psikologis menjadi sesuatu yang penting dalam perencanaan dan penyusunan kurikulum, sehingga dimungkinkan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Kurikulum yang berpusat

pada peserta didik dibedakan atas *activity (experience) design* dan *humanistic design*. Ciri utama dari *activity (experience) design* yang pertama adalah struktur kurikulum ditentukan oleh kebutuhan dan minat peserta didik, kedua karena struktur kurikulum didasarkan atas minat dan kebutuhan peserta didik, maka kurikulum disusun bersama oleh guru dan para siswa, ketiga, desain kurikulum tersebut menekankan prosedur pemecahan masalah. *Humanistic design* menekankan pada fungsi perkembangan peserta didik melalui pemfokusan pada hal-hal subjektif, perasaan, pandangan, penjadian (*becoming*), penghargaan, dan pertumbuhan. Kurikulum humanistik berusaha mendorong penangkapan sumber daya dan potensi pribadi untuk memahami sesuatu dengan pemahaman mandiri, konsep sendiri, serta tanggung jawab pribadi.

D. Kurikulum yang Berpusat Pada Problematika yang Dihadapi Masyarakat

Masyarakat merupakan kelompok manusia yang bekerja sama sebagai kesatuan sosial dengan batas-batas yang telah jelas. Kurikulum dalam penyusunan dan pengembangannya dipengaruhi oleh kekuatan sosial yang berada di dalam masyarakat. Pengaruh tersebut terjadi pada komponen-komponen kurikulum, seperti tujuan, isi, metode/strategi, dan evaluasi kurikulum.

Kurikulum merupakan sebuah refleksi dari kebudayaan masyarakat, karena kebudayaan masyarakat merupakan gambaran dari proses pendidikan yang dilakukan. Kebudayaan yang berkualitas merupakan cerminan dari pendidikan yang berkualitas. Sebaliknya, kebudayaan yang rendah merupakan cerminan dari pendidikan yang rendah. Realitas sosial, budaya

dan agama yang ada di masyarakat merupakan bahan studi pengembangan kurikulum untuk digunakan sebagai dasar untuk pengembangan kurikulum. Kebersamaan individu dalam masyarakat terikat oleh nilai-nilai yang menjadi dasar kehidupan dalam interaksi di antara mereka. Nilai perlu dipertahankan dan dihormati di masyarakat termasuk nilai-nilai agama dan sosial-budaya. Nilai-nilai agama terkait dengan kepercayaan publik terhadap ajaran agama, oleh karena itu mereka umumnya bertahan lama.

Kurikulum dengan pendekatan yang berorientasi pada kehidupan masyarakat (Oemar Hamalik, 2017) bertujuan mengintegrasikan sekolah dan masyarakat dalam pembelajaran sehingga dapat menggunakan metode karyawisata, narasumber, kerja pengalaman, survey, proyek pengabdian/pelayanan masyarakat, berkemah dan unit.

Pengembangan kurikulum harus tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang harus selaras dengan peserta didik sehingga mendorong siswa untuk “melek”iptek.

Kurikulum yang dibuat diperlukan untuk bereaksi, merespon dan mengakomodir terhadap kebutuhan lokal dan didasarkan pada peningkatan sosial budaya pada publik, baik di lingkungan dalam konteks lokal, nasional dan global sesuai dengan tuntutan zaman. Sehingga kurikulum mampu mengantisipasi laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan inovasi, dengan tujuan agar peserta didik dapat menyesuaikan diri dan sekaligus menciptakan ilmu pengetahuan dan inovasi yang menguntungkan dan menunjang keberadaan manusia.

BAB IX

RAGAM KONSEP KURIKULUM

A. Kurikulum Pesantren

Kata pesantren merupakan berasal dari kata *santri*. Ada juga yang mengatakan bahwa asal sumber kata santri itu berawal dari bahasa *tamil* atau India yaitu *shastri*, yang memiliki arti guru mengaji atau orang yang menguasai (*sarjana*) berbagai buku-buku dalam agama Hindu. Adapula yang mengatakan bahwa kata pesantren itu berasal dari turunan kata *shastra* yang berarti buku-buku suci, buku-buku agama, atau buku-buku tentang Ilmu Pengetahuan (Kholis Thohir, 2017:13).

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) istilah pesantren diartikan sebagai asrama, tempat santri, atau tempat murid-murid belajar mengaji. Sedangkan secara *terminologi* Pesantren sebagai lembaga pendidikan dan pengajaran yang didalamnya menekankan pada Pelajaran dan pemahaman ilmu Agama Islam yang didukung oleh asrama sebagai tempat tinggal santri yang bersifat permanen (Muhammad Ismail, 2011: 154-155).

Pondok pesantren sebagai satu-satunya lembaga pendidikan yang secara nyata telah mampu melahirkan banyak ulama, tidak sedikit tokoh-tokoh islam lahir atau lulusan dari lembaga pesantren. Bahkan Prof. Mukti Ali mengemukakan bahwa tidak pernah ada ulama yang lahir dari lembaga selain pesantren (Imam Syafe'i, 2017: 64).

Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan islam, pada dasarnya hanya mengajarkan dan memperdalam ilmu agama saja, sedangkan sumber kajian atau mata pelajaran yang digunakan ialah kitab-kitab dalam bahasa Arab. Adapun kitab yang dikaji dipesantren pada umumnya kitab-kitab yang ditulis pada abad pertengahan antara abad ke-12 sampai abad ke-15 atau lazim biasa disebut dengan istilah kitab kuning (Khoirun Nisa' & Chusnul Chotimah, 2020: 50).

Secara universal pondok pesantren yang tumbuh dan berkembang di Indonesia dibagi kedalam tiga jenis, yaitu: **Pertama**, *Salafiyah* (tradisional); **Kedua**, sistem *campuran/kombinasi* (madrasah dan pondok dalam satu kompleks dengan memasukkan ilmu umum, seperti madrasah secara umum); dan **Ketiga**, *Modern* (agama dan umum secara seimbang (balance) dan dikelola secara manajemen modern). sebenarnya ke tiga tipe diatas bisa disederhanakan menjadi dua tipe saja yaitu: *salafiyah* (tradisional) dan tipe *kholaf* atau modern (Khoirun Nisa' & Chusnul Chotimah, 2020: 50).

Bila dilihat dalam bentuk muatan struktur kurikulum dari kedua tipe pondok pesantren diatas dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Kurikulum Pondok Pesantren *Salafiyah* (tradisional).

Pondok pesantren tradisional (*salafiyah*) merupakan pondok tertua yang berdiri di Indonesia dan merupakan ciri khas tersendiri bagi bangsa ini. Muatan kurikulum pondok pesantren tradisional (*salaf*) merupakan kajian-kajian kitab kuning yang didalamnya meliputi: *Nahwu, Sharaf, Balaghah, Tauhid, Tafsir, Hadis, Mantik, Tasawwuf, bahasa Arab, Fiqih, Ushul Fiqih, Akhlak* dan lain sebagainya. (Khoirun Nisa' & Chusnul Chotimah, 2020: 52).

Materi-materi diatas pada prinsipnya mengkaji bidang ilmu agama yang meliputi kajian *Teologi*, *Fiqih*, dan *Etika* dengan sedikit ilmu sejarah dan logika. Mengingat sang kiyai sebagai figur ulama dalam setiap pesantren, maka masing-masing pesantren mempunyai keistimewaan dan keahlian tertentu sesuai dengan keahlian dari masing-masing sang Kiyai tersebut (Abdurrahman, 2017: 284).

Pondok pesantren tradisional dalam pelaksanaanya tidak mengenal sistem kelas. Dimana Kemampuan atau kompetensi santri tidak dilihat dari kelas berapanya, melainkan dilihat dari berbagai kitab yang telah dibaca dan dikajinya (Haidar, 2001: 10). Lebih jelasnya, perjenjangan pendidikan di pesantren tradisional tidak berdasarkan usia tetapi berdasarkan penguasaan dan kemahiran kitab-kitab yang telah ditetapkan dari paling rendah sampai paling tinggi (Khoirun Nisa' & Chusnul Chotimah, 2020: 53).

Dalam pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di pesantren tradisional berlangsung selama 24 jam. Dipesantren tradisional penjadwalan waktu belajar tidaklah terlalu ketat. Timing dan alokasi waktu bagi sebuah kitab yang akan dikaji biasanya disepakati oleh kiyai dan santri sesuai dengan pertimbangan kebutuhan dan kepentingan bersama. Pendidikan di pesantren sangat menekankan terhadap aspek etika dan moralitas. Proses pendidikan disini merupakan proses pembinaan dan pengawasan tingkah laku santri yang seharusnya merupakan cerminan ilmu yang telah di peroleh (Sahibudin, 2017: 152).

Ketika seorang santri berkeinginan untuk kembali ke tempatnya masing-masing harus sesuai dengan

keputusan sang kiyai. Bila mana santri itu telah dipandang mampu dan telah lama masa studi di pondoknya biasanya kiyai menganjurkan atau mengizinkan untuk mengamalkan ilmu yang telah didapatkan di pesantren di kampung halaman masing-masing.

Pondok pesantren yang masih mempertahankan kurikulum *salaf* (tradisional) seperti: Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan, Pondok Pesantren Langitan Tuban, dan lain sebagainya.

2. Kurikulum Pondok Pesantren *Kholafiyah* (Modern)

Saat ini bisa kita saksikan bersama terkait perkembangan dan pembaharuan kurikulum pesantren yang ada di Indonesia mulai dari pesantren *salaf* (bandongan dan sorogan) sampai pada pesantren modern yang begitu sangat pesat. Hal ini terjadi tidak lepas dari adanya suatu sistem pendidikan yang jelas dan terarah serta kurikulum yang terencana dengan baik. Karena kurikulum merupakan jantungnya suatu pendidikan, maka perlu adanya perencanaan dalam penerapannya, tanpa adanya perencanaan yang baik dan tepat dalam penyusunan sebuah kurikulum akan sulit untuk mencapai semua tujuan dan sasaran pendidikan yang telah di cita-citakan sebelumnya (Muhammad Ismail, 2011:148-149).

Kurikulum di pesantren modern saat ini tidak hanya sekedar fokus pada kajian kitab-kitab *klasik* (ilmu agama), akan tetapi juga memasukkan atau mengkombinasikan semakin banyak mata pelajaran dan keterampilan umum, sehingga saat ini dikotomi ilmu di pesantren mulai tidak populer, bahkan saat ini kebanyakan pesantren telah

mendirikan lembaga pendidikan umum yang berada dibawah DIKNAS atau DEPAG (Khoirun Nisa' & Chusnul Chotimah, 2020: 53).

Kurikulum pesantren *Kholaf* (modern) yang merupakan kombinasi antara pesantren tradisional dan sistem sekolah diharapkan akan mampu menghasilkan *output* lulusan pesantren yang berkualitas dan tercermin dalam sikap *aspiratif*, *progresif* dan tidak "*ortodok*", sehingga diharapkan santri mampu dengan cepat bisa beradaptasi dengan berbagai kondisi dan perubahan peradaban yang terjadi dan mereka bisa diterima dengan baik dikalangan masyarakat itu sendiri (Kholid Junaidi, 2016: 106).

Sekarang ini hampir setiap pesantren telah melakukan pembaharuan dan perkembangan struktur muatan kurikulum dengan memasukkan pendidikan umum dalam kurikulum pesantren. Sifatnya bervariasi, ada pesantren yang memasukan pendidikannya 30% agama dan 70% umum, adapula yang sebaliknya, yakni 80% agama dan sisanya pelajaran umum (Saparuddin Rambe, 2016: 57).

Pada pondok pesantren modern perubahan terjadi pada beberapa bidang seperti perubahan kurikulum dan aktifitas pesantren. Hal ini terjadi karena dipandang masih adanya beberapa kelemahan yang ditemukan pada pondok pesantren *salaf* (tradisional). Atau karena adanya kebutuhan masyarakat dimana pesantren itu berada. Untuk mengisi kekurangan dibidang penguasaan kitab kuning umpamanya, beberapa pesantren memasukan kitab kuning sebagai silabus, meskipun jam pelajarannya berada diluar waktu sekolah, seperti hal nya yang

dilakukan Pondok Pesantren Daarul Rahman Jakarta, Pondok Pesantren Cipasung Tasikmalaya, dan lain sebagainya (Khorun Nisa' & Chusnul Chotimah, 2020: 54).

Sebagai contoh isi muatan struktur kurikulum pondok pesantren modern dibagi menjadi beberapa bidang studi, yaitu: **Pertama**, Bahasa Arab, meliputi, *Al-Imla'*, *Al-Insya'*, *Tamrin Al-Lughah*, *Al-Muthalla'ah*, *Al-Nahwu*, *Al-Sharf*, *Al-Balaghah*, *Tarikh Al-Adab*, dan *Al-Khatt Al-Arabi*, yang mana semuanya itu disampaikan dengan menggunakan bahasa Arab. **Kedua**, Dirasah Islamiyah, meliputi, *Al-Qur'an*, *Al-Tajwid*, *Al-Tauhid*, *Al-Tafsir*, *Al-Hadits*, *Musthalah Al-hadits*, *Al-Fiqh*, *Ushul Fiqh*, *Al-Fara'id*, *Tarikh Al-Islam*. **Ketiga**, Bahasa Inggris, meliputi, *Reading and Conprehension*, *Grammer*, *Composition*, dan *Dictation*. **Keempat**, ilmu pasti mencakup berhitung dan matematika. **Kelima**, ilmu pengetahuan Alam (IPA) dan ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) (Muhammad Ismail, 2011: 159).

Sistem kombinasi (perpaduan) antara kajian kitab kuning (klasik) dan kurikulum madrasah sudah banyak berkembang dan ini terbukti berdirinya pesantren-pesantren baru yang mengkombinasikan kurikulum tersebut sehingga semakin hari semakin pesat perkembangannya diseluruh Indonesia. Pondok pesantren semacam ini (Modern) akhir-akhir ini banyak diminati oleh orang tua untuk memasukkan anaknya ke lembaga tersebut dengan harapan anaknya bisa mendapatkan ilmu agama (IMTAQ) dan ilmu umum (IPTEK) dengan seimbang.

B. Kurikulum Madrasah

Kata madrasah merupakan *isim masdar* dari kata *darasa* yang memiliki arti tempat belajar. Dalam perkembangan selanjutnya nama *madrasah* dalam konteks Arab diperuntukan untuk sekolah-sekolah berbasis islam dimana mata pelajaran dasarnya merupakan mata Pelajaran Agama Islam. Kemunculan lembaga ini sebagai tindaklanjut dari sistem pembelajaran pesantren model lama, yang kemudian dimodifikasi menurut model penyelenggaraan sekolah-sekolah umum dengan sistem klasikal (Nasir, 2005: 87-88).

Adanya perbedaan antara lembaga madrasah dan sekolah disebabkan karena dipengaruhi politik pada masa penjajahan Belanda, dimana antara sekolah dan madrasah dipandang sebagai dua bentuk lembaga pendidikan yang berbeda, secara dikotomis, sekolah bersifat sekuler dan madrasah bersifat islami. Hal inilah yang menyebabkan pada masa awal kemerdekaan bangsa Indonesia, perkembangan lembaga madrasah di Indonesia mengalami konflik yaitu disatu pihak pemerintah ingin menjadikannya sebagai lembaga pendidikan nasional dengan memberikan muatan non keagamaan, dan dilain pihak madrasah merasa khawatir akan fungsi pendidikan keagamaannya jika madrasah dimasukkan kedalam jajaran Pendidikan Nasional (Maksun, 1999: 7).

Karakteristik yang khas dari Kurikulum madrasah ini adalah nilai-nilai keislaman dalam penyelenggaraan pendidikannya senantiasa mengacu pada Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi yang kemudian diatur secara lebih rinci melalui Permenag Nomor 2 Tahun 2008 yang berisikan tentang standar kompetensi dan standar isi pendidikan Agama Islam dan bahasa Arab di madrasah serta

memperhatikan surat edaran Dirjen Pendidikan Islam Nomor DJ.II.1/PP/00/ED/681/2006 tanggal 1 Agustus 2006 tentang penerapan standar isi yang intinya bahwasanya madrasah bisa meningkatkan kompetensi lulusan dan meningkatkan kurikulum dengan standar lebih tinggi lagi (Norma Chunnah Zulfa & Pardjono, 2013: 220).

Dalam muatan struktur kurikulum madrasah secara garis besar pada mata pelajaran agama dipecah menjadi beberapa subagian mata pelajaran, yaitu *Al-Qur'an-Hadits*, *Akidah-Akhlak*, *Fikih*, *Sejarah Kebudayaan Islam (SKI)*, dan ditambah dengan pelajaran bahasa Arab, sejak MI sampai MA, sehingga porsi mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) lebih banyak dan lebih komprehensif (Ahmad Rifai, 2018: 16).

Bila kita cermati dari beberapa perubahan muatan struktur kurikulum madrasah sejak masa pra-kemerdekaan sampai pada pasca-kemerdekaan terus mengalami perkembangan sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi pada zamannya. Hal ini menjadikan bentuk sistem dan materi kurikulum bervariasi sesuai dengan kebutuhan pada masing-masing zaman. Dalam hal ini akan diuraikan perkembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di madrasah pada pasca-kemerdekaan sebagai berikut:

Waktu	Bentuk	Kurikulum	Metode	Materi
Pendidikan Islam Pada Masa ORDE Lama (1945–1965)	Sekolah Guru Agama Islam (SGAI) selama 5 tahun	<i>Separated Subject Curriculum</i>	1. Hafalan 2. Ceramah	1. Agama 2. Umum
	Sekolah Guru Hakim Agama Islam (SGHAI) Selama 4 tahun	<i>Separated Subject Curriculum</i>	1. Hafalan 2. Ceramah	1. Sastra 2. Ilmu Agama Ilmu pendidikan agama
	Madrasah Ibtidaiyah (6 tahun)	<i>Separated Subject Curriculum</i>	1. Hafalan 2. Ceramah	1. Agama 2. Umum
	Madrasah Tsanawiyah (4 tahun)	<i>Separated Subject Curriculum</i>	1. Hafalan 2. Ceramah	1. Agama 2. Umum
	Madrasah Aliyah (4 tahun)	<i>Separated Subject Curriculum</i>	1. Hafalan 2. Ceramah	1. Agama 2. Umum
Pendidikan Islam Pada Masa Orde Baru (1966 – 1974)	Madrasah Ibtidaiyah (MI)	<i>Correlated Subject Curriculum</i>	1. Hafalan 2. Ceramah	1. Agama (60%) 2. Umum (40%)
	Madrasah Tsanawiyah	<i>Correlated Subject Curriculum</i>	1. Hafalan 2. Ceramah	1. Agama (60%) 2. Umum (40%)
	Madrasah Aliyah (MA)	<i>Correlated Subject Curriculum</i>	1. Hafalan 2. Ceramah	1. Agama (60%) 2. Umum (40%)

Waktu	Bentuk	Kurikulum	Metode	Materi
Pendidikan Islam pada Masa Orde Baru (masa SKB 3 Menteri tahun 1975 – 1984)	Madrasah Ibtidaiyah (MI)	<i>Integrate Curruculum Organization</i>	Hafalan ceramah	Agama (30%) Umum (70%)
	Madrasah Tsanawiyah (MTs)	<i>Correlated Subject Curriculum</i>	Hafalan ceramah	Agama (30%) Umum (70%)
	Madrasah Aliyah (MA)	<i>Correlated Subject Curriculum</i>	Hafalan Ceramah	Agama (30%) Umum (70%)
Pendidikan Islam Pada Masa Orde Baru (SKB 2 Menteri Tahun 1984)	Madrasah Ibtidaiyah (MI)	<i>Content Based Curriculum</i>	Hafalan Ceramah CBSA	Agama (Program Inti) Umum (Pilihan)
	Madrasah Tsanawiyah (MTs)	<i>Content Based Curriculum</i>	Hafalan Ceramah CBSA	Agama (Program Inti) Umum (Pilihan)
	Madrasah Aliyah (MA)	<i>Content Based Curriculum</i>	Hafalan Ceramah CBSA	Agama (Program Inti) Umum (Pilihan)
Pendidikan Islam Masa orde Baru (1987)	MAPK (Madrasah Aliyah Program Khusus)	<i>Content Based Curriculum</i>	Hafalan Ceramah CBSA	Agama (70%) Umum (30%)
Pendidikan Islam Pada Masa Reformasi (1994)	MI, MTs, MA	<i>Objective Based Curriculum</i>	Ceramah CBSA	Agama (70%) Umum (30%)
Pendidikan Islam Pada Masa Reformasi (2004)	MI, MTs, MA	<i>Competency Based Curriculum</i>	PAIKEM CTL	Agama (70%) Umum (30%)

Waktu	Bentuk	Kurikulum	Metode	Materi
Pendidikan Islam Pada Masa Reformasi (2006)	MI, MTs, MA	<i>KTSP</i>	PAIKEM CTL Inquiry dsb	Agama (70%) Umum (30%)

Demikianlah pengembangan dan pembaharuan bentuk struktur kurikulum madrasah di Indonesia yang bervariasi sesuai dengan perkembangan zaman (Hanif Fathoni, 2020: 94-96).

Pada dasarnya perubahan kurikulum merupakan suatu hal yang akan terus terjadi kapan saja sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman yang begitu sangat cepat. Cepatnya laju perkembangan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan yang begitu sangat cepat dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa merupakan fenomena yang harus segera ditanggapi dan melakukan penyesuaian dalam pengembangan kurikulum terhadap setiap jenjang pendidikan (Subandi, 2014:18-19).

Sehingga pemerhati pendidikan dari Universitas Gajah Mada (UGM) Slamet Sutrisno mengatakan bahwa Kurikulum merupakan jantungnya dunia pendidikan. Untuk itu, kurikulum dimasa depan perlu dirancang dan disempurnakan guna meningkatkan kualitas pendidikan secara Nasional (Ayu Ratih Rizki Paradika, 2020: 9).

Perubahan kurikulum pendidikan yang terjadi di Indonesia yang terbaru adalah Kurikulum 2013. Penetapan diberlakukannya kurikulum 2013 oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 A Tahun 2013 tentang pelaksanaan kurikulum 2013

adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. dengan berbagai pertimbangan yang ada dan melihat kondisi dilapangan, pelaksanaan kurikulum 2013 tidak langsung diterapkan pada tahun Ajaran 2013/2014 untuk seluruh sekolah/madrasah, melainkan dilakukan uji coba di beberapa sekolah di beberapa wilayah di Indonesia yang dianggap memiliki kemampuan atau kesiapan untuk melaksanakan (Mulyani Mudis Taruna, 2014: 207).

Penerapan kurikulum 2013 dimadrasah dengan mempertimbangkan dan melihat persiapan personel serta anggaran yang ada di Kementerian Agama, maka penerapan kurikulum 2013 dimadrasah baru mulai pada tahun ajaran 2014/2015 dan baru diterapkan pada kelas I, IV, VII, dan IX saja. Hal ini sesuai dengan Edaran Dirjen Pendis Kementerian Agama Republik Indonesia No. SE/Dj.I/PP/00/50/2013 (Dirjen Pendis Kemenag RI, 2013) yang ditandatangani langsung oleh Dirjen Pendis pada tanggal 8 Juli 2013 (Andi Prastowo, 2018:113).

Adanya perubahan kurikulum dimadrasah terutama untuk mata pelajaran PAI hal ini sebagaimana diperkuat melalui Keputusan Menteri Agama (KMA Nomor 183 Tahun 2019), dan (KMA Nomor 184 Tahun 2019) dimana tujuan utama dari perubahan kurikulum Pendidikan Agama Islam ini adalah untuk mencetak dan mempersiapkan generasi Indonesia supaya memiliki mindset serta memiliki sikap dalam menjalankan keagamaan yang *moderat, inklusif, berbudaya, religius* serta mempunyai kecakapan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang *beriman, bertakwa, berakhlak mulia, produktif, kreatif, inovatif, dan kolaboratif* serta mampu menjadi bagian dari solusi terhadap persoalan dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia (KMA 183, 2019: 9).

Dengan adanya KMA tersebut, Pada akhirnya Seiring dengan berjalannya waktu Kurikulum 2013 kini telah dijalankan di madrasah mulai dari tingkat MI, MTs, dan MA. Menyikapi perubahan ini mau tidak mau, siap tidak siap baik lembaga satuan pendidikan maupun guru yang bersangkutan harus siap menjalankan kurikulum 2013 ini dengan sebaik mungkin.

C. Kurikulum Sekolah

Sekolah umum mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, maupun SMK merupakan lembaga pendidikan umum yang mana didalamnya diajarkan beberapa mata pelajaran yang universal. Pada sekolah umum kurikulum pembelajaran di sekolah orientasinya hanya sebatas penguasaan dan pemahaman ilmu pengetahuan, material dan fisikal, kemudian untuk pembelajaran kurikulumnya juga sangat terbatas, sehingga semua itu ikut melatarbelakangi sistem pendidikan persekolahan menjadi terkesan berorientasi pada kognitif (Lilis Lutviyatun Ni'mah, 2020: 154).

Salah satu mata pelajaran yang diajarkan di sekolah ialah mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. PAI ini merupakan mata pelajaran yang wajib diselenggarakan oleh satuan lembaga pendidikan di Indonesia. Mulai dari tingkat TK, SD, SMP, SMA bahkan sampai pada jenjang perguruan tinggi materi PAI sebagai salah materi yang wajib diajarkan kepada para peserta didik.

Dalam UU RI tercantum dengan sangat jelas, tepatnya dalam UU Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional. Pada pasal 37 ayat (1) dinyatakan bahwa "*Kurikulum*

Pendidikan Dasar dan Menengah wajib memuat: Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan...; ayat (2) Kurikulum Pendidikan Tinggi Wajib memuat pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, dan bahasa”.

Penjelasan pasal 37 ayat (1) berbunyi: *“Pendidikan Agama dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak Mulia”*. Kemudian pada pasal 36 ayat (3) dinyatakan bahwa: *“Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab”* (Nuril Karim & Agus Fakhruddin, 2019: 81).

Pendidikan Agama Islam disekolah sebagai upaya pembentukan spiritual dan karakter positif (*akhlak al-karimah*) para peserta didik. Berbagai aktivitas dan usaha-usaha tindakan serta bimbingan yang dilakukan secara sadar serta terencana yang mengarah pada terbentuknya kepribadian peserta didik yang sesuai dengan norma-norma ajaran agama islam. Sehingga tujuan utama dari PAI ini adalah mempersiapkan generasi bangsa Indonesia agar memiliki kecakapan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif serta mampu memberikan kontribusi yang nyata pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban duni.

Dalam penerapan mata pelajaran pendidikan Agama Islam disekolah terbagi menjadi dua bagian kebijakan, yakni: **Pertama**, Kebijakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dimana Pendidikan Agama Islam sebagai mata pelajaran wajib untuk semua satuan pendidikan kategori sekolah dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Umum (SMU), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Untuk satuan pendidikan tersebut, Pendidikan Agama Islam disampaikan secara terintegrasi. **Kedua**, Kebijakan oleh Kementerian Agama, dimana Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam untuk semua tingkatan madrasah, meliputi Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA). Pendidikan Agama Islam pada satuan pendidikan tersebut diajarkan secara terpisah meliputi: Al-Qur'an, Hadits, Akidah, Akhlak, dan Sejarah kebudayaan Islam (Fauzan & dkk, 2019: 313).

Pendidikan Agama Islam di sekolah umum pada dasarnya lebih diorientasikan terhadap tataran *moral activity*, yakni agar peserta didik tidak hanya berhenti pada tataran kompetensi (*competence*), tetapi sampai memiliki kemauan (*will*) dan kebiasaan (*habit*) dalam mewujudkan ajaran dan nilai-nilai agama tersebut dalam kehidupan sehari-hari (Muhaimin, 2009: 313).

Pendidikan Agama Islam disekolah umum terselenggara sebagai upaya pengintegrasian pendidikan Islam ke dalam sistem sekolah yang kurikulumnya berorientasi pada pengetahuan umum. Pendidikan Agama Islam di sekolah umum mencakup lima aspek, yaitu: *al-Qur'an-Hadis*, *Keimanan*, *Akhlak*, *Fiqih*, dan bimbingan ibadah serta tarikh/sejarah (Lilis Lutviyatun Ni'mah, 2020:159).

Kelima aspek tersebut dengan ketentuan atau penekanan yang berbeda-beda, **Pertama**, *Aspek al-Qur'an-Hadits* menekankan kepada kemampuan baca tulis yang baik dan benar, memahami makna secara tekstual serta mengamalkan kandungannya dalam kehidupan sehari-hari. **Kedua**, *Aspek Akidah* menekankan kepada kemampuan memahami dan mempertahankan keyakinan atau keimanan yang benar serta menghayati dan mengamalkan nilai-nilai *asma'ul husna*. **Ketiga**, *Aspek Akhlak* menekankan kepada pembiasaan untuk melaksanakan akhlak terpuji dan menjauhi akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari. **Keempat**, *Aspek Fiqih* menekankan pada kemampuan cara melaksanakan ibadah dan muamalah yang benar dan baik. **Kelima**, *Aspek Tarikh* (sejarah) menekankan pada mengambil *ibrah* (hikmah) dari peristiwa-peristiwa bersejarah dalam masyarakat islam, meneladani tokoh-tokoh berprestasi dan mengaitkannya dengan fenomena-fenomena sosial, budaya, politik, ekonomi, iptek dan lain-lain untuk mengembangkan kebudayaan dan peradaban islam (Ali Mustofa, 113).

Melihat pada orientasi mata pelajaran PAI di sekolah yang notabene non-madrasah (sekolah umum), mata pelajaran pendidikan Agama Islam (PAI) hanya satu, dan porsinya hanya dua jam perminggu. Namun demikian didalamnya pada dasarnya meliputi Al-Qur'an-Hadits, Keimanan (Akidah), Akhlak, Ibadah-Syari'ah-Mu'amalah (fikih), dan sejarah kebudayaan islam. Tentu hal ini sangat jauh berbeda dengan Kurikulum Madrasah, Kurikulum PAI dimadrasah satu persatu dipelajari secara komprehensif.

BAB X

MODEL DESAIN KURIKULUM

Menurut Brown dan Green (2016:4) bahwa desain kurikulum merupakan perencanaan tentang cara yang tepat untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Sedangkan Richey, dkk (2011:2) memandang lebih luas bahwa desain kurikulum merupakan serangkaian proses sistematis dan reflektif dalam menerjemahkan prinsip pembelajaran pada rancangan pembelajaran yang mencakup materi, kegiatan belajar, sumber belajar dan sistem evaluasi.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa desain merupakan proses perencanaan dan pengembangan kurikulum yang memuat suatu konsep berdasarkan teori dan prinsip operasional desain, sebagai pedoman pelaksanaan pendidikan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Menurut Murray Print (dalam Ansyar, 2015: 287), desain kurikulum diartikan sebagai pemaparan komponen kurikulum dan bagaimana komponen tersebut saling terkait. Desain menjadi hal yang sangat penting dalam upaya mengembangkan teori, sebab teori tersebut merangkum secara efektif dan efisien terhadap sekumpulan data dan fenomena yang kompleks untuk disajikan secara sederhana sehingga mudah dipahami. Berikut dikemukakan beberapa model desain kurikulum, diantaranya; a) desain kurikulum *subject academic*; b) desain kurikulum kompetensi atau teknologi; c) desain kurikulum humanistik; dan d) desain kurikulum rekonstruksi sosial.

A. Desain Kurikulum *Subject Academic*

Desain kurikulum *subject academic*, didasarkan pada sistematika disiplin ilmu. Dalam proses pengembangannya dilakukan dengan cara menetapkan terlebih dahulu mata pelajaran apa yang harus dipelajari oleh peserta didik. Materi ilmu yang telah dikembangkan oleh para ahli kemudian diorganisasikan secara sistematis sesuai dengan tujuan pendidikan dan tahap perkembangan peserta didik. Tujuan desain kurikulum *subject academic* adalah memberikan pengetahuan yang sistematis, logis, dan solid (Muhaimin, 2005:140).

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan, desain kurikulum *subject academic* tidak hanya menekankan pada isi materi pelajaran semata, melainkan memperhatikan juga proses belajar. Sukmadinata (2000:72) menyatakan, ada tiga pendekatan dalam pengembangan desain kurikulum *subject academic*, yaitu: 1) pendekatan struktur pengetahuan, peserta didik tidak hanya menghafal, tetapi belajar bagaimana memperoleh materi pelajaran dan mengujinya berdasarkan fakta-fakta; 2) studi bersifat integratif, merupakan respons terhadap kebutuhan masyarakat yang menuntut suatu pengetahuan yang lebih komprehensif dan terpadu; dan 3) materi yang diajarkan tetap menekankan kegiatan belajar dalam bentuk menulis, membaca, dan memecahkan masalah-masalah sistematis.

B. Desain Kurikulum Kompetensi atau Teknologi

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dibidang pendidikan berkembang juga teknologi pendidikan. Aliran ini ada persamaanya dengan pendidikan

klasik, yaitu menekankan isi kurikulum namun bukan diarahkan untuk pengelolaan ilmu, melainkan diarahkan pada penguasaan kompetensi. Suatu kompetensi yang luas atau umum diuraikan menjadi kompetensi yang lebih spesifik dan akhirnya menjadi perilaku-perilaku yang dapat diukur dan diamati.

Desain kurikulum kompetensi atau teknologi bertolak dari analisis kompetensi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah direncanakan. Menurut Muhaimin (2005:146) bahwa desain kurikulum kompetensi atau teknologi menggunakan pendekatan sistem dalam menganalisis masalah belajar, merencanakan, mengelola, melaksanakan, dan mengevaluasinya.

Penerapan teknologi dalam bidang pendidikan khususnya kurikulum terbagi dalam dua bentuk, yaitu perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*). Penerapan teknologi perangkat keras dikenal dengan teknologi alat, sedangkan penerapan teknologi perangkat lunak dikenal dengan teknologi sistem. Berikut diuraikan penerapan teknologi dalam praktek kurikulum, yaitu; 1) teknologi sistem, artinya pembelajaran tidak harus membutuhkan alat dan media, melainkan pembelajaran disusun secara sistematis dan komprehensif; 2) teknologi alat, yaitu kegiatan pembelajaran ditunjang dengan pemanfaatan media, alat, dan kawasan teknologi pendidikan.

C. Desain Kurikulum Humanistik

Desain kurikulum humanistik bertolak dari ide memanusiakan manusia. Penciptaan konsteks yang memberikan peluang terhadap manusia untuk menjadi

individu yang lebih humanis sekaligus bertujuan mempertinggi harkat dan martabat manusia. Praktek kurikulum humanistik menekankan bahwa peserta didik memiliki potensi, kemampuan, dan kekuatan untuk berkembang.

Sehingga peran kurikulum tidak hanya mengarahkan pada peningkatan kemampuan intelektual, tetapi juga segi sosial dan afektif (emosi, sikap, dan nilai). Pada ranah evaluasi, kurikulum ini lebih mengutamakan proses daripada hasil. Hal ini merupakan dasar filosofis, dasar teori, dasar evaluasi dan dasar pengembangan program pendidikan yang sesuai dengan nilai humanisme (Muhaimin, 2005:156).

Menurut Sukmadinata (2000:74), kurikulum humanistik memiliki karakteristik sebagai berikut; 1) kurikulum humanistik menekankan adanya partisipasi peserta didik dalam proses pembelajaran; 2) integrasi melalui partisipasi dalam kegiatan pembelajaran mendorong terjadinya interaksi antar peserta didik; 3) relevansi, konten kurikulum relevan dengan kebutuhan, minat, dan kepentingan peserta didik karena disesuaikan dengan tumbuh kembang peserta didik; 4) pribadi peserta didik, kurikulum humanistik memberikan tempat utama pada kepribadian peserta didik; dan 5) kurikulum humanistik bertujuan mengembangkan pribadi peserta didik yang utuh dan serasi, baik dalam dirinya maupun dengan lingkungannya secara menyeluruh.

D. Desain Kurikulum Rekontruksi Sosial

Desain kurikulum rekontruksi sosial bertolak dari persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Menurut Sukmadinata (2000:77), kurikulum rekontruksi sosial diarahkan untuk memaksimalkan keberadaan ilmu dan teknologi, serta bekerja

secara kooperatif sebagai upaya merumuskan pemecahan masalah dalam kehidupan masyarakat menuju pembentukan masyarakat yang lebih baik.

Kurikulum rekontruksi sosial selain menekankan isi atau konten pembelajaran, desain kurikulum ini juga mengutamakan proses pendidikan dan pengalaman belajar. Desain kurikulum rekontruksi sosial menyatakan bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang dalam kehidupannya senantiasa membutuhkan manusia lain, selain hidup bersama, yaitu berinteraksi dan bekerja sama.

Dalam kurikulum rekontruksi sosial, bahwa belajar tidak hanya secara individu, tetapi juga kegiatan belajar yang dilakukan secara bersama, kerja sama, dan interaksi dengan lingkungan sekitar. Tujuan utama kurikulum rekontruksi sosial adalah menghadapkan para peserta didik pada tantangan, hambatan, dan persoalan yang dihadapi masyarakat guna merumuskan dan berupaya memecahkan persoalan tersebut.

Tantangan maupun persoalan yang dihadapi masyarakat merupakan bagian dari bidang garapan ilmu sosial, yang harus dikaitkan dengan bidangbidang ilmu lain seperti ekonomi, sosiologi, psikologi, kebudayaan, estetika, bahkan pengetahuan alam, dan matematika.

Berdasarkan tinjauan desain-desain kurikulum di atas, peneliti lebih condong atau mengacu pada desain kurikulum rekontruksi sosial. Hal ini karena dalam penelitian pengembangan desain kurikulum ini diarahkan untuk menjawab dan memecahkan persoalan sosial masyarakat. Selain itu desain kurikulum rekontruksi sosial tidak hanya menekankan isi atau konten kurikulum, melainkan juga mengutamakan proses penyampaian pengalaman belajar.

E. Model Pengembangan Kurikulum

Model pengembangan kurikulum merupakan gambaran atas elemenelemen kurikulum, hubungan antar elemen, serta proses pengembangan dan implementasi kurikulum. Pengembangan kurikulum berkisar pada pengembangan aspek ilmu pengetahuan, teknologi dan perkembangan peserta didik. Dalam proses pengembangan kurikulum harus dilakukan secara akurat dan terseleksi serta memiliki tingkat relevansi yang kuat dengan kepentingan peserta didik. Maka dalam merealisasikannya, diperlukan suatu model pengembangan kurikulum dengan desain yang tepat.

Pengembangan kurikulum harus didasarkan pada faktor-faktor yang konstan sehingga ulasan mengenai model-model yang diterapkan dapat dilakukan secara konsisten. Faktor-faktor konstan yang dimaksud dalam model pengembangan kurikulum harus didasarkan pada tujuan, bahan pelajaran, proses pembelajaran, dan evaluasi yang tergambarkan dalam proses pengembangan tersebut. Berikut diuraikan model pengembangan kurikulum.

1. Model Bobbit dan Charters

Menurut model ini pengembangan kurikulum bertujuan untuk menemukan kegiatan yang berkontribusi pada pencapaian kehidupan yang baik bagi peserta didik seperti kemampuan personal yang berkualitas, sehingga peserta didik bisa fungsional di masyarakat. Lebih lanjut Franklin Bobbit (Ornstein & Hunkins, 2013:180) menegaskan bahwa tujuan pendidikan harus dijabarkan dari hasil analisis terkait kegiatan aktual dan pengalaman kehidupan masyarakat, sehingga kompetensi

yang diperoleh dapat digunakan peserta didik dalam kehidupannya.

Sejalan dengan hal tersebut, Werrett Charters (Ornstein & Hunkins, 2013:181) mengungkapkan bahwa perubahan kurikulum selalu didahului modifikasi konsep tentang tujuan pendidikan. Tujuan yang ideal memengaruhi seleksi konten dan pengalaman peserta didik di sekolah. Lebih lanjut Charters merumuskan empat langkah kontruksi atau prosedur pengembangan kurikulum; (1) seleksi objektif, (2) memilah kegiatan yang ideal, (3) menganalisis untuk menentukan batas setiap unit kegiatan, dan (4) menentukan metode pencapaiannya.

Bobbitt dan Charters (Ornstein & Hunkins, 2013: 181) menyatakan bahwa pengembangan kurikulum yang efektif merupakan proses yang menghasilkan program pendidikan yang bermakna. Kaitan antara tujuan kurikulum, objek atau konten kurikulum, dan kegiatan belajar haruslah berjalan seimbang dan setara. Hal ini karena seleksi tujuan sebagai suatu proses ilmiah, sedangkan seleksi objek atau konten dan kegiatan belajar merupakan proses empiris dan ilmiah. Dengan demikian, pelaksanaan kurikulum dalam bentuk kegiatan belajar dapat direncanakan, diteliti, dan dievaluasi secara sistemik. Sehingga kurikulum dapat selalu dikembangkan menuju optimalisasi pembelajaran yang relevan dengan capaian tujuan pendidikan.

2. Model Ralph Tyler

Model ini dikenal sebagai objectives model, rational, behavioral, atau *means-end* model. Ralph Tyler (Brady & Kennedy, 2013:162), merumuskan prosedur

pengembangan kurikulum berdasarkan jawaban atas empat pertanyaan prinsip, yaitu; 1) apa tujuan pendidikan yang harus dicapai?; 2) pengalaman belajar apa yang harus dimiliki peserta didik agar tujuan tersebut tercapai?; 3) bagaimana pengalaman itu disusun agar efektif?; dan 4) bagaimana mengevaluasi untuk mengetahui efektivitas kurikulum yang dikembangkan?.

Penjabaran terkait empat prinsip prosedur pengembangan tersebut diuraikan oleh Ornstein & Hunkins (2013:181) sebagai berikut, prinsip pertama tentang tujuan yang hendak dicapai. Tujuan merupakan sasaran umum pendidikan yang berasal dari hasil identifikasi mata pelajaran, perkembangan peserta didik, dan kebutuhan masyarakat. Kemudian data tersebut disaring melalui filsafat, psikologi belajar, dan hakikat masyarakat yang menghasilkan tujuan instruksional.

Prinsip kedua, tentang pengalaman belajar. Kurikulum bukan hanya fokus pada pembelajaran konten atau materi, tetapi pada upaya untuk menghasilkan pengalaman belajar yang harus dimiliki peserta didik agar tujuan tercapai. Artinya kurikulum tidak hanya fokus pada pembelajaran konten saja, tetapi disertai kegiatan peserta didik untuk mentransformasi konten menjadi pengalaman belajar.

Prinsip ketiga, organisasi pengalaman belajar. Pengalaman belajar disusun secara sistematis untuk memperoleh efek akumulatif yang maksimal. Hal ini karena organisasi semua elemen berpengaruh signifikan terhadap efektivitas dan efisiensi pembelajaran dan tingkat perubahan yang dialami peserta didik. Elemen

kurikulum yang dimaksud mencakup pengetahuan, konsep, ide, nilai, dan keterampilan. Semua elemen tersebut harus disusun secara sistematis agar efektivitas kurikulum tercapai.

Prinsip keempat tentang evaluasi rancangan kurikulum dan implementasinya di sekolah. Evaluasi berperan dalam upaya mengetahui tingkat keberhasilan kurikulum dan pelaksanaannya di sekolah. Jika hasil menunjukkan efektivitas kurikulum yang signifikan, desain tersebut dilanjutkan, tetapi jika tidak efektif, perlu ditetapkan strategi perbaikan kurikulum dan pelaksanaannya.

3. Model Hilda Taba: *Grassroots Rationale*

Taba dalam (Ornstein & Hunkins, 2013:182) mengungkapkan, bahwa prosedur pengembangan kurikulum haruslah mempertimbangkan dua muatan kurikuler, yaitu: 1) konten, yang merupakan organisasi logis kurikulum; dan 2) individu atau peserta didik, yang merupakan organisasi psikologis kurikulum. Kurikulum terdiri atas elemen penting, yaitu seleksi dan organisasi konten kurikulum yang berimplikasi atau manifestasi pada pola pembelajaran, termasuk evaluasi hasil belajar.

Menurut Ornstein & Hunkins (2013:182) prosedur pengembangan kurikulum model ini terdiri atas tujuh langkah utama, yaitu: 1) diagnosis atau mengidentifikasi kebutuhan peserta didik; 2) menspesifikasi objek atau tujuan kurikulum; 3) seleksi konten kurikulum; 4) mengorganisasi konten kurikulum ke dalam urutan yang tepat berdasarkan tingkat kematangan, prestasi akademik, bakat, dan minat peserta didik; 5) seleksi pengalaman belajar dengan merumuskan metode

instruksional yang tepat bagi karakteristik peserta didik; 6) organisasi kegiatan pembelajaran; dan (7) menentukan prosedur dan metode evaluasi yang bertujuan untuk mengetahui ketercapaian objek. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa prosedur pengembangan kurikulum ini bisa dikategorikan dalam merefleksikan desain kurikulum yang berasal dari akar rumput pendidikan, yang mengakomodir kebutuhan peserta didik.

4. Model Backward-Design

Ornstein & Hunkins, (2013:182) mengungkapkan bahwa model ini dikembangkan dengan dua tahap utama. Tahap pertama, yaitu statemen tentang hasil yang diinginkan. Apa yang ingin dicapai? Apa yang harus diketahui dan dapat dilakukan oleh peserta didik? Nilai dan sikap apa yang harus dianut peserta didik? Keterampilan dan kemampuan apa yang harus dikuasai dan dilakukan peserta didik? Pada tahap ini harus diidentifikasi mengenai tujuan pembelajaran yang sesuai dengan standar konten nasional, daerah, dan lokal serta seleksi konten yang relevan dengan pencapaian tujuan pendidikan.

Pada tahap kedua, bagaimana kurikulum akan dievaluasi setelah diimplementasikan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui tingkat ketercapaian peserta didik dalam proses pembelajaran. Beberapa metode yang bisa dipakai dalam metode evaluasi ini antara lain, cek informal, observasi peserta didik, dialog dengan peserta didik, kuis atau tes, dan tugas proyek (Ornstein & Hunkins, 2013:183).

5. Model Deckler Walker

Deckler Walker berpendapat (Idi, 2013:192) bahwa, pengembang kurikulum harus mengikuti pendekatan yang telah ditentukan dari urutan yang rasional dari elemen-elemen kurikulum. Hal ini berasal dari analisis Walker terhadap laporan proyek kurikulum serta partisipasinya dalam proyek pengembangan kurikulum kesenian. Analisis Walker menguraikan apa yang telah dilihat sebagai model alami dalam proses kurikulum.

6. Model D.K Wheeler atau Curriculum Process.

Idi (2013:185) menyatakan bahwa pendekatan yang digunakan Wheeler dalam mengembangkan kurikulum pada dasarnya memiliki bentuk rasional. Wheeler merumuskan lima langkah atau prosedur pengembangan yang saling keterkaitan dalam proses kurikulum. Lima langkah tersebut, jika dikembangkan dengan logis dan temporer akan menghasilkan suatu kurikulum yang efektif. Langkah-langkah pengembangan kurikulum tersebut adalah sebagai berikut; 1) merumuskan tujuan dan sasaran kurikulum; 2) merumuskan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan; 3) merumuskan konten kurikulum; 4) pengorganisasian dan integrasi pengalaman belajar dengan konten kurikulum yang berkenaan pada proses pembelajaran; dan 5) merumuskan teknik evaluasi sebagai instrumen mengukur tingkat ketercapaian tujuan kurikulum.

BAB XI

PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN KARAKTER

A. Hakekat, Tujuan dan Fungsi Pendidikan Karakter

1. Hakekat Pendidikan Karakter

Kurikulum merupakan salah satu komponen yang memiliki peran penting dalam sistem pendidikan. Di dalamnya tidak hanya mengandung rumusan tujuan yang harus dicapai, tetapi juga pemahaman tentang pengalaman belajar yang harus dimiliki oleh setiap peserta didik. Begitu pentingnya fungsi dan peran kurikulum dalam menentukan keberhasilan pendidikan, karena itu kurikulum harus dikembangkan dengan pondasi yang kuat. Pengembangan kurikulum pada hakekatnya adalah proses penyusunan rencana tentang isi dan bahan pelajaran yang harus dipelajari serta bagaimana cara mempelajarinya. Hasil evaluasi tersebut kemudian dijadikan bahan dalam menentukan orientasi, begitu seterusnya hingga membentuk siklus.

Namun demikian, persoalan mengembangkan kurikulum bukan merupakan hal yang sederhana dan mudah. Menentukan isi atau muatan kurikulum harus berangkat dari visi, misi, serta tujuan yang ingin dicapai, sedangkan menentukan tujuan yang ingin dicapai erat kaitannya dengan persoalan sistem nilai dan kebutuhan masyarakat. David Pratt (1980) mengemukakan bahwa istilah lebih mengena dibandingkan dengan pengembangan yang mengandung konotasi bersifat

gradual. Desain adalah proses yang disengaja tentang suatu pemikiran, perencanaan dan penyeleksian bagian-bagian, teknik dan prosedur yang mengatur suatu tujuan atau usaha. Dengan pengertian tersebut, pengembangan kurikulum diartikan sebagai proses atau kegiatan yang disengaja dan dipikirkan untuk menghasilkan sebuah kurikulum sebagai pedoman dalam proses dan penyelenggaraan oleh guru di sekolah.

Seller dan Miller (1985) mengemukakan bahwa proses pengembangan kurikulum adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terus menerus, yang meliputi orientasi, pengembangan, implementasi dan evaluasi. Seller memandang bahwa pengembangan kurikulum harus dimulai dari menentukan orientasi yakni kebijakan-kebijakan umum meliputi enam aspek: tujuan pendidikan, pandangan tentang anak, pandangan tentang proses pembelajaran, pandangan tentang lingkungan, konsep tentang peranan guru dan evaluasi. Berdasarkan orientasi selanjutnya dikembangkan kurikulum menjadi pedoman pembelajaran, diimplementasikan dalam bentuk proses pembelajaran dan dievaluasi.

Pengembangan kurikulum pada hakekatnya pengembangan komponen-komponen yang membentuk sistem kurikulum itu sendiri serta pengembangan komponen pembelajaran. Dengan demikian maka pengembangan kurikulum memiliki dua sisi yang sama penting, satu sisi sebagai pedoman yang kemudian membentuk kurikulum tertulis (*written curriculum* atau *document curriculum*) dan sisi kurikulum sebagai implementasi (*curriculum implementation*) yaitu sistem pembelajaran.

Proses pengembangan memiliki pengertian berbeda dengan perubahan dan pembinaan kurikulum. Perubahan kurikulum merupakan atau proses yang disengaja manakala berdasarkan hasil evaluasi ada salah satu atau beberapa komponen yang harus diperbaiki atau diubah, sedangkan pembinaan adalah proses untuk mempertahankan dan menyempurnakan kurikulum yang sedang dilaksanakan.

Hakekat pendidikan karakter adalah dalam konteks pendidikan Indonesia adalah pendidikan nilai, yaitu pendidikan nilai-nilai luhur yang bersumber dari budaya bangsa Indonesia sendiri dalam rangka membina kepribadian generasi muda. Pada dasarnya pendidikan tidak hanya membangun manusia dari sisi kognitifnya saja tetapi juga sisi lain yang lebih fundamental yaitu hati generasi muda Indonesia yang harus diperbaiki sehingga melahirkan generasi yang cerdas.

2. Tujuan dan Fungsi Pendidikan Karakter

Fungsi pendidikan karakter adalah untuk mengembangkan potensi dasar seorang anak agar berhati baik, berperilaku baik, serta memiliki pikiran yang baik. Selain itu pendidikan karakter juga berfungsi untuk meningkatkan peradaban manusia dan bangsa yang baik dalam pergaulan dunia. Selanjutnya pendidikan karakter juga berfungsi untuk membangun dan memperkuat perilaku masyarakat yang multikultur.

B. Nilai-Nilai Pembentukan dan Proses Pendidikan Karakter

Nilai-nilai pendidikan karakter bagi siswa yang duduk di Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah: Religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif,

mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan dan peduli sosial.

1. Religious

Diwujudkan dalam perilaku melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut, menghargai perbedaan agama dan kepercayaan lai.

2. Nasionalis

Ditunjukkan melalui apresiasi budaya bangsa sendiri, menjaga lingkungan, taat hukum, disiplin, menghormati keragaman budaya, suku dan agama.

3. Integritas

Meliputi sikap tanggung jawab, konsistensi tindakan dan perkataan yang berdasarkan kebenaran, menghargai martabat individu serta mampu menunjukkan keteladanan.

4. Mandiri

Menjadi pembelajar sepanjang hayat, mempergunakan segala tenaga, pikiran, waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi dan cita-cita.

5. Gotong Royong

Diharapkan peserta didik menunjukkan sikap menghargai sesama, dapat bekerja sama, inklusif, tolong menolong, memiliki empati dan rasa solidaritas.

C. Strategi Pelaksanaan Pendidikan Karakter

Strategi pelaksanaan pendidikan karakter dibuat mulai dari pemerintah pusat sampai ke tataran keluarga. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan karakter

harus mendapatkan dukungan dari semua pihak. Strategi yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan pendidikan karakter dimulai dari pemerintah pusat (top-down) dengan kebijakannya tentang pelaksanaan pendidikan karakter, strategi dalam pengalaman praktisi (bottom-up) seperti yang dilakukan beberapa lembaga yang konsen dengan perbaikan karakter bangsa, misalnya: The ESQ Way 165 dan melalui strategi revitalisasi program penunjang pendidikan karakter yang terintegrasi dalam kegiatan ko-kurikuler dan ekstrakurikuler seperti Pramuka, Palang Merah Remaja, Kantin Kejujuran dan lain-lain. Ketiga strategi tersebut merupakan satu kesatuan yang saling menguatkan, yaitu top-down, yang lebih bersifat intervensi, bottom up yang lebih bersifat penggalan best practice dan habituasi, serta revitalisasi program. Dan hendaknya ketiga program tersebut dilaksanakan secara terintegrasi dalam keempat pilar penting pendidikan karakter di sekolah sebagaimana yang dituangkan dalam Desain Induk Pendidikan Karakter (Kemendiknas, 2010), yaitu: kegiatan pembelajaran di kelas, pengembangan budaya satuan pendidikan, kegiatan ko kurikuler dan ekstrakurikuler.

Pendidikan karakter di sekolah merupakan bagian dari reformasi pendidikan, maka reformasi pendidikan karakter bisa diibaratkan sebagai pohon yang memiliki empat bagian penting, yaitu akar, batang, cabang dan daun. Akar reformasi adalah landasan filosofis (pijakan) pelaksanaan pendidikan karakter harus jelas dan dipahami oleh masyarakat.

Pengintegrasian pendidikan karakter dalam pembelajaran di sekolah penyelenggara dan pelaku pendidikan. Batang reformasi berupa mandat dari pemerintah selaku penanggung jawab penyelenggara pendidikan nasional. Dalam hal ini

standar dan tujuan dilaksanakannya pendidikan karakter harus jelas, transparan dan akuntabel.

Cabang reformasi berupa manajemen pengelolaan pendidikan karakter, pemberdayaan guru dan pengelola pendidikan harus ditingkatkan. Sedangkan reformasi adalah adanya keterlibatan orang tua peserta didik dan masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan karakter yang didukung pula dengan budaya dan kebiasaan hidup masyarakat yang kondusif dan sekaligus menjadi teladan bagi peserta didik dalam bersikap dan berperilaku sehari-hari.

Berkaca pada sejarah pendidikan di Indonesia maka pendidikan budi pekerti pernah diberikan dalam bentuk mata pelajaran tersendiri. Selanjutnya pendidikan budi pekerti diintegrasikan kedalam civics dan agama. Khusus mengenai pelajaran civics atau kewarganegaraan ini mengalami beberapa kali perubahan. Pada tahun 1957 mulai diperkenalkan mata pelajaran kewarganegaraan. Tahun 1961 Kewarganegaraan berganti nama menjadi Civics dan berubah lagi pada tahun 1968 menjadi Pendidikan Kewargaan Negara (PKN).

Pada kurikulum 1975 dimulai babak baru pendidikan Civics di Indonesia dengan memakan nama Pendidikan Moral Pancasila. Mata pelajaran ini terkandung maksud sebagai penanaman nilai-nilai luhur Pancasila pada generasi muda. Nama pelajaran ini dipertahankan pada kurikulum 1984.

Pada tahun 1994, Pendidikan Civics berubah lagi menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN). PPKN 1994 sebagai penggabungan bahan kajian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang tampil dalam bentuk pengajaran konsep nilai yang disaripatkan dari Pancasila dan P4. Pada

buku-buku pelajaran PPKN persekolahan kita melihat adanya integrasi budi pekerti pada pelajaran tersebut.

Dari paparan di atas sebenarnya upaya melakukan pendidikan budi pekerti di Indonesia telah dilakukan, yaitu dalam bentuk pengintegrasian pendidikan tersebut ke dalam mata pelajaran yang relevan seperti agama dan PPKn. Namun dengan fenomena krisis moral seperti sekarang ini, pendidikan yang bernuansakan budi pekerti seperti agama dan PPKn tersebut dianggap telah gagal dalam menjalankan misinya. Kegagalan ini disebabkan karena beberapa hal. Pertama, pelajaran-pelajaran yang mengembangkan karakter bangsa seperti Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Pendidikan Agama, Ilmu Pengetahuan Sosial dalam pelaksanaan pembelajarannya lebih banyak menekankan pada aspek kognitif daripada aspek afektif dan psikomotor. Penilaian dalam mata pelajaran yang berkaitan dengan Pendidikan nilai belum secara total mengukur sosok utuh pribadi siswa.

Pengertian budi pekerti dapat ditinjau secara konsepsional dan secara operasional. Secara konsepsional pendidikan budi pekerti mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik menjadi manusia seutuhnya yang berbudi pekerti luhur dalam segenap peranannya sekarang dan masa yang akan datang.
2. Upaya pembentukan, pengembangan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan perilaku peserta didik agar mereka mau dan mampu melaksanakan tugas-tugas hidupnya secara selaras, serasa dan seimbang (lahir batin, materi spiritual dan individual sosial).

3. Upaya pendidikan untuk membentuk peserta didik mejadi pribadi seutuhnya yang berbudi pekerti luhur melalui kegiatan bimbingan, pembiasaan, pengajaran dan latihan serta keteladanan.

Secara operasional, pendidikan budi pekerti adalah upaya untuk membekali peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan latihan selama pertumbuhan dan perkembangan dirinya sebagai bekal masa depannya, agar memiliki hati nurani yang bersih, berperangai baik, serta menjaga kesusilaan dalam melaksanakan kewajiban terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan terhadap sesama makhluk sehingga terbentuk pribadi seutuhnya, yang tercermin pada perilaku berupa ucapan, perbuatan, sikap, pikiran, perasaan, kerja dan hasil karya berdasarkan nilai-nilai agama serta norma dan moral luhur bangsa.

Budi pekerti berisi nilai-nilai perilaku manusia yang akan diukur menurut kebaikan dan keburukannya melalui ukuran norma agama, norma hukum dan tata krama sopan santun, norma budaya/adat istiadat masyarakat. Budi pekerti akan mengidentifikasi perilaku positif yang diharapkan dapat terwujud dalam perbuatan, perkataan, pikiran, sikap, perasaan dan kepribadian peserta didik. Strategi yang dilakukan dari kurikulum ini adalah pengintegrasian pendidikan budi pekerti. Pendidikan budi pekerti terintegrasi dalam seluruh mata pelajaran terutama mata pelajaran pendidikan agama Islam dan pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan budi pekerti itu makin diperjelas wujudnya, dengan:

1. Penerapan pendidikan budi pekerti bukan hanya pada ranah kognitif saja, melainkan harus berdampak positif

terhadap ranah afektif yang berupa sikap dan perilaku peserta didik dalam kehidupan sehari-hari.

2. Penerapan pengintegrasian budi pekerti dilakukan melalui keteladanan, pembiasaan, pengkondisian lingkungan dan kegiatan-kegiatan spontan serta kegiatan perprogram.
3. Pengembangan nilai-nilai budi pekerti sesuai dengan kondisi peserta didik dan perkembangan masyarakat.

Adapun metode penerapan pendidikan karakter:

1. Metode bercerita (telling story)

Metode ini pada hakikatnya sama dengan metode ceramah, tetapi guru lebih leluasa berimprovisasi. Misalnya melalui perubahan mimik, gerak tubuh, mengubah intonasi suara seperti keadaan yang hendak dilukiskan dan sebagainya.

2. Metode diskusi dan berbagai variannya.

Dalam pembelajaran umumnya diskusi terdiri dari dua macam diskusi, yaitu diskusi kelas (whole group) dan diskusi kelompok. Diskusi kelas umumnya dipimpin oleh guru, bentuk diskusi ini tepat bagi siswa Sekolah Dasar kelas V dan VI. Dalam diskusi kelas itu, karena guru dianggap punya kompetensi dan pengetahuan yang luas serta punya otoritas, maka arah diskusi tetap dapat dikendalikan. Sementara itu, diskusi kelompok dapat berupa kelompok kecil yang anggotanya 2-6 orang atau kelompok yang lebih besar anggotanya dapat mencapai 20 orang, ini biasanya dilakukan bagi anak-anak SMP atau SMA/SMK.

3. Metode Simulasi

Simulasi artinya peniruan terhadap sesuatu, jadi bukan sesuatu yang terjadi sesungguhnya. Dengan demikian orang yang bermain drama atau memerankan sesuatu adalah orang yang sedang menirukan atau membuat simulasi tentang sesuatu. Dalam pembelajaran suatu simulasi dilakukan dengan tujuan agar peserta didik memperoleh keterampilan tertentu, baik yang bersifat profesional maupun yang berguna bagi kehidupan sehari-hari. Dapat pula simulasi ditujukan untuk memperoleh pemahaman tentang suatu konsep atau prinsip serta bertujuan untuk memecahkan sesuatu masalah yang relevan dengan pendidikan karakter.

D. Pengembangan Kurikulum Pendidikan Karakter di Tingkat Satuan Pendidikan

Kurikulum berbasis karakter merupakan proses pengembangan kurikulum untuk penguatan nilai-nilai karakter atau budi pekerti plus (melibatkan aspek pengetahuan, perasaan dan tindakan) peserta didik dengan mengangkat materi atau masalah-masalah yang berkaitan dengan norma atau nilai-nilai, ke dalam topik kurikulum dan dieksplisitkan, dikaitkan dengan konsep-konsep yang ada dalam pokok bahasan.

Konsep kurikulum berkembang sejalan dengan perkembangan teori dan praktek pendidikan, serta bervariasi sesuai dengan aliran atau teori pendidikan yang dianutnya. Dari berbagai konsep tentang kurikulum, pada dasarnya konsep kurikulum dapat dibedakan menjadi empat, yaitu: 1)

kurikulum sebagai rencana, 2). Kurikulum sebagai proses, 3) kurikulum sebagai proses dan 4) kurikulum sebagai sistem.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merumuskan kurikulum sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Dalam perencanaan pendidikan atau pembelajaran dalam suatu kurikulum, yang menjadi fokus adalah tujuan dan atau kompetensi yang hendak dicapai, karena itu semua unsur lainnya dari kurikulum diarahkan pada pencapaian tujuan pada berbagai lingkup pendidikan.

Nilai-nilai pendidikan karakter yang harus diterapkan dalam kurikulum pendidikan adalah religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial dan tanggung jawab.

Tahap pengembangan kurikulum berbasis karakter di sekolah dasar, adalah sebagai berikut: 1). Needs assesment, dengan mengidentifikasi materi atau masalah-masalah yang berkaitan dengan mata pelajaran, menganalisis kurikulum SD yang saat ini digunakan, 2). Merumuskan kompetensi atau tujuan pembelajaran berbasis karakter, 3). Mengembangkan materi atau bahan ajar berbasis karakter, 4). Mengembangkan kegiatan belajar berbasis karakter dan 5) mengembangkan evaluasi.

Pembelajaran berbasis karakter adalah pembelajaran dengan mengangkat materi atau masalah-masalah yang berkaitan dengan norma atau nilai-nilai, ke dalam suatu proses pembelajaran dan menghubungkannya dengan konsep-konsep yang ada di kurikulum, dikaitkan dengan konteks kehidupan peserta didik sehari-hari.

1. Kurikulum Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar (SD)

Berdasarkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional, jelas bahwa pendidikan di setiap jenjang pendidikan termasuk pada jenjang Sekolah Dasar/MI harus diselenggarakan secara sistematis guna mencapai tujuan tersebut. Hal tersebut berkaitan dengan pembentukan karakter peserta didik sehingga mampu bersaing, beretika, bermoral, sopan santun dan dapat berinteraksi dengan masyarakat.

Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyyah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan hidup maupun kebangsaan sehingga menjadi manusia insan kamil. Dalam pendidikan karakter di sekolah, semua komponen harus dilibatkan termasuk komponen-komponen pendidikan itu sendiri, yaitu isi kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian, kualitas hubungan, penanganan atau pengelolaan mata pelajaran, pengelolaan sekolah, pelaksanaan aktivitas atau kegiatan ko-kurikuler, pemberdayaan sarana prasarana, pembiayaan dan etos kerja seluruh warga dan lingkungan sekolah.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kesesuaian dan mutu pendidikan karakter, Kementerian Pendidikan Nasional

mengembangkan Grand Design pendidikan karakter untuk setiap jalur, jenjang dan jenis satuan pendidikan. Grand design menjadi rujukan konseptual dan operasional pengembangan, pelaksanaan dan penilaian pada setiap jalur dan jenjang pendidikan. Konfigurasi karakter dalam konteks totalitas proses sosiologis dan sosial-kultural tersebut dikelompokkan dalam: olah hati (spiritual dan emotional development), olah pikir (intellectual development), olah raga dan kinestetik (physical and kinesthetic development) dan olah rasa dan karsa (affective and creativity development). Pengembangan dan implementasi pendidikan karakter perlu dilakukan dengan mengacu pada grand design tersebut.

Bidang-bidang pengembangan yang ada di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah yang dikembangkan dalam konsep pendidikan kecakapan hidup yang terkait dengan pendidikan personal dan sosial, pengembangan berpikir/kognitif, pengembangan karakter dan pengembangan persepsi motorik juga dapat tersusun dengan baik apabila materi ajarnya dirancang melalui pembelajaran yang terpadu dan menyeluruh (holistik). Pembelajaran holistik terjadi apabila kurikulum dapat menampilkan tema yang mendorong terjadinya eksplorasi atau kejadian-kejadian secara autentik dan alamiah. Dengan munculnya tema atau kejadian yang alami ini akan terjadi suatu proses pembelajaran yang bermakna dan materi yang dirancang akan saling terkait dengan berbagai bidang pengembangan yang ada dalam kurikulum.

Pendidikan karakter merupakan hal yang baru sekarang ini meskipun bukan sesuatu yang baru. Penanaman nilai-nilai sebagai sebuah karakteristik seseorang sudah berlangsung

sejak dahulu kala. Akan tetapi, seiring dengan perubahan zaman, agaknya menuntut adanya penanaman kembali nilai-nilai tersebut kedalam sebuah wadah kegiatan pendidikan di setiap pengajaran.

Penanaman nilai-nilai tersebut dimasukkan (ambeded) ke dalam rencana pelaksanaan pembelajaran dengan maksud agar dapat tercapai sebuah karakter yang selama ini semakin memudar. Setiap mata pelajaran mempunyai nilai-nilai tersendiri yang akan ditanamkan dalam diri anak didik. Hal ini disebabkan oleh adanya keutamaan fokus dari tiap mata pelajaran yang tentunya mempunyai karakteristik yang berbeda-beda.

Distribusi penanaman nilai-nilai utama dalam tiap mata pelajaran dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Pendidikan agama: nilai utama yang ditanamkan antara lain: religius, jujur, santun, disiplin, tanggung jawab, cinta ilmu, percaya diri, menghargai keberagaman, patuh pada aturan, sosial, bergaya hidup sehat, sadar akan hak dan kewajiban diri dan orang lain, kerja keras dan adil.
- b. Pendidikan kewargaan Negaran: nasionalis, patuh pada aturan sosial, demokratis, jujur, menghargai keragaman, sadar akan hak dan kewajiban diri dan orang lain.
- c. Bahasa Indonesia: berfikir logis, kritis, kretatif dan inovatif, percaya diri, bertanggung jawab, ingin tahu, santun dan nasionalis.
- d. Ilmu Pengetahuan Sosial: Nasionalis, menghargai keberagaman, berpikir logis, kritis, kreatif, inovatif, peduli sosial dan lingkungan, berjiwa wirausaha, jujur dan kerja keras.

- e. Ilmu Pengetahuan Alam: ingin tahu, berfikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif, jujur, bergaya hidup sehat, percaya diri, menghargai keberagaman, disiplin, mandiri, bertanggung jawab, peduli lingkungan dan cinta ilmu.
- f. Bahasa Inggris: menghargai keberagaman, santun, percaya diri, mandiri, bekerjasama dan patuh pada aturan sosial.
- g. Seni Budaya: menghargai keberagaman, nasionalis, menghargai karya orang lain, ingin tahu, jujur, disiplin dan demokratis.
- h. Pendidikan Jasmani dan Kesehatan: bergaya hidup sehat, kerja keras, disiplin, jujur, percaya diri, mandiri, menghargai karya orang lain.
- i. TIK/Keterampilan: Berfikir logis, kritis, kreatif dan inovatif, mandiri, bertanggung jawab dan menghargai karya orang lain.
- j. Muatan Lokal: Menghargai kebersamaan, menghargai karya orang lain, nasional dan peduli.

Penanaman nilai inilah yang nantinya diharapkan akan menjadikan peserta didik menjadi lebih berkarakter. Pembelajaran holistik berlandaskan pada pendekatan *inquiry*, dimana anak dilibatkan dalam merencanakan, bereksplorasi dan berbagai gagasan. Anak-anak didorong untuk berkolaborasi bersama teman-temannya belajar dengan cara mereka sendiri. Anak-anak diberdayakan sebagai si pembelajar dan mampu mengajar kebutuhan belajar mereka melalui tema-tema yang dirancang. Sebuah pembelajaran yang holistik hanya dapat dilakukan dengan baik apabila pembelajaran yang akan dilakukan alami, natural, nyata, dekat

dengan diri anak, dan guru-guru yang melaksanakannya memiliki pemahaman konsep pembelajaran terpadu dengan baik. Selain itu juga dibutuhkan kreativitas dan bahan-bahan atau sumber yang kaya serta pengalaman guru dalam berlatih membuat model-model yang tematis juga sangat menentukan kebermaknaan pembelajaran.

Tujuan model pendidikan holistik berbasis karakter adalah membentuk manusia secara utuh (holistik) yang berkarakter, yaitu mengembangkan aspek fisik, emosi, sosial, kreatifitas, spiritual dan intelektual siswa secara optimal. Selain itu untuk membentuk manusia yang *life long learners* (pembelajar sejati) bisa dilakukan dengan beberapa langkah sebagai berikut:

- a. Menerapkan metode belajar yang melibatkan partisipasi aktif murid, yaitu metode yang dapat meningkatkan motivasi murid karena seluruh dimensi manusia terlibat secara aktif dengan diberikan materi pelajaran yang konkret, bermakna serta relevan dalam konteks kehidupannya (*student activ learning, contextual learning, inquiry-based learning, integrated learning*).
- b. Menciptakan lingkungan belajar yang kondusif (*condusif learning community*) sehingga anak dapat belajar dengan efektif dalam suasana yang memberikan rasa menyenangkan, aman, penghargaan, tanpa ancaman dan memberikan semangat.
- c. Memberikan pendidikan karakter secara eksplisit, sistematis, dan berkesinambungan dengan melibatkan aspek *knowing the good, loving the good and acting the good*.

- d. Metode pengajaran yang memperhatikan keunikan masing-masing anak, yaitu menerapkan kurikulum yang melibatkan juga sembilan aspek kecerdasan manusia.
- e. Seluruh pendekatan diatas menerapkan prinsip-prinsip.

Pembentukan kemampuan siswa di sekolah dasar/ madrasah ibtdaiyah dipengaruhi oleh proses belajar yang ditempuhnya. Proses belajar akan terbentuk berdasarkan pandangan dan pemahaman guru tentang karakteristik siswa dan hakikat pembelajaran. Untuk menciptakan proses belajar yang efektif hal yang harus dipahami guru adalah fungsi dan peranannya dalam kegiatan belajar mengajar, yaitu sebagai pembimbing, fasilitator, narasumber dan pemberi informasi.

Membangun peradaban suatu bangsa pada hakikatnya adalah pengembangan watak dan karakter manusia unggul dari sisi intelektual, spiritual, emosional, dan pisikal yang dilandasi oleh fitrah kemanusiaan. Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan maupun kebangsaan sehingga menjadi insan kamil. Dalam pendidikan karakter di sekolah, semua komponen (*stakeholders*) harus dilibatkan, termasuk komponen-komponen pendidikan itu sendiri, yaitu isi kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian, kualitas hubungan penanganan atau pengelolaan pelajaran, pengelolaan sekolah, pelaksanaan aktifitas, pemberdayaan sarana prasarana, pembiayaan dan etos kerja seluruh warga dan lingkungan sekolah.

2. Kurikulum Pendidikan Karakter di SMP/MTs

Berdasarkan kajian nilai-nilai agama, norma-norma sosial, peraturan atau hukum, etika akademik dan prinsip-prinsip HAM telah teridentifikasi 80 butir nilai karakter yang dikelompokkan menjadi lima, yaitu nilai-nilai perilaku manusia dalam hubungannya dengan (1) Tuhan Yang Maha Esa, (2) diri sendiri, (3) sesama manusia, (4) lingkungan (5), kebangsaan. Namun demikian, penanaman kedelapanpuluh tersebut merupakan hal yang sangat sulit. Oleh karena itu, pada tingkat SMP dipilih 20 nilai karakter utama yang disarikan dari butir-butir SKL SMP (Permen Diknas 22 Tahun 2006). Berikut adalah nilai utama yang dimaksud:

- a. Nilai karakter dalam hubungannya dengan Tuhan (Religius), pikiran, perkataan dan tindakan seseorang yang diupayakan selalu berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan dan atau ajaran agamanya.
- b. Nilai karakter dalam hubungannya dengan diri sendiri.
 - 1) Jujur, perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, perbuatan dan pekerjaan, baik terhadap diri dan pihak lain.
 - 2) Bertanggung jawab, sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa.
 - 3) Bergaya hidup sehat, segala upaya untuk menerapkan kebiasaan yang baik dalam menciptakan hidup yang

sehat dan menghindarkan kebiasaan buruk yang dapat mengganggu kesehatan.

- 4) Disiplin, tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.
- 5) Kerja keras, perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan guna menyelesaikan tugas (belajar/pekerjaan) dengan sebaik-baiknya.
- 6) Percaya diri, sikap yakin akan kemampuan diri terhadap pemenuhan akan tercapainya setiap keinginan dan harapannya.
- 7) Berjiwa wirausaha, sikap dan perilaku yang mandiri dan pandai atau berbakat mengenai produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya.
- 8) Berfikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif. Berpikir dan melakukan sesuatu secara kenyataan atau logika untuk menghasilkan cara baru atau hasil baru dan termutakhir dari apa yang dimiliki.
- 9) Mandiri, sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.
- 10) Ingin tahu, sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari apa yang dipelajarinya, dilihat dan didengar.
- 11) Cinta ilmu. Cara berpikir, bersikap dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian dan penghargaan yang tinggi terhadap pengetahuan.

- c. Nilai karakter dalam hubungannya dengan sesama
- 1) Sadar akan hak dan kewajiban diri dan orang lain.
Sikap tahu dan mengerti serta melaksanakan apa yang menjadi milik/hak diri sendiri dan orang lain serta tugas/kewajiban diri sendiri serta orang lain.
 - 2) Patuh pada aturan aturan sosial
Sikap menurut dan taat terhadap aturan-aturan berkenaan dengan masyarakat dan kepentingan umum.
 - 3) Menghargai karya dan prestasi orang lain
Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui serta menghormati keberhasilan orang lain.
 - 4) Santun
Sifat yang halus dan baik dari sudut pandang tata bahasa dan perilakunya ke semua orang.
 - 5) Demokratis
Cara berfikir, bersikap dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain.
- d. Nilai karakter dalam hubungannya dengan lingkungan
- Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi dan selalu ingin memberi bantuan bagi orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.

e. Nilai kebangsaan

Cara berpikir, bertindak dan wawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan diri dan kelompoknya.

1) Nasionalis

Cara berpikir, bertindak dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi dan politik bangsanya.

2) Menghargai keberagaman

Sikap memberikan respek/hormat terhadap berbagai macam hal baik yang berbentuk fisik, sifat, adat, budaya, suku dan agama.

3. Kurikulum Pendidikan Karakter di SMA

Sekolah Menengah Atas (SMA) merupakan tahap pendidikan sekolah akhir sebelum masuk ke Perguruan Tinggi. SMA sebagai lembaga pendidikan tingkat lanjutan adalah salah satu sumber daya yang penting. Kegiatan akademik sangat menuntut konsentrasi siswa sehingga porsi bagi kegiatan sosial akan semakin sedikit. Dorongan untuk berinteraksi secara sosial dengan sesama sangat kurang, padahal hal ini sangat penting dalam pembentukan karakter.

Pendidikan karakter pada tingkat SMA mengajarkan kebiasaan cara berpikir dan perilaku yang membantu individu untuk hidup dan bekerja bersama bersama keluarga, masyarakat dan bernegara serta membantu mereka untuk membuat keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Karakter yang menjadi acuan seperti ini terdapat dalam

The Six Pilars of Character yang dikeluarkan oleh Character Counts. Enam jenis karakter tersebut adalah sebagai berikut:

- a. *Trustworthiness*, bentuk karakter yang membuat seseorang menjadi berintegritas, jujur dan loyal.
- b. *Fairness*, bentuk karakter yang membuat seseorang memiliki pemikiran terbuka serta tidak suka memanfaatkan orang lain.
- c. *Caring*, bentuk karakter yang membuat seseorang memiliki sikap peduli dan perhatian terhadap orang lain maupun kondisi sosial lingkungan sekitar.
- d. *Respect*, bentuk karakter yang membuat seseorang selalu menghargai dan menghargai orang lain.
- e. *Citizenship*, bentuk karakter yang membuat seseorang senantiasa sadar hukum dan peraturan serta peduli terhadap lingkungan alam.
- f. *Responsibility*, bentuk karakter yang membuat seseorang bertanggung jawab, disiplin dan selalu melakukan sesuatu dengan cara yang baik.

E. Pelaksanaan Pendidikan Karakter di Sekolah/Madrasah

Pendidikan sejatinya adalah usaha yang terencana dan sistematis dalam rangka mengoptimalkan semua potensi manusia/peserta didik. Potensi manusia itu termasuk didalamnya adalah karakter manusia. Kesadaran akan kebutuhan karakter baik dalam kehidupan bermasyarakat kini semakin menguat, disisi lain, keluarga sebagai agen utama pendidikan tidak cukup kuat untuk menjalankan fungsi pembangunan karakter setiap anak, sehingga dibutuhkan peran serta sekolah sebagai institusi pendidikan untuk dapat

secara aktif dan sistematis menumbuhkembangkan karakter baik pada setiap peserta didik.

Berangkat dari urgensi penguatan pendidikan karakter, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah menetapkan program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) sebagai salah satu program utamanya yang masuk dalam Nawacita Presiden Joko Widodo. Kebijakan PPK ini menjadi bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). Aspek-aspek perilaku yang menjadi sasaran perubahan adalah perubahan cara berpikir, bersikap dan bertindak menjadi lebih baik. Nilai-nilai utama PPK adalah religius, nasionalis, mandiri, gotong royong dan integritas. Untuk mewujudkannya, perlu implementasi PPK melalui sistem pendidikan nasional agar diketahui, dipahami dan diterapkan diseluruh sendi kehidupan di sekolah dan di masyarakat. Untuk menjadikannya sebagai gerakan nasional, Presiden RI Joko Widodo Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang penguatan Pendidikan Karakter.

Secara konseptual, pendidikan karakter sendiri memiliki banyak konsep. Namun, salah satu yang paling populer adalah konsep pendidikan karakter yang diungkapkan oleh Thomas Lickona. Lickona menjelaskan bahwa pendidikan karakter mengandung 3 unsur, yaitu mengetahui kebaikan (knowing the good), mencintai kebaikan (the siring the good) dan melakukan kebaikan (doing the good). Lickona menetapkan 7 unsur karakter dasar yang harus ditanamkan kepada peserta didik, meliputi:

1. Ketulusan hati atau kejujur (honesty)
2. Belas kasih (compassion)
3. Kegagahberanian (courage)

4. Kasing sayang (kinness)
5. Kontrol diri (self control)
6. Kerjasama (cooporation)
7. Kerja keras (diligent or hard work)

Dalam Perpres nomor 87 Tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter dijelaskan bahwa PPK dilaksanakan dengan menerapkan 18 nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter terutama meliputi nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial dan bertanggung jawab.

Dalam operasionalisasinya, di tingkat satuan Pendidikan, PPK dilaksanakan secara integral dalam kegiatan intrakurikuler, yaitu penguatan nilai-nilai karakter melalui kegiatan penguatan materi pembelajaran, metode pembelajaran sesuai dengan muatan kurikulum. Kemudian melalui kegiatan kokurikuler yaitu penguatan nilai-nilai karakter yang dilaksanakan untuk pendalaman dan/atau pengayaan dan ekstrakurikuler, yaitu penguatan nilai-nilai karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian Peserta Didik secara optimal. Kegiatan-kegiatan dalam rangka PPK dapat dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Kegiatan ekstrakurikuler dapat berupa kegiatan krida, karya ilmiah, latihan olah bakat/olah minat, dan kegiatan keagamaan, serta kegiatan penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Sementara itu, Ki Hajar Dewantara, menjelaskan bahwa penumbuhan nilai karakter dapat dijalankan melalui empat

laku, yaitu olah hati, olah raga, olah karsa dan olah pikir. Untuk itu diperlukan penerjemahan gerakan PPK kedalam aktivitas di sekolah. Dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari di sekolah, penanaman nilai-nilai karakter dapat dilakukan dalam beberapa bentuk kegiatan, meliputi:

1. Literasi sekolah

Kegiatan literasi ini bertujuan membangun budaya literasi di sekolah. Artinya tidak hanya pada siswa saja. Namun ekosistem sekolah. Untuk itu, tidak hanya sebatas penyediaan pojok baca atau aktivitas membaca buku 15 menit sebelum proses kelas dimulai. Namun, lebih luas lagi, berupa penumbuhan budaya literasi di semua warga sekolah, termasuk orang tua siswa. Penyediaan sarana berupa bahan bacaan yang beragam, forum diskusi bagi guru dan tenaga kependidikan untuk membangun literasi juga harus dilakukan sekolah. Kegiatan literasi ini dapat diintegrasikan juga dalam proses pembelajaran, intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler.

2. Kegiatan ekstrakurikuler

Seiring dengan pengarusutamaan Pendidikan karakter di sekolah, pandangan bahwa extra kurikuler adalah sekedar pelengkap harus sudah diubah menjadi bahwa kegiatan ekstrakurikuler adalah bagian terintegrasi dari system Pendidikan di sekolah guna memfasilitasi keragaman bakat, minat dan potensi siswa. Untuk itu, penyediaan Pembina extra kurikuler yang sesuai menjadi penting untuk dilakukan oleh manajemen sekolah.

3. Kegiatan awal dan akhir pembelajaran

Kegiatan awal dan akhir pembelajaran sebenarnya hanya pembagian berdasarkan urutan waktu saja. Sejatinya dua kegiatan tersebut adalah juga kegiatan pembelajaran itu sendiri. Maka tidak dapat dianggap sebagai pelengkap. Penyiapan scenario pembelajaran dari awal hingga akhir harus betul-betul dipehatikan. Mulai dari pengkondisian siswa, berdoa, apersepsi, hingga refleksi dan penutup memiliki nilai yang sama pentingnya.

4. Pembiasaan

Pembiasaan adalah bagian penting dari proses penanaman karakter pada peserta didik. Anak didik yang terbiasa melakukan pekerjaan secara mandiri maka akan terbangun karakter kemandirian pada dirinya. Demikian halnya dengan karakter berupa kemampuan untuk berkolaborasi dengan yang lain bukanlah karakter yang lahir tiba-tiba. Untuk itu, perlu scenario-skenario yang disiapkan dalam pembelajaran untuk membangun nilai-nilai yang diinginkan. Kebiasaan memberikan tugas berkelompok dengan memberi giliran kepada setiap anggota kelompok untuk menjadi ketua kelompok adalah salah satu contoh untuk pembiasaan setiap anak didik berlatih bertanggungjawab sekaligus berkolaborasi.

5. Penetapan tata tertib sekolah

Buatlah tata tertib sekolah dengan jelas dan terapkan secara konsisten. Juga cobalah ajak siswa untuk menyepakati tata tertib di kelas. Penghargaan pada sebuah kesepatan dan keteraturan dapat dilatihkan pada peserta didik dengan mengenalkan siswa pada

tata tertib sekolah atau kelas yang diulang-ulang secara rutin kepada siswa. Pemberlakuan model reward-and-punishment atau reward-unreward juga dapat diterapkan pada peserta didik untuk menghargai tata tertib sekolah.

Semua aktivitas tersebut, dengan dorongan kuat dari pihak sekolah, jika dijalankan secara konsisten akan melahirkan budaya sekolah yang kondusif bagi pembentukan karakter siswa yang memiliki delapan belas nilai-nilai yang diinginkan di dalam Perpres No. 87 tahun 2017.

BAB XII

EVALUASI KURIKULUM

A. Pengertian Evaluasi Kurikulum

Evaluasi adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Evaluasi dalam pendidikan dapat diartikan sebagai suatu proses dalam usaha untuk mengumpulkan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk membuat keputusan akan perlu tidaknya memperbaiki sistem pembelajaran sesuai dengan tujuan yang akan ditetapkan. Tyler seperti yang dikutip Sukmadinata menyatakan bahwa evaluasi adalah proses untuk mengetahui apakah tujuan pendidikan sudah tercapai atau terrealisasikan.

Sedangkan pengertian kurikulum, adalah sebagai rencana yang dibuat untuk membimbing anak belajar di sekolah, disajikan dalam bentuk dokumen yang sudah ditentukan, disusun berdasarkan tingkat-tingkat generalisasi, dapat diaktualisasikan dalam kelas, dapat diamati oleh pihak yang berkepentingan dan dapat membawa perubahan tingkah laku.

Evaluasi dan kurikulum merupakan dua disiplin yang memiliki hubungan sebab akibat. Hubungan antara evaluasi dan kurikulum bersifat organis, dan prosesnya secara evolusioner. Evaluasi merupakan kegiatan yang luas, kompleks dan terus menerus, untuk mengetahui proses dan hasil pelaksanaan system pendidikan dalam mencapai tujuan yang ditentukan. Berikut pembagiannya:

1. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (Pasal 1 Butir 19 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional);
2. Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pembelajaran serta metode yang digunakan sebagai pedoman menyelenggarakan kegiatan pembelajaran (Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 725/Menkes/SK/V/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan di bidang Kesehatan.);
3. Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar di perguruan tinggi (Pasal 1 Butir 6 Kepmendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa);
4. Menurut Grayson (1978), kurikulum adalah suatu perencanaan untuk mendapatkan keluaran (out- comes) yang diharapkan dari suatu pembelajaran. Perencanaan tersebut disusun secara terstruktur untuk suatu bidang studi, sehingga memberikan pedoman dan instruksi untuk mengembangkan strategi pembelajaran (Materi di dalam kurikulum harus diorganisasikan dengan baik agar sasaran (goals) dan tujuan (objectives) pendidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai; e. Sedangkan menurut Harsono (2005), kurikulum merupakan gagasan

pendidikan yang diekpresikan dalam praktik. Dalam bahasa latin, kurikulum berarti track atau jalur pacu. Saat ini definisi kurikulum semakin berkembang, sehingga yang dimaksud kurikulum tidak hanya gagasan pendidikan tetapi juga termasuk seluruh program pembelajaran yang terencana dari suatu institusi pendidikan.

B. Peranan Evaluasi Kurikulum

Evaluasi kurikulum memegang peran penting baik dalam penentuan kebijaksanaan pendidikan pada umumnya, maupun dalam pengambilan keputusan dalam kurikulum. Hasil-hasil evaluasi kurikulum dapat digunakan oleh para pemegang kebijaksanaan pendidikan dan para pengembang kurikulum dalam memilih dan menetapkan kebijakan pengembangan sistem pendidikan dan pengembangan model kurikulum yang digunakan. Hasil-hasil evaluasi kurikulum juga dapat digunakan oleh guru-guru, kepala sekolah dan para pelaksana pendidikan lainnya, dalam memahami dan membantu perkembangan siswa, memilih bahan pelajaran, memilih metode dan alat-alat bantu pelajaran, cara penilaian, serta fasilitas pendidikan lainnya.

Beberapa hasil evaluasi menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan keputusan. Pihak pengambil keputusan dalam pelaksanaan pendidikan dan kurikulum adalah guru, murid, orang tua, kepala sekolah, para inspektur, pengembang kurikulum dan lain-lain. Namun demikian pada prinsipnya tiap pengambil keputusan dalam proses evaluasi memegang peran yang berbeda, sesuai dengan posisinya.

Salah satu kesulitan yang dihadapi dalam penggunaan hasil evaluasi bagi pengambilan keputusan adalah hasil

evaluasi yang diterima oleh berbagai pihak pengambil keputusan adalah sama. Masalah yang timbul adalah apakah hasil evaluasi tersebut dapat bermanfaat bagi semua pihak. Jawabannya belum tentu, karena suatu informasi mungkin lebih bermanfaat bagi pihak tertentu tetapi kurang bermanfaat bagi pihak yang lain.

Kesatuan penilaian hanya dapat dicapai melalui suatu konsensus. Konsensus tersebut berupa kerangka kerja penelitian yang dipusatkan pada tujuan-tujuan khusus, pengukuran prestasi belajar yang bersifat behaviorial, analisis statistik dari prestasi tes post tes. Secara umum, langkah-langkah pokok evaluasi pendidikan meliputi tiga kegiatan utama yaitu persiapan, pelaksanaan dan pengolahan hasil.

Peran evaluasi kurikulum dalam pendidikan berkenaan dengan tiga hal, yaitu sebagai berikut.

1. Konsep sebagai moral judgement
2. Konsep utama dalam evaluasi adalah masalah nilai.
3. Evaluasi dan penentuan keputusan
4. Evaluasi dan konsensus nilai

Kesatuan penilaian dapat dicapai melalui suatu konsensus. Konsensus tersebut berupa kerangka kerja penelitian yang dipusatkan pada tujuan-tujuan khusus, pengukuran prestasi belajar behaviorial, analisis statistik dari prestasi tes dan post tes. Ada dua kriteria dalam penilaian kurikulum:

1. Kriteria berdasarkan tujuan yang telah ditentukan atau sering disebut criteria patokan.
2. Kriteria berdasarkan norma-norma atau standar yang ingin dicapai sebagaimana adanya.

Berdasarkan Konsep dan Kriteria kurikulum diatas, Peranan kurikulum terbagi 3 yaitu:

1. Peranan konservatif

Peranan konservatif menekankan bahwa kurikulum dapat dijadikan sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai warisan budaya masa lalu yang dianggap masih relevan dengan masa kini kepada anak didik sebagai generasi penerus.

2. Peranan kreatif

Perkembangan ilmu pengetahuan dan aspek-aspek lainnya senantiasa terjadi setiap saat. Kurikulum melakukan kegiatankegiatan kreatif dan konstruktif, dalam arti menekankan bahwa kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru. Kurikulum harus dapat membantu setiap peserta didik dalam mengembangkan potensi dirinya.

3. Peranan kritis dan evaluatif

Peranan ini dilatarbelakangi oleh adanya kenyataan bahwa nilai-nilai dan budaya yang hidup dalam masyarakat senantiasa mengalami perubahan, sehingga pewarisan nilai-nilai dan budaya masa lalu kepada peserta didik perlu disesuaikan kondisi yang ada di masa sekarang.

C. Aspek Kurikulum yang Dinilai

Aspek-aspek yang harus dievaluasi, menurut Arich Lewy (1997) sesuai dengan tahap-tahap dalam pengembangan kurikulum. Evaluasi ini menjadi sangat komprehensif dan melibatkan berbagai penelitian. Aspek-aspek itu adalah:[6]

1. Penentuan Tujuan Umum

Tujuan kurikulum bertalian erat dengan nilai-nilai, aliran-aliran, dan kekuatan-kekuatan dalam masyarakat. Sering tujuan umum pendidikan ditentukan oleh pemerintah. Untuk menilainya diperlukan bantuan para ahli sosiologi, ekonomi, antropologi, psikologi dan ahli ilmu sosial lainnya yang lebih mampu mengungkapkan fakta-fakta tentang kecenderungan demografi, kebutuhan tenaga kerja, perubahan ekonomi dan nilai-nilai budaya di dalam masyarakat. Mereka akan menggunakan data statistik yang ada pada pemerintah.

Jadi yang perlu dinilai ialah apakah tujuan kurikulum telah sesuai dengan nilai-nilai bangsa, politik pemerintah dalam pembangunan negara, perkembangan zaman, aspirasi masyarakat akan tetapi juga kebutuhan anak dalam menghadapi hidupnya di masa mendatang.

2. Perencanaan

Tujuan pendidikan yang telah dirumuskan harus diterjemahkan ke dalam kegiatan-kegiatan kurikuler yang lebih terinci dalam bentuk mata pelajaran, bahan tertentu, proses belajar sehingga team pengembang kurikulum harus mulai pula menulis satuan-satuan pelajaran, memikirkan alat-alat pengajaran serta kegiatan-kegiatan belajar siswa, sarana dan prasarana, serta dipikirkan proses belajar mengajar yang paling serasi. Kurikulum harus diperhatikan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Sehingga sebelum pengembangan kurikulum, harus diadakan perencanaan-perencanaan bagian-bagian dari kurikulum sehingga

kurikulum bisa sesuai dengan kebutuhan, perkembangan dari masyarakat.

3. Uji-coba dan Revisi

Suatu kurikulum sering berupa buatan “dibelakang meja tulis” dan dilaksanakan atas keberhasilan panitia penyusunan kurikulum untuk memperoleh persetujuan resmi dari pihak atasan yang berwenang atas pendidikan, sehingga kurikulum dapat dikatakan subjektif. Kurikulum serupa itu masih dapat diterima bila diharapkan agar setiap anak belajar dalam rangka kewajiban belajar sampai usia 12 bahkan ada sampai 15 atau 18 tahun, maka penyusunan kurikulum yang sesuai bagi siswa yang berbeda-beda latar belakang sosial, bakat, minat dan kemampuannya itu dapat dipecahkan secara subjektif saja.

Bila dipertimbangkan pula bahwa pendidikan itu berlangsung dalam masyarakat yang dinamis dalam dunia yang kompleks maka pengembangan kurikulum harus ditangani secara lebih ilmiah, dengan mengumpulkan data empiris melalui pengamatan dan eksperimentasi. Maka tiap pembaharuan kurikulum hendaknya melalui tahap uji coba dengan sampel terbatas untuk melihat kelemahan-kelemahan yang harus direvisi. Berbagai alat test formatif diperlukan untuk itu di samping mengobservasikan proses belajar-mengajar yang berlangsung didalam kelas, maupun luar kelas yang dituangkan dalam bentuk laporan. Dapat juga diminta pendapat dan penilaian para siswa sendiri tentang pengalaman belajar mereka dengan kurikulum baru itu, dari pendapat guru, ahli bidang disiplin ilmu, ahli psikologi dan para pendidik.

Berdasarkan uji coba itu diadakan revisi dan perubahan program pelajaran yang masih dapat lagi diuji-cobakan.

4. Uji Lapangan

Setelah diperoleh program yang dianggap cukup mantap berdasarkan uji-coba, maka tiba waktunya untuk melaksanakannya dengan sampel random yang lebih luas sehingga diperoleh situasi yang menyerupai situasi lapangan yang sebenarnya.

Bila uji-coba dilakukan untuk menemukan kelemahan-kelemahan program, maka pada uji lapangan dipelajari kondisi-kondisi dimana kurikulum itu dapat dijalankan agar berhasil baik. Diperhatikan misalnya kesiapan tenaga pengajar, administrasi, murid, keadaan dan lokasi sekolah dikota atau pedesaan, besar sekolah, fasilitas, keadaan sosial-ekonomi, dan sebagainya. Makin besar heterogenitas heterogenitas populasi sekolah makin besar pula sampel yang diperlukan.

5. Pelaksanaan Kurikulum

Pelaksanaan suatu kurikulum yang baru harus disertai oleh berbagai perubahan lainnya, misalnya: pendidikan guru, pre-service maupun in-service, metode mengajar, buku pelajaran, serta alat-alat instruksional lainnya. Bila bahannya baru, seperti matematika modern, maka guru-guru perlu mendapat penataran sehingga dalam pelaksanaan kurikulum baru guru sudah menguasai dan mampu mengajarkan pelajaran kepada siswa dengan baik dan profesional.

Dalam pelaksanaan kurikulum baru perlu adanya kerja sama dan bantuan dari pihak-pihak dari pendidikan

(komite, kepala sekolah, guru) maupun dari pihak orang tua dan masyarakat umum. Salah satu aspek yang sangat penting namun sering kurang diperhatikan ialah sistem ujian lokal maupun nasional. Sistem ujian harus disesuaikan dengan kurikulumnya. Kurikulum yang misalnya mengutamakan proses tidak akan dapat berhasil baik bila evaluasi senantiasa mementingkan produk berupa fakta, informasi, dan pengetahuan lepas-lepas.

D. Model-Model Evaluasi Kurikulum

1. Evaluasi Model Penelitian

Model evaluasi kurikulum yang menggunakan model penelitian didasarkan atas teori dan metode tes psikologis serta eksperimen lapangan. Tes psikologis atau tes psikometrik pada umumnya mempunyai dua bentuk, yaitu tes intelegensi yang ditujukan untuk mengukur kemampuan bawaan, serta tes hasil belajar yang mengukur perilaku skolastik.

Eksperimen lapangan dalam pendidikan, dimulai tahun 1990 dengan menggunakan metode yang biasa digunakan dalam penelitian botani pertanian. Para ahli botani pertanian mengadakan percobaan untuk mengetahui produktivitas bermacam-macam benih. Beberapa macam benih ditanam pada petak-petak tanah yang memiliki kesuburan dan lain-lain yang sama. Dari percobaan tersebut dapat diketahui benih mana yang paling produktif. Percobaan serupa dapat juga digunakan untuk mengetahui pengaruh tanah, pupuk dan sebagainya terhadap produktivitas suatu macam benih.

Model eksperimen dalam botani pertanian dapat digunakan dalam pendidikan, anak dapat disamakan dengan benih, sedang kurikulum serta berbagai fasilitas serta sistem

sekolah dapat disamakan dengan tanah dan pemeliharanya. Untuk mengetahui tingkat kesuburan benih (anak) serta hasil yang dicapai pada akhir program percobaan dapat digunakan tes (pre test dan post test).

Comparative approach dalam evaluasi. Salah satu pendekatan dalam evaluasi yang menggunakan eksperimen lapangan adalah mengadakan perbandingan antara dua macam kelompok anak, umpamanya yang menggunakan dua metode belajar yang berbeda. Kelompok pertama belajar membaca dengan metode global dan kelompok lain menggunakan metode unsur. Kelompok mana yang lebih baik atau lebih berhasil? Apakah keberhasilan metode tersebut dapat ditransfer ke metode yang lain? Rancangan penelitian ini membutuhkan persiapan yang sangat teliti dan rinci, besarnya sampel, variabel yang terkontrol, hipotesis, treatment, tes hasil belajar dan sebagainya, perlu dirumuskan secara tepat dan rinci.

Ada beberapa kesulitan yang dihadapi dalam eksperimen tersebut. Pertama, kesulitan administratif, sedikit sekali sekolah yang bersedia dijadikan sekolah eksperimen. Kedua, masalah teknis dan logis, yaitu kesulitan menciptakan kondisi kelas yang sama untuk kelompok-kelompok yang diuji. Ketiga, sukar untuk mencampurkan guru-guru mengajar pada kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol, pengaruh guru-guru tersebut sukar dikontrol. Keempat, ada keterbatasan mengenai manipulasi eksperimen yang dapat dilakukan. Dalam botani pertanian dengan rancangan yang sangat sempurna dapat memanipulasi eksperimen sampai 25 treatment, tetapi dalam penelitian pendidikan tidak mungkin dapat melakukan treatment sebanyak itu.

2. Evaluasi Model Objektif

Evaluasi model objektif (model tujuan) berasal dari Amerika Serikat. Perbedaan model objektif dengan model komparatif adalah dalam dua hal. Pertama dalam model objektif, evaluasi merupakan bagian yang sangat penting dari proses pengembangan kurikulum. Para evaluator juga penting mempunyai peranan menghimpun pendapat-pendapat orang luar tentang inovasi kurikulum yang dilaksanakan. Evaluasi dilakukan pada akhir pengembangan kurikulum, kegiatan penilaian ini sering disebut evaluasi sumatif. Dalam hal-hal tertentu sering evaluator bekerja sebagai bagian dari tim pengembang. Informasi-informasi yang diperoleh dari hasil penilaiannya digunakan untuk penyempurnaan inovasi yang sedang berjalan.

Evaluasi ini sering disebut evaluasi formatif. Kedua, kurikulum tidak dibandingkan dengan kurikulum lain tetapi diukur dengan seperangkat objektif (tujuan khusus). Keberhasilan pelaksanaan kurikulum diukur oleh penugasan siswa akan tujuan-tujuan tersebut. Para pengembang kurikulum yang menggunakan sistem intruksional (model objektif) menggunakan standar pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Tujuan dari comparative approach adalah menilai apakah kegiatan yang dilakukan kelompok eksperimen lebih baik daripada kelompok kontrol. Oleh karena itu, kedua kelompok tersebut harus ekuivalen, tetapi dalam model objektif hal itu tidak menjadi soal.

Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh tim pengembang model objektif.

- a. Ada kesepakatan tentang tujuan-tujuan kurikulum,
- b. Merumuskan tujuan-tujuan tersebut dalam perbuatan siswa,
- c. Menyusun materi kurikulum yang sesuai dengan tujuan tersebut,
- d. Mengukur kesesuaian antara perilaku siswa dengan hasil yang diinginkan.

Pendekatan inilah yang digunakan oleh Ralph Taylor (1930) dalam menyusun tes dengan titik tolak pada perumusan tujuan tes, sebagai asal mula pendekatan sistem (system approach). Pada tahun 1950-an Benjamin S. Bloom dengan kawan-kawannya menyusun klasifikasi sistem tujuan yang meliputi daerah-daerah belajar (cognitive domain). Mereka membagi proses mental yang berhubungan dengan belajar tersebut dalam 6 kategori, yaitu knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis dan evaluation. Mereka membagi-bagi lagi tujuan-tujuan tersebut pada sub-tujuan yang lebih khusus. Perumusan tujuan-tujuan dari Bloom dan kawan-kawan belum sampai pada perumusan tujuan yang bersifat behavioral, untuk itu diperlukan perumusan lebih lanjut yang sangat khusus dan bersifat behavioral.

Dasar-dasar teori Tylor dan Bloom menjadi prinsip sentral dalam berbagai rancangan kurikulum, dan mencapai puncaknya dalam sistem belajar berprogram dan sistem intruksional. Sistem pengajaran yang terkenal adalah IPI (Individually Prescribed Instruction), suatu program yang dikembangkan oleh Learning Research and Development Centre Universitas Pittsburg. Dalam IPI anak mengikuti kurikulum yang memiliki 7 unsur:

- a. Tujuan-tujuan pengajaran yang disusun dalam daerah-daerah, tingkat-tingkat dan unit-unit,
- b. Suatu prosedur program testing,
- c. Pedoman prosedur penulisan,
- d. Materi dan alat-alat pengajaran,
- e. Kegiatan guru dalam kelas,
- f. Kegiatan murid dalam kelas, dan
- g. Prosedur pengelolaan kelas.

Tes untuk mengukur prestasi belajar anak merupakan bagian integral dari kurikulum. Tiap butir tes berkenaan dengan keterampilan, unit atau tingkat tertentu dari tujuan khusus. Untuk mengikuti program pendidikan, siswa harus mengambil dulu tes penempatan, untuk menentukan dimana mereka harus mulai belajar. Kemajuan siswa dimonitor oleh guru dengan memberikan tes yang mengukur tingkat penguasaan tujuan-tujuan khusus melalui pre test dan post test. Siswa dianggap menguasai suatu unit bila memperoleh skor minimal 80. Bila ini sudah dikuasai berarti penguasaan siswa sudah sesuai dengan kriteria.

3. Model Campuran Multivariasi

Evaluasi model perbandingan (comparative approach) dan model Tylor dan Bloom melahirkan model evaluasi campuran multivariasi, yaitu strategi evaluasi yang menyatukan unsur-unsur dari kedua pendekatan tersebut. Strategi ini memungkinkan perbandingan lebih dari satu kurikulum dan secara serempak keberhasilan tiap kurikulum diukur berdasarkan kriteria khusus dari masing-masing kurikulum.

Seperti halnya pada eksperimen lapangan serta usaha-usaha awal dari Tylor dan Bloom, metode ini pun terlepas dari proyek evaluasi. Metode-metode tersebut masuk ke bidang kurikulum setelah komputer dan program paket berkembang yaitu tahun 1960. Program paket berisi program statistik yang sederhana yang tidak membutuhkan pengetahuan komputer untuk menggungkannya. Dengan berkembangnya penggunaan komputer memungkinkan studi lapangan tidak dihambat oleh kesalahan dan kelambatan. Semua masalah pengolahan statistik dapat dikerjakan dengan komputer. Langkah-langkah model multivariasi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Mencari sekolah yang berminat untuk dievaluasi/diteliti,
- b. Pelaksanaan program. Bila tidak ada pencampuran sekolah tekanannya pada partisipasi yang optimal,
- c. Sementara tim menyusun tujuan yang meliputi semua tujuan dari pengajaran umpamanya dengan metode global dan metode unsur, dapat disiapkan tes tambahan.
- d. Bila semua informasi yang diharapkan telah terkumpul, maka mulailah pekerjaan komputer.
- e. Tipe analisis dapat juga digunakan untuk mengukur pengaruh bersama dari beberapa variabel yang berbeda.

Beberapa kesulitan dihadapi dalam model campuran multivariasi ini. Kesulitan pertama, adalah diharapkan memberikan tes statistik yang signifikan. Maka untuk itu diperlukan 100 kelas dengan 10 pengukuran, dan ini lebih memungkinkan daripada 10 kelas dengan 10 pengukuran. Jadi model multivariasi ini lebih sesuai bagi evaluasi kurikulum skala besar. Kesulitan kedua adalah terlalu banyaknya variabel yang perlu dihitung pada suatu saat, kemampuan komputer

hanya sampai 40 variabel, sedangkan dengan model ini dapat dikumpulkan 300 variabel. Kesulitan ketiga, meskipun model multivariasi telah mengurangi masalah kontrol berkenaan dengan eksperimen lapangan tetapi tetap menghadapi masalah-masalah perbandingan.

Model-model evaluasi kurikulum tersebut berkembang dari dan digunakan untuk mengevaluasi model atau pendekatan kurikulum tertentu. Model perbandingan lebih sesuai untuk mengevaluasi pengembangan kurikulum yang menekankan isi (Content based curriculum), model tujuan lebih sesuai digunakan dalam pengembangan kurikulum yang menggunakan pendekatan tujuan (Goal based curriculum), model campuran dapat digunakan untuk mengevaluasi baik kurikulum yang menekankan isi, tujuan maupun situasi (Situation based curriculum).

DAFTAR PUSTAKA

- Hamid Syarief. (2002). *Pengembangan Kurikulum*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Abdurrahman dan Farida Herna Astuti, "Analisis Pengembangan Kurikulum Model Beachamp di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Islam", *Jurnal Realita*, 3/5 (April 2018)
- Abu Ahmadi & Nur Uhbiyati. (2001). *Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ahid, N. (2006). Konsep dan Teori Kurikulum dalam Dunia Pendidikan. *Jurnal Islamica*, 1(1), 12-29.
- Alamsayah, dkk. (2011). *Buku Ajar Pengembangan Kurikulum*. Surabaya: Kopertais IV Press.
- Andayani, W. S. dan D. (2012). *Komponen-Komponen Pengembangan Kurikulum*. In *Kurikulum & Pembelajaran*. Jakarta: Rajawali Press.
- Andita, Dyah. 2012. "Model-Model Pengembangan Kurikulum". Tersedia pada <http://dyahandita.blogspot.com/2012/04/1.html>
- Ansyar, Mohd. dan H. Nurtain. 1992. *Pengembangan dan Inovasi Kurikulum*. Jakarta: P2TK Ditjendikti Depdikbud.
- Arifai, Ahmad. Pengembangan Kurikulum Pesantren, Madrasah, dan Sekolah, *Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, Vol. 3, No. 2, Desember 2018
- Arifin, Z. (2011). *Konsep Dan Model Pengembangan Kurikulum*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Arifin, Zainal. 2011. *Komponen dan Organisasi Kurikulum*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Arifin, Zainal, *Pengembangan Manajemen Mutu Kurikulum Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Diva Press, 2012.

- Asmariyani. (2014). Prinsip-Prinsip Pengembangan Kurikulum Dalam Perspektif Islam. *Jurnal AL-AFKAR*, 3(2), 66.
- Asri, M. (2017). Dinamika kurikulum di Indonesia. Modeling: *Jurnal Program Studi PGMI*, 4(2), 192–202.
- Azra, A. (1999). *Pendidikan Islam: Tradisi Modernisasi Menuju Milenium Baru*. PT. Logos Wacana Ilmu.
- Baharun, H. (2017). *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktik (Konsep, Prinsip, Model, Pendekatan dan Langkah-Langkah Pengembangan Kurikulum PAI)*. Yogyakarta: Cantrik Pustaka.
- Cahyana, O. A. (2008). Kinerja kepala sekolah di era globalisasi. *Jurnal Teknodik*, XII(2), 33–46.
- Dakin. 2004. *Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Daulay, H. P. (2007). *Pendidikan Islam: Dalam System Pendidikan Nasional di Indonesia*. Kencana.
- Daulay, H. P. (2012). *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*. Kencana.
- Dhaifi, A. (2017). Perkembangan Kurikulum PAI di Indonesia. *EDURELIGIA: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(1), 76–88.
- Didiyanto, Paradigma Pengembangan Kurikulum PAI di Lembaga Pendidikan, *Edureligia: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2017
- Ditjen Pendidikan Islam. (n.d.). *Sejarah Pendidikan Islam dan Organisasi*. Direktorat Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. Retrieved February 26, 2021, from <http://www.pendis.kemenag.go.id/new/sejarah-pendidikan-islam-dan-organisasi-ditjen-pendidikan-isalm/>
- Djamarah & Syaiful Bahri. (2000). *Psikologi Belajar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fauzan. (2017). *Kurikulum & Pembelajaran*. Tangerang: GP Press.

- Fauzi, A. (2017a). Building Transformative Management Epistemology at Pondok Pesantren Based on Local Wisdom: In Proceedings of The 1 st International Conference on Education and Islamic Culture "Rethinking Islamic Education Toward Cultural Transformation" Faculty of Tarbiyah. Islamic Institute of Nurul Jadid Probolinggo (pp. 199-203). Probolinggo.
- Fauzi, A. (2009). Strategi Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS) dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Studi Komparatif di Universitas Muhammadiyah Malang dan Universitas Islam Malang. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Hamalik, O. (2008). *Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta: Bumi aksara.
- Hamdi, M. M. (2017). Konsep Pengembangan Kurikulum. INTIZAM: *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1).
- Hidayat, S. (2013). Pengembangan Kurikulum Baru. PT Remaja Rosda Karya.
- Hidayat Tatang, "Model Pengembangan Kurikulum Tyler dan Implikasinya Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Sekolah", Potensi: *Jurnal Kependidikan Islam*, 5/1 (Juli-Desember 2019).
- Hitami & Munzir. (2004). *Mengkonsep Kembali Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Infnite Press.
- Idi, A. (2016). *Pengembangan Kurikulum, Teori dan Praktik* (1st ed.). Jakarta: Rajawali Press.
- Idi, Abdullah. 2011. *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Ar Ruz Media.
- Kuntowijoyo. (2002). *Radikalisasi Petani. Bentar Budaya*.
- Idi Abdullah, *pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek*, Jakarta: Gaya Media, 1999.

- Irsyad, Muhammad. *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Madrasah, Iqra'*, Vol. 2, No. 1, November 2016
- Iskandar Wiryokusumo, dan U. M. (1988). *Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum*. Jakarta: Bina Aksara.
- Juahab, J. (2019). Peran dan Tanggung Jawab Kepala Sekolah Dan Guru Dalam Pengembangan Kurikulum. *Bada'a: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 1(1), 23–30. <https://doi.org/10.37216/badaa.v1i1.241>
- Khuzaimah, Paradigma Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah (Analisis Berbagai Kritik terhadap PAI), *Jurnal Pendidikan*, Vol. 5, No. 1, Mei 2017
- Langgulong, Hasan. 1988. *Asas-asas Pendidikan Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Husna.
- Majid, A. (2006). *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Mansur Muslich, Pendidikan Karakter (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 172.
- Mudhofir Ali, Aplikasi Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Bahan Ajar Dalam Pendidikan Agama Islam, Jakarta: Rajagrafindo, 2011.
- Muhadzdzibah, M. S. dan P. D. (2017). Peran Kepala Sekolah Dalam Implementasi Kurikulum 2013 Di SMAN 2 Bengkulu Selatan Muhadzdzibah. *Manajer Pendidikan*, 11(5), 426–432.
- Muhaimin. (2003). *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam*. Pustaka Pelajar bekerjasama dengan PSAPM, Pusat Studi Agama, Politik dan Masyarakat Surabaya.
- Muhaimin. 2005. *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Prasada.
- Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam Di Sekolah, Madrasah dan Perguruan Tinggi*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019.

- Muhaimin dan Mujib, Abdul. 1993. *Pemikiran Pendidikan Islam Kajian Filosofis dan Kerangka Dasar Operasionalnya*. Bandung: Trigenda Karya.
- Muin Arifah, *Pengembangan Kurikulum Berbasis Karakter* (PGSD UNNES), 2014.
- Mukhtar, M. (1999). *Madrasah, Sejarah dan Perkembangannya*. Logos.
- Mulyana, A. (2019). No Title. Blogspot. <https://ainamulyana.blogspot.com/2018/05/permendikbud-nomor-6-tahun-2018-tentang.html>
- Nahrawi, A. (2008). *Pembaharuan Pendidikan Pesantren*. Gama Media.
- Nana Syaodih Sukmadinata. (2001). *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nana Sudjana. (1988). *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah*. Jakarta: Sinarbaru Algesindo.
- Napitupulu, D. S. (2018). *Dinamika Madrasah Sebelum Indonesia Merdeka*. ITTIHAD, 2(2).
- Ngalm Purwanto. (1995). *Ilmu Pendidikan Teori dan Praktis*. Bandung: Rosdakarya.
- Ni'mah, Lilis Lutviyatun. Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama di Pesantren, Madrasah, dan Sekolah, Prosiding Pascasarjana IAIN Kediri, Vol. 3, November 2020.
- Nizar, Samsul. 2002. *Filsafat Pendidikan Islam, Pendekatan Historis, Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Quantum Teaching.
- Nurhayati, A. (2013). Fenomena Madrasah Pasca SKB 3 Menteri Tahun 1975 dan Implikasinya terhadap Dunia Pendidikan Islam. *Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 133–144.
- Nurlaeli, Acep. Inovasi Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Pada Madrasah dalam Menghadapi Era Milenial, *Jurnal Wahana Karya Ilmiah Pascasarjana PAI Unsika*, Vol. 4, No. 2, Juli-Desember 2020

- Oemar Hamalik, *Dasar Dasar Pengembangan Kurikulum*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013 cet. 5.
- Oemar Hamalik. (2017). *Kurikulum dan pembelajaran* (1st ed.). Jakarta: Bumi Aksara.
- Oliva, P. F. (1992). *Developing Curriculum*. New York: Harper Collin Publisher.
- Permendikbud. (2018). Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah. http://lppks.kemdikbud.go.id/uploads/pengumuman/1526355089Permendikbud_Nomor6_Tahun2018.pdf
- Prastowo, A. (2014). *Pengembangan Bahan Ajar Tematik*. Jakarta: Kencana: Prenadamedia grup.
- Prof. Dr. Muchlas Samani dan Drs. Hariyanto, MS, Pendidikan Karakter (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya), h. 157.
- Ramayulis, 2008. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Penerbit Kalam Mulia.
- Sabarudin, M. (2015). Pola dan Kebijakan Pendidikan Islam Masa Awal dan Sebelum Kemerdekaan. *TARBIYA: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 1(1), 139–174.
- Sanjaya, W. (2010). *Kurikulum dan Pembelajaran: Teori dan Praktik Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Kencana.
- Sanjaya,W. (2013). *Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sanjaya, Wina. 2009. *Kurikulum dan Pembelajaran: Teori dan Praktik Pengembangan Kurikulum KTSP*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Steenbrink, K. A. (1986). Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Moderen. Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.

- Sudarman. (2019). *Pengembangan Kurikulum: Kajian Teori dan Praktik*. Samarinda: Mulawarman University Press.
- Sugiana, Aset. Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Implementasinya di MTs Nurul Ummah Yogyakarta, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. XVI, No. 1, Juni 2019
- Sukmadinata. 1997. Nana Syaodih. *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sukmadinata Nana Syaodih, *Pengantar Kurikulum Teori dan Praktek*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- Susilana, Rudi dkk. 2006. *Kurikulum dan Pembelajaran*. Bandung: *Jurusan Kutekpen FIP UPI*.
- Suyanto dan Djihad Hisyam. 2000. *Pendidikan di Indonesia Memasuki Milenium III*. Jakarta: Adicita Karya Nusa.
- Tim MEDP. 2008. *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
- Wahidmurni. (2010). *Pengembangan Kurikulum IPS & Ekonomi di Sekolah/Madrasah*. malang: uin maliki press.
- Wahyuni, F. (2015). Kurikulum dari masa ke masa. *Jurnal, Al-Adabiya*, 10(2).
- Yamin, M. (2009). *Manajemen Mutu Kurikulum Pendidikan; Panduan Menciptakan Manajemen Mutu Pendidikan Berbasis Kurikulum yang Progresif dan Inspiratif*. Yogyakarta: Diva Press.
- Yunus, M. (1992). *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Hidakarya Agung.

BIOGRAFI PENULIS



Miswar Saputra, M.Pd., lahir di Puuk 04 Maret 1987. Dari ayah bernama Syamsuddin Usman dan Ibu bernama Cut Manyak. Ia memiliki seorang istri bernama dr. Hj. Meinar Fitri. Penulis bertempat tinggal di Gampong Tijue Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Provinsi Aceh. Telah menyelesaikan studi Diploma dua di Program Studi Pendidikan Guru Madrasah ibtidayah (2005-2007) dan program studi strata satu Pendidikan Agama Islam di perguruan Tinggi Islam Al Hilal Sigli (2007-2011) kemudian melanjutkan program strata dua Pendidikan Agama Islam di universitas Islam Negeri Banda Aceh (2016-2019) kemudian sekarang sedang menyelesaikan program doktor studi Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Negeri Banda Aceh (2019-sekarang).

Karirnya dimulai sebagai dewan guru di dayah Nurur Rasyad Al Aziziyah tahun (2006-sekarang) pernah menjadi Dewan Guru di TPA Al Mujahidin Gampong Puuk (2003-sekarang), pernah menjadi Dewan Guru di Madrasah Diniyah Islamiyah Bale Reuba, pernah menjadi Dewan Guru di TPA Al Hidayah Gampong Dayah Teungoh, Ketua remaja Masjid Al Qurban Tijue (2016-2018) kemudian sebagai guru honorer di MAN 2 Pidie (Beureunuen (2009-sekarang) sebagai guru di MTsS Ulumul Qur'an Sigli (2013-sekarang) sebagai tenaga pengajar di SMAN Ulumul Qur'an Sigli (2018-sekarang) sebagai Ketua Pengawas Syariat Kabupaten

Pidie (2017-sekarang) dan sebagai penyuluh Agama Islam Non PNS (2016-sekarang). Sebagai Dewan Guru Balai Pengajian Al Amin Gampong Tijue (2019-sekarang) Juga dulu Aktif di beberapa Ormas diantaranya KAPMI, KAMMI, FLP, Dayah Insafuddin, Bakomubin, NU, HUDA, RTA, PII, BKPRMI, ISAD penulis juga menjadi peserta dialog antar umat lintas agama se-provinsi Aceh dan sebagainya.

Bidang kajian yang menjadi tanggungjawab penulis di MAN 2 Pidie Akidah Akhlak, Pendidikan Karakter, disamping itu penulis pernah aktif mengisi kajian Safari Dakwah di Pasantren Modern seperti Ulumuddin Aceh Utara, SMA Modal Bangsa, SMA Fajar Harapan, SMA RIAB, Darul Ulum Jambo Tape, Babunnajah Ulee Kareng, MUQ Pagar Air Banda Aceh, Dayah darul Ihsan Krueng Kalee Banda Aceh, Babul Maqfirah Cot Keueng, Madinitud Syamsuddhuha Aceh Utara, Al Manar Cot Iri Banda Aceh, Nurur Fikri Mata le dan lain sebagainya.

Karya tulis yang telah di publish diantaranya menjadi pemakalah di universitas lampung, di unaya Banda Aceh, universitas muhammaddiyah Surabaya, karya tulis ilmiah inovasi pembelajaran al Qur'an pada era modern tingkat nasional 2020 oleh yayaysan griya Al Qur'an Surabaya.



Zaedun Na'im, M.Pd.I. Saat ini sebagai dosen tetap di STAI Ma'had Aly Al-Hikam Malang. Saat ini pula sedang menempuh program doktoral Manajemen pendidikan Islam di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Selain sebagai dosen tetap penulis juga diamanahi menjabat sebagai Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Selain aktif mengajar juga sebagai pendidik

di pesantren mahasiswa Al-Hikam Malang. Selain itu juga menjabat sebagai editor in chief Jurnal EVALUASI (Sinta3) dan LEADERSHIP program studi manajemen pendidikan Islam, serta menjadi editor atau reviewer beberapa jurnal nasional beberapa perguruan tinggi. Keahlian keilmuan penulis adalah pendidikan Agama.



Syahidin, S.E., M.Si. Lahir di Sekinel, 25 Februari 1990 dari pasangan orang tua Ayah Juanda dan Ibu Ruaidah. Penulis anak ke-3 dari 4 bersaudara. Alamat Tinggal sekarang di Kampung Pinangan Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh, penulis mempunyai seorang Putri yang cantik bernama Qaulan Sadida berumur 2.5 Tahun dan seorang istri bernama Ns. Putri Rizky Amelia, S.Kep. Penulis bekerja sebagai Dosen Tetap mulai dari Tahun 2017 di Universitas Gajah Putih Takengon hingga sekarang dan sebagai Ketua Jurusan Program Studi Ekonomi Pembangunan sejak Tahun 2019 sampai dengan sekarang. Selain menjadi Dosen, Penulis juga bekerja sebagai Penyuluh Agama Islam Honorer Non PNS di KUA Kebayakan Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah sejak Tahun 2021 hingga sekarang.

Penulis mulai menempuh pendidikan formal di SD Negeri 8 Linge tamat Tahun 2003 kemudian melanjutkan pendidikan ke Ma'had Pesantren Darul Mukhlisin tingkat MTs dan tamat pada Tahun 2006, lanjut ke tingkat MAS Darul Mukhlisin tamat pada Tahun 2009. Mulai masuk ke Perguruan Tinggi pada Tahun 2009 selesai pada Tahun 2014 di Universitas Gajah Putih dengan mengambil Jurusan Program Studi S-1 Ekonomi

Pembangunan, S-2 tamatan Tahun 2016 dan masuk pada Tahun 2015 dari Universitas Sumatera Utara Jurusan Ekonomi Pembangunan/Magister Sains.

Alhamdulillah dengan ijin Allah SWT pada Tahun 2020 masuk di Semester Genap Penulis dinyatakan Lulus sebagai Mahasiswa Program Pascasarjana Doktoral dengan melanjutkan Pendidikan S-3 (Doktor) Ilmu Ekonomi di Universitas Sumatera Utara dan mulai kuliah pertengahan Bulan Februari pada Tanggal 22 Tahun 2021. Selain pendidikan Formal, Penulis juga melanjutkan pendidikan Non Formal dibidang Kesehatan, Manajemen Kepemimpinan dan Kepenulisan Buku maupun Jurnal sampai mendapatkan Gelar Non Akademik yang bisa ditempatkan dibelakang nama. Gelar yang diraih dibidang kesehatan C.SLHF: Certified Secret of Longevity with Healhty Food (Indonesia Excellent Education For Excellent Life) (IEEL Institute). Dibidang Manajemen Kepemimpinan C.LMA: Certified Leadership Management Associate (Indonesia Excellent Education For Excellent Life) (IEEL Institute) dan dibidang Penulisan Buku/Jurnal C.BPA: Certified Book and Paper Authorship (Indonesia Excellent Education For Excellent Life) (IEEL Institute) semua pendidikan non formal diraih pada Tahun 2020. Jurnal yang sudah diterbitkan berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Aceh Tengah dan Analisis Pengaruh Penyaluran Dana PNPM Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Terhadap Pendapatan Rumah Tangga di Kampung Kute Reje Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah. Buku yang sudah diterbitkan berjudul Kewirausahaan.



Puspo Nugroho, Lahir di Salatiga pada Tanggal 29 April tahun 1987, putra tunggal

dari bapak Sukarman (Almrhm) dan Ibu Painem. Ia berprofesi sebagai Dosen di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus pada Rumpun Pendidikan Agama Islam. Pendidikan Terakhir Magister pada keilmuan Pendidikan Agama Islam di STAIN Salatiga (sekarang IAIN) tahun 2014. Pengalaman Bekerja mulai 2010-2014 sebagai tim Achivement Motivation Training di Biro Konsultasi Psikologi TAZKIA IAIN Salatiga, 2010-2012 sebagai guru Pendidikan Agama Islam dan PLt Kepala SMP Islam Raden Paku Salatiga, 2010-2014 sebagai Pengembang TPQ-Madrasah Diniyah & Kepala PAUD berbasis Al Qur'an Al Hidayah Salatiga, 2012-2013 Guru di MTs NU Yasinta Salatiga, 2013-2014 sebagai Guru PAI di SMP Negeri 5 Kota Salatiga dan mulai tahun 2014 aktif sebagai Dosen ASN di IAIN Kudus. Selain aktif mengajar juga sebagai Penulis di berbagai jurnal dan peneliti. Sebagai Editor pada Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam (Sinta 2) Prodi PAI IAIN Kudus, Reviewer pada Jurnal Dinamika; Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora. Diantara karya-karyanya: Jurnal Mudarrisa IAIN Salatiga (Pendidikan Kerukunan Umat Beragama; Telah konsep kerukunan umat beragama perspektif pendidikan Islam), Jurnal Thufula (Pandangan Kognitifisme dan Aplikasinya dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Anak Usia Dini), Jurnal Arabia (Dikotomi Pembelajaran Bahasa Arab: Antara Knowledge dan Performance), Jurnal Edukasia (Membangun Tradisi Pluralisme Dalam Perspektif Pendidikan Islam), (Internalisasi Nilai-Nilai Karakter Dan Kepribadian Mahasiswa Pendidikan Agama Islam Melalui Pendekatan Humanis-Religius), Jurnal Konseling Edukasi (Paradigma Pendekatan Spiritual dalam Layanan Bimbingan dan Konseling di Lembaga Pendidikan Islam), Jurnal Ijtimaiya (Tripusat Pendidikan

Sebagai Basis Sosialisasi dan Pembentukan Karakter Siswa), Jurnal Nadwa UIN Walisongo (*Internalization of Tolerance Values in Islamic Education*), Jurnal Quality (Manajemen Lembaga Pendidikan Islam Non Formal "Satu Atap" Al Hidayah Jurangguning Argomulyo Kota Salatiga) dan *International Journal of Advanced Science and Technology (Patterns of Interfaith Relations in Maintaining the Tolerance of Rural Communities: A Case Study in Juwana District, Pati, Central Jawa)*.

Beberapa penelitian yang telah dilaksanakan diantaranya: (2018: IAIN Kudus) Manajemen Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam Non Formal Al Hidayah Jurangguning Argomulyo Kota Salatiga, (2019: IAIN Kudus) Pola Relasi Antar Umat Beragama dalam Memelihara Toleransi Masyarakat Pedesaan Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Jawa Tengah, (2020: Puslitbang Penda dan Keagamaan RI) Persepsi guru agama terhadap penghapusan materi ajar khilafah dan Jihad dalam buku PAI (studi terhadap guru-guru PAI di Kab. Kudus Jawa Tengah).



Ismatul Maula, M.Pd. Lahir di Jambi 18 Januari 1985. Bertempat tinggal di Jl. Bantan Gg.Pisang Desa Senggoro Bengkalis Riau, Penulis adalah Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam STAIN Bengkalis dan Dosen Tetap pada Program Studi Manajemen Pendidikan Islam STAIN

Bengkalis, telah menyelesaikan studi S1 Jurusan Tarbiyah dan Keguruan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga pada Tahun 2007, dan S2 Program teknologi Pendidikan di

Universitas Jambi. Saat ini mengajar mata kuliah Teknologi Pendidikan, Manajemen Berbasis Sekolah, Manajemen Kurikulum. Telah mengikuti berbagai pelatihan dan workshop baik lokal maupun nasional dan telah mengikuti Pelatihan Asesor Pada Tahun 2019 dan Refreshmen di tahun 2020 dan saat ini aktif menjadi Asesor BAN PAUD dan PNF Provinsi Riau, dan pernah berkolaborasi menulis Buku referensi Manajemen SDM Pendidikan.



Lila Pangestu Hadiningrum, M.Pd adalah Dosen dan Ketua Konsorsium Keilmuan Fakultas Syariah IAIN Surakarta, dilahirkan di Bantul, 16 April 1981, mengampu mata kuliah Metodologi Penelitian dan Filsafat Ilmu. Menyelesaikan jenjang pendidikan S1 di UNS

dan S2 Teknologi Pendidikan UNS. Email: lilahadiningrum@gmail.com. Beberapa Karya ilmiah terbaru (2017-2021): Reorientasi Aksiologi dalam Pembelajaran Sejarah Melalui *Contextual Teaching And Learning (CTL)*, *Islamic Education Reconstruction: Mastery Learning Based In Modern Islamic Boarding*, Reaktualisasi Pendidikan Nilai Berbasis Kearifan Lokal (Studi Budaya Langgam Syahadat Kures Pada tradisi Sekaten Di Surakarta), *Enhance The Attractiveness Of Laznas Through A Quality Agricultural Empowerment Program In The Digital Era (Descriptive Analysis On Laznas Al-Azhar Indonesia)*, *Pengelolaan ZIS Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dan Penanggulangan Kemiskinan (Studi Deskriptif Dan Preskriptif Di Baznas Kabupaten/Kota Di Eks-Karesidenan Surakarta)*, *Using Coop-Coop Method To Improve The Students'natural Science Learning Competences*, Resepsi

Dialektika Hukum Islam Dengan Budaya (Studi Atas Praktek Pembagian Harta Warisan Masyarakat Bumiharjo Dan Selomarto Giriwoyo Wonogiri), Reduksi Perceraian Melalui Klinik Ketahanan Keluarga Dan Relasi Kesalingan Perspektif *Mubādalāh*, *Advance organizer* dan *LMS Edmodo* sebagai Referensi Budaya *E-Learning*, Pemberdayaan Keluarga Melalui Pendampingan Budidaya “*Empon-Empon*” serta Produksi dan Branding Karak Non “*Bleng*”. Selain karya ilmiah beberapa artikel disurat kabar dan majalah dengan judul: Keluarga “*Out Of The Box*” Perspektif Pendidikan Anak, Membangun Masyarakat Anti Hoax Melalui Literasi, Keluarga Dalam Menliterasikan Generasi Di Era Digital.



Dasep Bayu Ahyar, S.Pd., M.Pd, lahir di Ciamis-Jawa Barat, ia memperoleh gelar Sarjana Pendidikan bahasa Arab dari Institut Agama Islam Cipasung Singaparna-Tasikmalaya lulus tahun 2016. Selama kuliah di kampus tersebut ia juga mengabdikan diri

di Pondok Pesantren Cipasung-Tasikmalaya dimana pada waktu itu ia diberikan amanah menjadi pengurus asrama Sejahtera selama 4 tahun oleh Pimpinan Pesantren Cipasung yang sekaligus sebagai Rektor IAIC Cipasung Singaparna-Tasikmalaya yaitu Bapak Drs. KH. A. Bunyamin Ruhiat, M.Si. Kemudian ia melanjutkan Studi Magisternya di Bidang yang sama yaitu Pendidikan Bahasa Arab di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan lulus tahun 2020, ia tercatat sebagai lulusan terbaik pada Prodi Magister Pendidikan Bahasa Arab FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan predikat *Cumlaude* (*Mumtaz*) pada Wisuda ke-118 tahun 2020. Sekarang ia aktif

mengajar di Yayasan al Ihsan Kebagusan Pasar Minggu-Jakarta Selatan. Selain aktif ngajar di Yayasan tersebut ia juga menjadi Dosen di salah satu kampus Swasta di Daerah Jakarta Timur.

Karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikannya diantaranya: 1) Buku *"Basahi Lidahmu"* (deepublish, 2018), 2) *Mengenai Pemikiran Al-Mubarrid dan Kontribusinya Terhadap Perkembangan Balaghah* (Jurnal Arabia IAIN Kudus), 3) *Analisis Teks dalam Penelitian kebahasaan (sebuah Teori dan Aplikatif)* (Jurnal Shaut al-'Arabiyah UIN Alauddin Makasar), 4) *al-Ikhtibār al-Maqāliyy fī Taqwīm al-Tadrīs al-Lughah Al-Arabiyah Limarhalah al-Tsanawiyah* (Jurnal Shaut al-'Arabiyah UIN Alauddin Makasar) dan beberapa artikel lainnya.



Khaidir, M.Ag., lahir di Desa Sagoe 07 April 1977. Dari ayah bernama Sulaiman (Alm) dan Ibu bernama Mariana. Ia memiliki seorang istri bernama Mursyidah Andriani. Penulis bertempat tinggal di Gampong Karieng Kecamatan Grong-Grong Kabupaten Pidie Provinsi Aceh. Telah menyelesaikan studi strata satu di Program Studi Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Al-Aziziyah (2015).

Lulus strata dua di Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (2018). Karirnya dimulai sebagai dosen tetap yayasan di Islam Institut Agama Islam Al-Aziziyah (2018-sekarang). Menjadi Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Pidie (2007-2010). Kepala Program Wajar Dikdas 9 Tahun Yayasan Nurur Rasyad Al-Aziziyah. Sekretaris Sekaligus Pengajar di Yayasan Pendidikan Islam Dayah Nurur Rasyad Al-Aziziyah, Kab. Pidie.

Anggota Lembaga Survei Indonesia (LSI). Anggota Media Research Center (MRC) Pidie.

Karya ilmiah yang telah dipublikasikan antara lain: 1) Membentuk Karakter Disiplin dan Tanggung Jawab Melalui Keteladanan Guru Terhadap Siswa SD Negeri Bambong (Proceeding UM Surabaya, 2018), 2) Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Pendidikan Agama Islam Di MTs Nurur Rasyad Al-Aziziyah Tjue (Prosiding Seminar Nasional UNAYA, 2018). 3) Method of Parents in the Development of Child Prayers Attention Deficit Hyperactivity Disorder Case Study of ADHD Children in Kulam Kemukiman Syamtareil Village, North Aceh) (Journal Britain International of Linguistics Arts and Education).



Makmur, S.Pd.I., M.Pd.I yang dilahirkan 15 Januari 1984 di Salobongko Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara Propinsi Sulawesi Selatan. Menyelesaikan Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 283 Cenning pada Tahun 1997. Melanjutkan

Pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Salobongko selesai Tahun 2000. Melanjutkan Pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kota Palopo selesai Tahun 2003. Kemudian melanjutkan Pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palopo selesai Tahun 2008 dengan Jurusan Tarbiyah. Kemudian melanjutkan Pendidikan Program Magister (S2) di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar dengan Program Studi Dirasah Islamiyah Konsentrasi Pendidikan dan Keguruan selesai Tahun 2012. Sekarang mengambil Program Doktor (S3) di Universitas Islam Negeri

(UIN) Alauddin Makassar Program Studi Dirasah Islamiyah Konsetrasi Pendidikan dan Keguruan. Sejak Tahun 2009 sampai sekarang menjadi Dosen di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Mata kuliah yang pernah dibina dan diajarkan adalah Ilmu Pendidikan Islam, Ilmu Pendidikan, Profesionalisme Guru, Studi Islam dan Budaya Lokal, Ulumul Quran serta Fiqih Muamalah. Disela-sela kesibukannya sebagai Dosen juga aktif di berbagai organisasi, diantaranya: Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Kota Palopo, Ikatan Muballigh Kota Palopo, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Kota Palopo dan Forum Komunikasi ESQ Kota Palopo. Juga aktif menjadi Narasumber baik dikalangan Mahasiswa juga di Masyarakat.